

Ulya Kencana



Pengelolaan

# Wakaf Uang Tunai

dalam  
Perseroan Terbatas

Pengelolaan

**Wakaf**

**Uang Tunai**

dalam

Perseroan Terbatas



Ulya Kencana


Pengelolaan

# Wakaf

## Uang Tunai

dalam

Perseroan Terbatas

 leutikaprio

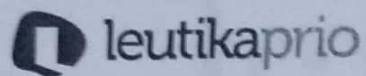
**Pengelolaan Wakaf Uang Tunal dalam Perseroan Terbatas**

–Yogyakarta: LeutikaPrio, 2012

xxv + 392 hlm.; 13x19 cm

Cetakan Pertama, Juli 2012

Penulis : Ulya Kencana  
Editor : Tim LeutikaPrio  
Desain Sampul : Anto  
Tata Letak : MazAnwar



Jl. Nogotirto 117 Yogyakarta 55292

Telp. (0274) 627100 (*hunting 4 lines*)

[www.leutikaprio.com](http://www.leutikaprio.com)

email: [marketing@leutikaprio.com](mailto:marketing@leutikaprio.com)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin dari penerbit.

ISBN 978-602-225-473-7

Dicetak oleh PT Leutika Nouvalitera

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

## PRAKATA

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala*, Sang Maha Pencipta yang telah memberikan karunia, berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan baik. *Shalawat* serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi Wassalam*, para keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam di dunia ini, yang mana karena kecintaan, kelembutan, dan kasih sayangnya kepada umatnya sehingga akhirnya kita semua dapat merasakan kebahagiaan dalam tuntunan ajarannya yang mulia.

Buku ini berasal dari hasil penelitian tesis pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Buku ini mencoba suatu asumsi, bahwa hukum Islam di bidang hukum muamalat (perekonomian) dapat dikembangkan aspek hukumnya dengan syarat tetap sesuai dengan nilai, asas, dan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji konsep hukum wakaf tunai ditransplantasikan hukumnya dalam ranah hukum ekonomi Indonesia (bisnis), yaitu badan hukum bisnis perusahaan perseroan terbatas, yaitu mengasumsikan pengelolaan wakaf uang tunai dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bentuk pengelolaannya baru dalam bentuk lembaga keuangan negara, sementara lembaga non keuangan seperti perseroan terbatas

belum dijelaskan meski telah disebutkan bahwa pengelolaan wakaf uang tunai boleh dalam bentuk investasi, saham, dan sebagainya.

Hal ini disebabkan oleh keprihatinan penulis pada lembaga-lembaga keuangan Islam yang belum menggembirakan perkembangannya dan belum memberikan kontribusi yang benar-benar diakui oleh negara karena dari aspek hukum perdata Indonesia belum mendapat legalitas yang kuat, sehingga pada sebagian masyarakat kurang begitu memercayai lembaga-lembaga pengelola keuangan Islam di Indonesia dan juga aspek *trust* (kepercayaan) yang diberikan oleh lembaga yang bersangkutan dalam pengelolaan dana filantropi umat (infak, sedekah, zakat, wakaf uang).

Dalam menjawab ketidakpercayaan masyarakat tersebut, maka dalam buku ini penulis mencoba untuk membahas bagaimana wakaf tunai sebagai salah satu bentuk dana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang hanya menyebutkan lembaga penjamin syariah yang diserahkan kepada bank syariah yang berhak mengelolanya, membolehkan pula kepada badan-badan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, di antaranya perusahaan perseroan terbatas. Dalam upaya itu, penulis membagi pembahasan buku ini ke dalam enam bab, yaitu:

Bab pertama membahas tentang pengembangan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, beranjak dari pemikiran pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif hukum, filsafat hukum wakaf tunai, teori hukum wakaf tunai, dan istilah hukum.



Bab kedua membahas wakaf tunai dan perseroan terbatas sebagai suatu ide revitalisasi hukum perdata Indonesia, karena wakaf tunai sebagai wujud kepedulian (filantropi) terhadap manusia, melihat perkembangan wakaf tunai dalam sejarah hukum, pendapat *fugaha* tentang hukum wakaf tunai, dan bagaimana wakaf tunai dalam perspektif hukum perdata Indonesia, yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pengelolaan Wakaf Uang.

Bab ketiga membahas mengenai pengembangan perseroan terbatas sebagai badan hukum filantropi. Melihat aspek perusahaan perseroan terbatas dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; filantropi perusahaan (CSR), tata kelola perusahaan dan perseroan terbatas sebagai nadhir badan hukum wakaf tunai.

Bab keempat membahas tentang konsep dan pendapat hukum tentang aspek pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas. Melihat bagaimana penerapan Undang-Undang Wakaf di Indonesia, keberadaan perusahaan perseroan terbatas dalam ranah hukum perdata Indonesia dan menurut hukum Islam, bentuk pengelolaan wakaf tunai yang tepat dan berguna di Indonesia, yaitu asumsi menjadikan wakaf tunai sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas, wakaf tunai dibeli saham pada PT tertentu, dan saham wakaf tunai sebagai agunan/jaminan usaha bisnis.



Bab kelima membahas mengenai kedudukan hukum pengelola wakaf tunai (nadhir) dalam perusahaan PT, yaitu bagaimana kedudukannya dalam PT wakaf, apa dapat nadhir mendirikan perusahaan PT yang modal/sahamnya berasal dari Wakaf tunai, dan pengelolaan wakaf tunai oleh nadhir yang diangkat perusahaan PT.

Bab keenam membahas tentang filantropi dan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dalam ranah hukum perusahaan PT yang berisi tentang filantropi (kedermawanan) dalam Islam, wakaf tunai sebagai salah satu wujud filantropi Islam, filantropi perusahaan berkaitan dengan filantropi dalam Islam, penelitian terhadap aktivitas dan penerapan CSR pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Palembang. Pengelolaan CSR yang dijadikan wakaf tunai PT dilakukan oleh nadhir yang diangkat oleh PT bersangkutan, yaitu bagaimana pembentukan divisi wakaf tunai dalam PT, CSR dikelola divisi wakaf tunai PT dan pertanggungjawaban divisi wakaf tunai PT, dan terakhir membahas pengembangan hukum wakaf tunai dikelola badan usaha bisnis PT dalam ranah hukum perdata Indonesia.

Buku ini dibuat untuk keperluan para mahasiswa, guru, dosen, ulama, *mubaligh*, penulis, akademisi, pemerhati, dan praktisi hukum yang berkecimpung dalam bidang hukum ekonomi Indonesia dan hukum Islam serta kalangan masyarakat umum lainnya yang berminat pada kajian perwakafan (wakaf uang tunai) di Indonesia.

Ucapan terima kasih banyak kepada orang tua, keluarga, guru, sahabat, dan para pihak yang telah memberikan bantuan, kesempatan dalam rangka studi serta tahap penyelesaian penelitian tesis ini pada Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, yaitu Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya beserta staf, Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc. Sp.Ek.; Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya beserta staf, Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H.; Sekretaris Program Doktorat Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya periode yang lalu, Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D.; Kiai Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Drs. K.H. Mahrus Amin; Pembimbing Pertama, Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.; Pembimbing Kedua, Amrullah Arpan, S.H., S.U.; Rektor IAIN Raden Fatah beserta staf, Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A.; Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah beserta staf, Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag.; Kepala Direktorat Haji Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan beserta staf; Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan beserta staf; Ketua ICMI Orwil Sumatera Selatan Periode 2011-2012 beserta pengurus dan Bupati Musi Rawas Periode II beserta jajaran pemerintahan, Drs. H. Ridwan Mukti, S.E., M.H., Ketua Lembaga Dompot Amal Sosial Insan Mulia (DSIM) Palembang beserta para staf; Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya beserta staf; Kepala Perpustakaan IAIN Raden Fatah beserta staf; Kepala Perpustakaan Masjid Agung

Sultan Mahmud Badaruddin beserta staf; Direktur beserta karyawan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Palembang; Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag.; Abdullah Gofar, S.H., M.H.; H.KN., Sofyan Hasan, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A.; Drs. Izomiddin, M.A.; Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag.; Drs. Syawaluddin Eka Saputra, Erna Wahyuningsih, S.H., M.Hum.; Drs. H. Ruslan Muhayyan, M.M.

Semoga Allah *Subhanahurwata'ala* memberikan karunia atas amal kebaikan mereka semuanya. Dan semoga buku ini sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan yang berbias baik di dunia dan di akhirat juga mendapat kebaikan. Demikian pula sebagai upaya bagi perkembangan pemikiran hukum untuk bidang kajian hukum ekonomi Indonesia yang bernuansa hukum Islam. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan saya minta maaf, dan kepada Allah Swt, saya mohon ampunan. Amin.

Penulis,

dto

Ulya Kencana

## PERSEMBAHAN

“Buku ini dipersembahkan untuk:  
kedua orang tua, keluarga, agama, masyarakat,  
bangsa, dan negara Indonesia.”



## KATA PENGANTAR

### KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kajian yang dilakukan berkaitan dengan salah satu bentuk filantropi Islam (kedermawanan) yang sedang dikembangkan, yaitu wakaf tunai. Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 43 ayat (3) hanya menyebutkan: "Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin *syariah*." Maka untuk kemaslahatan umat di bidang agama, sosial, ekonomi, dan budaya perlu badan hukum lain yang berkompeten untuk mengelola wakaf tunai tersebut, yaitu perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan firma.

Dalam buku ini disebutkan salah satu badan hukum bisnis yang sangat diminati masyarakat karena secara legalitas hukumnya kuat dalam ranah hukum perdata bisnis Indonesia, yaitu perusahaan perseroan terbatas. Namun, dari sisi hukum Islam, hukum perseroan menurut para ahli hukum Islam (*fugaha*) belum ada kesepakatan boleh dilakukan atau tidak. Karena perseroan (*syirkah*) dalam ranah perundang-undangan hukum Islam Indonesia belum ditetapkan meski dasar hukumnya tertera dalam Al-Qur'an dan *Al-Hadits*.

Berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan uang dan saham (Pasal 16 ayat [1] huruf b), merupakan salah



satu bentuk harta benda wakaf bergerak. Maka, diharapkan salah satu badan hukum korporasi, yaitu perseroan terbatas, dapat mengelola harta benda wakaf bergerak karena tertera dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan berbagai macam cara pengelolaan wakaf di antaranya investasi, penanaman modal, perdagangan, dan sebagainya.

Buku ini layak dibaca oleh kalangan mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang berminat dalam bidang kajian hukum Islam dan hukum bisnis Indonesia. Karya ini merupakan salah satu upaya terobosan kedua hukum tersebut yang masing-masing telah ada landasan yuridisnya di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, karena ada upaya hukum baru berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai yang dijadikan saham perseroan terbatas belum ada landasan yuridisnya. Diharapkan agar dalam ranah hukum bisnis Islam Indonesia dilegalisasikan dalam bentuk undang-undang perseroan terbatas versi Islam yang dapat mengakomodasi ajaran, prinsip, dan asas hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi bisnis secara luas.

Buku ini merupakan hasil penelitian tesis yang telah dilakukan pada Program Magister Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis, agar buku ini dapat menambah khazanah pemikiran hukum ekonomi (bisnis) Islam di Indonesia.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

dto

Dr. Zen Zanibar MZ. S.H., M.H.

# KATA PENGANTAR

## GURU BESAR HUKUM EKONOMI & KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur banyak hal yang berkaitan dengan wakaf dan sanksi hukumnya. Berkaitan dengan buku ini adalah pengelolaan harta benda wakaf bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan *syariah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 ayat [1] huruf b Undang-Undang Wakaf). Dalam hal ini nadhir sebagai badan hukum yang berhak mengelola wakaf uang tunai yang dimaksud.

Tujuan umum filantropi adalah mengelola dana sosial dan memanfaatkannya untuk kepentingan publik. Dalam hal ini terdapat dua macam filantropi, yaitu filantropi Islam (wakaf tunai) dan filantropi perusahaan (CSR/tanggung jawab sosial dan lingkungan). Keduanya belum ditata dengan baik (sistem *corporate governance*). Masih bersifat *traditional philanthropy* (wakaf keagamaan jangka pendek; *charity*/sumbangan), dan belum bersifat *social justice philanthropy* (tujuan keadilan sosial jangka panjang). Agar pemberdayaan dana publik ini berjalan dengan baik, diperlukan aturan hukum/kebijakan negara.



Adapun kaitan wakaf tunai dengan konsep filantropi perusahaan (CSR/tanggung jawab sosial dan lingkungan), yaitu adanya keharusan atau kewajiban perusahaan untuk melakukan filantropi pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan berada. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Karena adanya kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka terdapat unsur terus-menerus (kontinuitas) pada filantropi perusahaan sehingga memungkinkan adanya anggaran/dana tetap untuk kegiatan tersebut. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1, 2), bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran untuk lebih berdaya guna. Diasumsikan agar anggaran dari biaya perseroan dapat dijadikan sebagai wakaf tunai dan

membuka divisi tersendiri (khusus wakaf) di perseroan yang bersangkutan.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak dapat dilakukan secara produktif baik dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Melihat perkembangan pada salah satu bentuk badan usaha (*business organization*) yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah perseroan terbatas (PT), karena perseroan diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Maka kegiatan bisnis perseroan ini cocok dengan urgensi daripada wakaf tunai yang harus tetap pokok modalnya bahkan harus terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebagai suatu amal sosial yang terus-menerus (*shadaqah jariah*). Dan adanya persamaan wakaf dengan perseroan, yaitu harta benda wakaf bergerak dan perseroan sama-sama terpisah dengan harta kekayaan pribadi masing-masing.

Asumsi tesis ini penting karena ia merupakan pengembangan bentuk pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk badan hukum bisnis murni berupa perseroan terbatas. Dalam undang-undang wakaf, badan hukum yang berwenang



mengelola wakaf tunai disebutkan bank *syariah* sebagai lembaga keuangan *syariah* (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum, tapi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa perseroan diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai manusia. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Disebut "*artificial person*" atau manusia buatan, atau "*person in law*" atau "*legal person/rechtspersoon*".

Hal ini tidak lain agar memudahkan menunjuk siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab di antara sedemikian banyak orang yang terhimpun dalam badan tersebut, yaitu secara yuridis mengkonstruksikannya cukup dengan menunjuk "badan" itu sebagai hukum yang bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan ini diasumsikan bahwa perseroan sebagai badan yang bertanggung jawab, maka dapat dikatakan perseroan terbatas sebagai nadhir wakaf tunai. Ia sebagai pengelola dan pengembang dana wakaf tunai, yaitu yang berasal dari dana filantropi perusahaan (*corporate social responsibility*) yang dijadikan sebagai wakaf tunai perseroan terbatas.

Saya menyambut baik penerbitan buku saudara Ulya Kencana yang berjudul: "Pengelolaan Wakaf Tunai (*Cash Waqf*): Kajian Konsep Filantropi Islam yang Diwujudkan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas", yang berasal dari penelitian tesis pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Sriwijaya. Buku ini membahas perkembangan baru dalam pengelolaan wakaf tunai dalam kerangka pembangunan ekonomi di Indonesia. Buku ini dapat dijadikan sumber bacaan bagi mahasiswa, akademisi, dalam praktik hukum ekonomi Islam maupun ekonomi Indonesia. Demikian agar buku ini bermanfaat.

Guru Besar Hukum Ekonomi &  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

dto

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

**KATA PENGANTAR**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**

Keberadaan wakaf berasal dari ajaran Islam yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw, hingga sekarang hampir di seluruh belahan dunia Islam termasuk Indonesia. Di Indonesia ajaran wakaf ini telah dilegalisasikan dalam perundang-undangan sehingga secara umum dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf mengakibatkan ketentuan-ketentuannya menjadi hukum positif yang bersifat mengikat. Karena pengaturannya tidak lagi bersebaran di dalam berbagai doktrin kitab-kitab *fiqh* (*madzhab*) yang sering mengandung *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) juga adanya unsur ketidakpastian disebabkan tata cara dan pengadministrasiannya secara publik tidak diatur dengan jelas.

Ajaran wakaf telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak kedatangan Islam pertama kali ke Indonesia. Kelembagaan serupa wakaf telah ada sebelum Islam tersebar di nusantara dan mulai menonjol pada abad ke-19, ditandai adanya perkembangan madrasah dan pesantren terutama di Pulau Sumatera dan Jawa.

Terdapat perdebatan para *fugaha* mengenai unsur 'keabadian' wujud uang setelah diwakafkan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman terhadap petunjuk Rasul saw



terhadap Umar bin Khathab r.a.: “*Tahanlah pohonnya (pokoknya) dan sedekahkan buahnya (hasil/keuntungannya).*” Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai implikasi untuk menahan pokok wakaf tunai agar tidak lenyap wujudnya sehingga keuntungan pokoknya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, dan lain sebagainya.

Buku yang berasal dari penelitian dan penulisan tesis ini mencoba berasumsi untuk menahan pokok uang tunai agar hasil pengelolaan/untung uang tunai tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan permintaan yang tertera pada akta ikrar wakaf ketika wakaf uang tunai tersebut dibuat. Dalam hal ini diasumsikan badan hukum pengelolanya adalah perusahaan perseroan terbatas sebagai nadhir yang mengelola wakaf uang tunai tersebut.

Ulya Kencana, sebagai penulis muda telah menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum dalam Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada bulan Desember 2009, dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang bersangkutan adalah dosen tetap Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, mengajar mata kuliah profesi Filsafat Hukum Islam, Hukum Bisnis, Pengantar Bisnis Islam, dan Hukum Perikatan Islam.

Diharapkan buku ini dapat memperkaya literatur tentang hukum perwakafan di Indonesia, karena dikaji dari aspek hukum Islam dan hukum bisnis Indonesia, dan dapat

dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang studi pada mata kuliah Zakat dan Wakaf, peneliti dan praktisi lembaga keagamaan lainnya.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,

dto

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag.



## DAFTAR ISI BUKU

Judul .....	i
Prakata Penulis .....	iii
Kata Persembahan dari Penulis .....	ix
Kata Pengantar dari Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .....	x
Kata Pengantar dari Guru Besar Hukum Ekonomi dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .....	xiii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang .....	xviii
Daftar Isi Buku .....	xxi
I. Pengembangan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia .....	1
A. Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum .....	1
B. Filsafat Hukum Wakaf Tunai .....	20
C. Istilah Hukum .....	42

II. Wakaf Tunai dan Perusahaan Perseroan Terbatas	
Ide Revitalisasi Hukum Perdata Indonesia .....	48
A. Wakaf Tunai Wujud Kepedulian (Filantropi Islam) terhadap Sesama .....	48
B. Perkembangan Wakaf Tunai Dalam Sejarah Hukum .....	74
C. Pendapat Pakar Hukum Tentang Wakaf Tunai ( <i>Cash Waqf</i> ) .....	86
D. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia .....	94
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	96
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	107
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang .	114
III. Pengembangan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Filantropi .....	120
A. Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum .....	120
1. Hukum Islam .....	120
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	130
B. Filantropi Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> /Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) .....	140

C. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Corporate Governance</i> )	145
D. Perseroan Terbatas Sebagai Nadhir Badan Hukum Wakaf Tunai .....	154
IV. Konsep dan Pendapat Hukum Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas .....	166
A. Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia .....	166
B. Keberadaan Perusahaan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata Indonesia .....	175
C. Keberadaan Perusahaan Perseroan Terbatas ( <i>Syirkah</i> ) Menurut Hukum Islam .....	182
D. Bentuk Pengelolaan Wakaf Tunai yang Tepat dan Berguna di Indonesia .....	192
1. Wakaf Tunai Sebagai Modal/Saham untuk Mendirikan Perseroan Terbatas ..	205
2. Wakaf Tunai Dibelikan Saham Pada Perseroan Terbatas Tertentu .....	214
3. Saham Wakaf Tunai Sebagai Agunan/ Jaminan .....	232
V. Kedudukan Hukum Pengelola Wakaf Tunai (Nadhir) Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas ..	238
A. Kedudukan Nadhir Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Wakaf Tunai .....	238
B. Nadhir Mendirikan Perusahaan Perseroan Terbatas yang Modal/Sahamnya Berasal dari Wakaf Tunai .....	252

C. Pengelolaan Wakaf Tunai oleh Nadhir yang Diangkat oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Itu Sendiri .....	258
D. Nadhir Menjadi Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas .....	265
VI. Filantropi dan CSR Dalam Ranah Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas .....	272
A. Filantropi (Kedermawanan) Dalam Islam ..	272
B. Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Wujud Filantropi (Kedermawanan) Islam .....	288
C. Filantropi Perusahaan ( <i>Corporate Social         Responsibility</i> ) Berkaitan dengan Filantropi Dalam Islam .....	292
D. Penelitian Terhadap Aktivitas dan Penerapan CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Palembang .....	300
E. Pengelolaan CSR yang Dijadikan Wakaf Tunai Perseroan Terbatas Dilakukan Oleh Nadhir yang Diangkat Oleh Perseroan Terbatas Bersangkutan .....	316
1. Pembentukan Divisi Wakaf Tunai Dalam Perseroan Terbatas .....	324
2. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dikelola Divisi Wakaf Tunai Perseroan Terbatas .....	327



3. Pertanggungjawaban Divisi Wakaf Tunai Perseroan Terbatas .....	333
F. Pengembangan Hukum Wakaf Tunai Dikelola Badan Usaha Bisnis Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Ranah Hukum Perdata Indonesia .....	337
Daftar Pustaka .....	364

# I

## PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA

### A. Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum

Di Indonesia berlaku pluralisme hukum perdata, yaitu berlakunya hukum adat yang ada sejak dahulu, hukum Islam yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, Cina, dan Arab, dan hukum Barat yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Islam, juga hukum adat, dan hukum Barat. Maka, hukum Islam yang berlaku bagi para pemeluk Islam (muslim), sumber hukumnya berasal dari *nash* (Al-Qur'an dan *Al-Hadits*). Khusus untuk melaksanakan ajaran Islam yang berdimensi sosial ekonomi (muamalah) memerlukan pemahaman dan penelitian lebih lanjut, karena aspek muamalah lebih bersifat dinamis dan lentur dalam pengembangan dan penerapan hukumnya ketimbang ajaran Islam yang berdimensi ibadah, karena sudah ajek (tetap).

Dalam tataran muamalah, hukum Islam lebih bersifat terbuka terhadap hukum-hukum lainnya. Inilah yang menjadikan hukum Islam itu *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi alam semesta), karena berpijak pada prinsip, di antaranya: "pokok hukum dalam segala perkara ialah boleh, bukan haram. Karenanya, janganlah diharamkan melainkan ada *nash* yang mengharamkannya".<sup>1</sup> Bila membawa kepada kebaikan

---

<sup>1</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1988, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 77

publik dan sesuai dengan syariat maka dapat dilakukan, dan bila hanya membawa kerusakan maka seyogianyalah dihindari atau tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu, upaya penerapan hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat dapat pula menggunakan teori-teori yang sudah berkembang, seperti teori transplantasi hukum. Hal ini diperlukan dalam upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia, sehingga aturan dalam *nash* dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tempat dan zaman dan menjadikan bahwa Islam merupakan hukum yang telah sempurna menjadi sebuah keniscayaan.

Salah satu dari ajaran Islam untuk melakukan kebajikan (filantropi) terhadap sesama anggota masyarakat dalam bentuk harta, adalah memberikan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyebutnya sebagai *al-habs* sinonim dari kata *al-waqaf*, yaitu harta benda milik person yang diberikan untuk publik agar dapat dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Maka, esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang dalam ajaran Islam sebagai amal jariyah (terus-menerus) dan termasuk sebagai salah satu dari sedekah jariyah (filantropi Islam yang sifatnya abadi).

Istilah wakaf secara umum dan wakaf tunai secara khusus masuk dalam tataran pemikiran hukum Islam yang berdimensi sosial ekonomi (muamalah). Ajaran wakaf yang telah lama dikenal di tengah kehidupan masyarakat dan telah dilakukan oleh sebagian orang sejak kedatangan Islam pertama kalinya di Indonesia, dan dalam perkembangannya kemudian



hukum Islam telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari hukum perdata Indonesia (hukum positif). Hal ini berlaku pula halnya dengan perkembangan wakaf nonproduktif ke arah wakaf produktif.

Di Indonesia, agama Islam dianut oleh 90% oleh penduduknya sehingga menjadikan kedudukan hukum Islam amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya,<sup>2</sup> maka hukum Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakatnya mengenai hukum dan keadilan. Seiring dengan kemajuan zaman praktik hukum Islam semakin berkembang, meningkat, dan meluas ke berbagai sektor hukum, tidak hanya di sektor hukum kekeluargaan (*ahwalus syahsiyah*) seperti perkawinan dan kewarisan, tapi juga ke sektor hukum lainnya seperti hukum hibah, wasiat, *shodaqah*, zakat, dan bahkan sampai ke sektor hukum perbankan.<sup>3</sup> Termasuk juga sektor hukum wakaf.

Perwakafan asalnya semata-mata dari hukum Islam, tidak dari hukum lain. Ia merupakan khasanah hukum Islam yang erat kaitannya dengan kehidupan Islam. Baik hukum Barat maupun hukum adat, tidak mengenal adanya lembaga wakaf (tanah).<sup>4</sup> Di lingkungan masyarakat yang tidak beragama Islam, lembaga wakaf tidak dikenal. Yang berkembang selama ini adalah wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, masjid,

<sup>2</sup> Yahya S. Praja, 1991, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (Pengantar)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. vii

<sup>3</sup> Taufiq Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tata Nusa, Jakarta, hal. 34

<sup>4</sup> Taufiq Hamami, *ibid.*, hal. 35



madrasah, dan pekuburan, sedangkan wakaf benda bergerak di antaranya berupa uang di awal perkembangannya tidak dikenal. Filantropi (kedermawanan) Islam berupa uang hanya dalam bentuk infak, *sedekah*, dan zakat, sedang dalam bentuk wakaf tunai belum begitu dikenal dalam kehidupan masyarakat.

Adanya kegiatan wakaf seiring dengan perkembangan dakwah Islam di nusantara dan ajaran wakaf ini terus berkembang pada masa dakwah prakolonial, masa kolonial, maupun pascakolonial (Indonesia merdeka).<sup>5</sup> Keberadaan wakaf yang hidup di tengah-tengah masyarakat sejak awal masuknya Islam di Indonesia tidak lepas dari adagium "*ubi ius ubi societas*", yang menggambarkan bahwa di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Antara hukum dan masyarakat tidak akan terpisahkan, hukum hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum baru hidup apabila masyarakat yang bersangkutan menjalankannya.<sup>6</sup> Wakaf tanah (benda tidak bergerak) dan wakaf tunai (benda bergerak) merupakan ibadah sosial yang amat bermanfaat bagi masyarakat. Kelembagaannya begitu kuat dalam hukum Islam dan telah ditransformasikan ke dalam sistem tata hukum di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kedudukan wakaf sebagai salah satu ajaran agama Islam untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia.

<sup>5</sup> Tholhah Hasan, 14 Maret 2008, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, <http://bw.indonesia.net/index>, diakses 25 Nopember 2008

<sup>6</sup> Joni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Edisi ke-1, Cet. ke-1, PT Prenhalindo, Jakarta, hal. 2

Adagium di atas menunjukkan keberadaan wakaf yang meski hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta kekayaan dan keimanan kepada Allah Swt dan ketaatan pada Rasul-Nya, namun manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Kebanyakan wakaf-wakaf tersebut berupa harta benda tidak bergerak dan tetap, maka wujud bendanya dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya. Misal wakaf masjid, maka wujudnya ada dan manfaatnya dapat digunakan oleh umat Islam untuk melakukan ibadah ritual maupun kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Bentuk wakaf pertama yang dilakukan, telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam Indonesia adalah wakaf tanah. Dalam tataran hukum positif Indonesia, telah diakui dan diatur dalam berbagai macam peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Lembaran Negara 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Keputusan: 19/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan perundang-undangan lain.

Melihat keberadaan wakaf yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu, asetnya bersifat abadi, manfaatnya untuk kepentingan publik, dan dalam ranah hukum perdata Indonesia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang berawal dari wakaf benda tidak bergerak berkembang menjadi konsep wakaf benda bergerak. Pengklasifikasian harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak meliputi:
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Benda bergerak meliputi:
  - a. uang,
  - b. logam mulia,



- c. surat berharga,
- d. kendaraan,
- e. hak atas kekayaan intelektual,
- f. hak sewa, dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Harta benda wakaf berupa jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan zaman dan tempat sehingga esensi wakaf yang tetap aset/pokok modanya, dan abadi (*perpetual*) manfaatnya untuk publik dapat bertahan lama, dan tujuan filosofis dari wakaf sebagai *shadakah jariah* (terus-menerus/abadi) dapat diwujudkan.

Cara pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak berupa masjid, sekolah Islam/pesantren/madrasah, areal pekuburan, dan sebagainya memerlukan dana berupa uang sebagai alat pembayaran dalam perekonomian modern, juga menggunakan logam mulia, surat berharga, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan terhadap harta benda, wakaf bergerak berupa uang, yang lebih banyak dikenal dengan istilah wakaf uang diperlukan bentuk pengelolaan yang lebih tepat dalam bentuk bisnis, seperti misalnya wakaf uang (tunai) dikembangkan menjadi modal/saham untuk mendirikan perusahaan perseroan terbatas, membeli saham perseroan terbatas, dan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16



sebagainya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Wakaf yang menyebutkan, saham sebagai salah satu bentuk wujud wakaf benda bergerak selain uang yang termasuk dalam kategori surat berharga.

Berkaitan dengan ini, istilah yang dipakai lebih cenderung menggunakan kata wakaf tunai untuk terjemahan dari *cash waqf* (*waqf al-nuquud*) ketimbang wakaf uang dikarenakan pengertian uang lebih luas untuk surat-surat berharga seperti saham, cek dan sebagainya, sedangkan tunai pengertiannya lebih sempit hanya untuk uang saja. Istilah *cash waqf* ini identik/diterjemahkan dengan wakaf tunai yang objeknya adalah uang. Uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lalu yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; harta, kekayaan.<sup>8</sup>

Transformasi hukum Islam (wakaf tunai) ke dalam hukum nasional, secara khusus dapat diketahui dari ketetapannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf Uang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Menurut Yahya Harahap HM, secara umum dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf di atas mengakibatkan ketentuan-ketentuannya menjadi hukum positif yang bersifat *univied legal frame wark* dan *univied legal opinion*.<sup>9</sup> Pengaturannya tidak lagi berserakan di dalam berbagai

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-3, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1232

<sup>9</sup> Yahya Harahap HM, Nomor 7 Tahun III, Al-Hikmah, Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional, Mimbar Hukum, Jakarta, hal. 18

doktrin kitab-kitab *fiqh* (*madzhab*), yang sering mengandung *ikhtilaf*, dan membawa ketidakpastian disebabkan tata cara dan administrasi secara publik tidak diatur.<sup>10</sup>

Adanya peraturan khusus mengenai wakaf tunai berarti telah memberikan kekuatan hukum tetap (*legal standing*) terhadap perkembangan wakaf tunai di Indonesia, di mana di negara-negara Islam lainnya (Bangladesh, Turki, Yaman, dan sebagainya) telah lebih dulu mengembangkan konsep wakaf tunai ke dalam bentuk *real estate*, hotel, pertokoan, dan sebagainya. Karena terdapat potensi yang begitu besar dan telah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw sehingga dapat menopang dan memajukan peradaban Islam pada masa kejayaannya dan masih dapat tetap disaksikan keberadaannya hingga sampai kini.

Tidak berlebihan bila sekiranya konsep wakaf tunai dapat diberdayakan, dikaji ulang dan dikembangkan lebih luas dan mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu ujung tombak perekonomian publik. Dalam hal ini, Departemen Agama (pemerintah) perlu mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga menimbulkan dampak yang positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Dan juga terus berupaya agar pengelolaan wakaf mempunyai legalitas yang kuat, sehingga perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi serta garis kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Taufiq Hamami, op cit., hal. 37

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Edisi ke-2, Cet. ke-2, Jakarta, hal. iii

Berdasarkan keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dasar hukum (*argumen*) yang berasal dari Al-Qur'an mengenai wakaf uang (*waqf an-nuquud*) di antaranya adalah:

1. Berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Al-Hajj: 77).
2. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Ali Imran: 92).
3. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 261).<sup>12</sup>

Dasar hukum yang berasal dari hadis Rasulullah saw dicantumkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dijelaskan dalam kitab *Bulughul Al-Maram* (kitab fikih berdasarkan hadis) dalam Bab Wakaf, bahwa, "Dari Abu Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya,

<sup>12</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1993, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Intermedia, Jakarta



*kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.*" (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Menurut pakar hukum Islam (fukaha), Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani, *shadaqah jariyah* dimaksudkan hadis di atas oleh para ulama ditafsirkan dengan wakaf karena dikemukakan di dalam bab wakaf.<sup>14</sup> Senada dengan hal tersebut menurut Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, *sedekah jariyah* dikenal dengan nama "*waqaf*."<sup>15</sup>

Terdapat hadis yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya berwakaf, yaitu perintah Nabi saw kepada Umar bin Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar:

*"Dari Ibnu Umar r.a. berkata; bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan barta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dibibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah*

<sup>13</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar As-Qalani, 1965, *Bulughul Al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hal. 187

<sup>14</sup> Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, dan Ash-Shan'ani Al-Ma'ruf, t.t., *Subul Al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, hal. 187

<sup>15</sup> Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarak, 1993, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, Jilid ke-5, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2003



*wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.*" (HR. Muslim).<sup>16</sup>

Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, mengatakan bahwa Ibnu Hajar dalam kitab *Fathu Al-Baari* berkata bahwa hadis Ibnu Umar ini adalah asal mula disyariatkan *waqaf*.<sup>17</sup> Wakaf yang dimaksudkan adalah wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang menghasilkan seperti tanah perkebunan atau tanah pertanian. Oleh karena itu, awal perkembangan wakaf di Indonesia lebih dikenal dan berkembang adalah wakaf tanah yang dapat ditanami dengan padi, pohon, dan palawija, didirikan masjid atau madrasah, dan dijadikan tanah pekuburan.

Bentuk lain dari wakaf dalam hadis riwayat lain lebih tegas menganjurkan Wakaf berbentuk uang, yaitu:

*"Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. pernah berkata kepada Nabi Shalallahu'alaihi Wassalam: Bahwa seratus bagian (saham) yang menjadi milikku di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkannya (mewaqafkannya). Kemudian Nabi Salallahu'alaihi Wassalam menjawab, "Tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) (Hadis riwayat Nasai)."*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, Ash-Shan'ani, op cit., hal. 2001

<sup>17</sup> Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarak, op cit., hal. 2006

<sup>18</sup> Syekh Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, loc cit

Oleh Ibnu Taimiyah, hadis ini dijadikan dalil atas sahnya mewakafkan harta *syirkah* (perseroan).<sup>19</sup>

Tidak adanya kejelasan hukum mengenai bagaimana aspek pengelolaan harta benda wakaf, jenis wakaf, syarat wakaf, peruntukan wakaf, dan lain-lain yang dapat dilihat dari dasar sumber hukum (*mabdaul ahkam*) yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis di atas yang tampak tidak terlalu banyak dan tegas menetapkan hukum wakaf. Sehingga wilayah kajian hukum wakaf ini diletakkan pada ranah ijtihad (penggalian hukum) yang beraspek sangat luas, bukan ibadah sosial semata sebagaimana wilayah kajian hukum zakat yang secara tekstual telah ditetapkan secara pasti. Dengan demikian, aspek hukum wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Kaitannya sebagai suatu kebaikan sosial yang bernuansa ketuhanan, wakaf dapat dikategorikan sebagai filantropi terhadap sesama manusia. Konsep filantropi merupakan bentuk kecintaan yang umumnya diwujudkan oleh manusia kaya yang membantu manusia lain yang miskin atau yang kekurangan. Welhendri menyatakan tujuan umum filantropi, ialah mengelola dan memanfaatkan dana-dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, artinya bahwa kehidupan manusia menjadi baik apabila telah terwujud kesejahteraannya dan keadilan sosial.<sup>20</sup> Untuk itu, wakaf tunai sebagai filantropi Islam perlu dikelola dan menghasilkan

<sup>19</sup> Syekh Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, loc cit

<sup>20</sup> Welhendri, 1993, Teologi Filantropi, LPM, <http://www.kpmm.or.id/>, diakses 19 Juli 2008

Wakaf tunai berupa uang *cash* dapat dikembangkan keuntungannya sebagai bisnis murni mencari keuntungan. Uang yang dijadikan sebagai harta benda wakaf ini dikembangkan sebagai modal/saham pada perseroan, sehingga urgensi dari pada wakaf tunai yang aset/pokok modalnya tetap abadi dan hasil keuntungan dari pengelolaan saham/modal pada perseroan dapat diberikan kepada publik sesuai dengan peruntukannya secara terus-menerus.

Mengingat kemiskinan di Indonesia struktural sifatnya akibat berbagai kebijakan, ekspansi bisnis, dan tak acuhnya masyarakat, maka kemiskinan struktural tidak dapat dilakukan hanya dengan filantropi. Kemiskinan akibat kebijakan harus dibasmi dengan kebijakan pula.<sup>24</sup> Dalam kaitan ini, maka diperlukan kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur filantropi dalam Islam agar dapat berdaya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Menurut hukum Islam, perseroan disebut dengan istilah *syirkah*, boleh dikerjakan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan muamalah (ekonomi sosial) pada prinsipnya sepanjang tidak dilarang menurut *syara'* (Al-Qur'an dan *Al-Hadits*) maka dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Berlainan dengan hal yang berkaitan dengan ibadah apabila membuat suatu aturan hukum yang baru padahal tidak ada dalil yang menyuruh untuk melakukannya maka itu adalah *bid'ah* (mengada-ada).

Melihat perkembangan pada salah satu bentuk badan usaha (*business organization*) yang cukup banyak diminati

<sup>24</sup> Erie Sudewo, 20 Mei 2008, Rancangan Undang-Undang Zakat Kebijakan Filantropi, <http://www.era.muslim.net.>, diakses 25 Mei 2008



dalam praktik bisnis adalah perseroan terbatas (PT), karena perseroan diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya<sup>25</sup> karena untuk mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan (*authorized capital*). Selain itu, perseroan juga dapat masuk ke pasar modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal Modal Saham, adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.<sup>26</sup> Pada umumnya, penyetoran atas saham adalah dalam bentuk uang.

Kegiatan bisnis perseroan ini cocok dengan urgensi daripada wakaf tunai yang harus tetap pokok modalnya bahkan harus terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebagai suatu amal sosial yang terus-menerus (*sedekah jariah*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan, bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Perusahaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Cet. ke-1, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 13

<sup>26</sup> I.G. Rai Widjaya, 2003, Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Cet. ke-3, Editor Herman Sudrajat, Kesaint Blanc, Jakarta, hal. 193

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Ayat (1)



Persamaan wakaf dengan perseroan, yaitu harta benda wakaf dan perseroan sama-sama terpisah dengan harta kekayaan pribadi masing-masing. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>28</sup> Perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah sebagai perseroan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki.<sup>29</sup>

Perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa pada harta benda wakaf (tunai) modalnya untuk selamanya untuk kepentingan publik, tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwasiatkan. Sementara pada perseroan, saham yang dimiliki dapat dijual, dihibahkan, atau diwasiatkan kepada orang lain dan keuntungan yang diperoleh menjadi milik pribadi. Hal ini berbeda karena pada wakaf (tunai) esensinya merupakan perbuatan hukum seseorang yang berdimensi ketuhanan dan sosial, sementara pada perseroan adalah perbuatan hukum yang orientasinya adalah bisnis murni, untuk mencari keuntungan semata.

Kemudian perbedaan antara wakaf tunai dan perseroan dijembatani dengan menjadikan wakaf tunai sebagai modal atau saham untuk mendirikan perseroan, sehingga aset perseroan tersebut pemberlakuan hukumnya sama dengan aset wakaf, yaitu untuk kepentingan publik, tidak dapat dijual,

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tentang Wakaf, op cit., Pasal 1 ayat (1)

<sup>29</sup> Joni Emirzon, op cit., hal. 88

dihibahkan, dan diwasiatkan. Hal ini saling berhubungan dalam rangka sebagai salah satu pola pengembangan pengelolaan wakaf tunai yang juga merupakan kolaborasi antara dimensi ibadah sosial dengan bisnis murni. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi publik. Karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan,<sup>30</sup> dan strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf dengan menggunakan konsep *corporate governance* (tata kelola perusahaan).

Pengelolaan wakaf tunai diserahkan kepada nadhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.<sup>31</sup> Dalam kurun lima tahun terakhir, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (wakaf tunai) dilaksanakan sesuai dengan prinsip *syariah* (Pasal 43 ayat 1), dilakukan secara produktif (Pasal 43 ayat 2), dan diperlukan penjamin, yaitu digunakan Lembaga Penjamin Syariah (Pasal 43 ayat 3).

Lembaga Penjamin Syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf, op cit., hal. 38

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 7-8 Januari 2002, Bank Syari'ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Wisma Haji, Batam, tidak diterbitkan, hal. 4

Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri (Undang-Undang Wakaf Pasal 28). Yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Masalah kefakiran atau kemiskinan akibat krisis moneter pada tahun 1998 yang terus berlanjut hingga sekarang melanda Indonesia dengan sebutan *negeri seribu bencana* dapat diubah dan diupayakan menjadi negeri seribu damai, yaitu dengan cara penanggulangannya melalui sektor ekonomi-hukum dengan memberdayakan ekonomi publik (umat) lewat wakaf benda bergerak (wakaf tunai) yang potensi lebih dari zakat, bahkan lebih daripada wakaf benda tidak bergerak itu sendiri (wakaf tanah). Dalam tataran hukum perdata Indonesia, wakaf tunai diberdayakan melalui skim syariah pada Lembaga Penjamin Syariah (LPS) yang pengelolaannya diserahkan pada bank *syariah* yang ditunjuk pemerintah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu lembaga keuangan yang bergerak di bidang *syariah*.

Hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai (*cash waqf*) sebagai salah satu bentuk dari filantopi (kedermawanan) Islam terhadap sesama dapat diwujudkan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas. Hal-hal yang berkaitan dengan berbagai macam kekhawatiran terhadap wakaf tunai yang akan dikembangkan sebagai modal, untuk dijadikan dan dibeli saham perseroan terbatas bila perseroan terjadi pailit/bangkrut. Sesungguhnya kekhawatiran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf dan undang-undang perseroan terbatas secara tidak langsung.



Asumsi ini penting karena merupakan pengembangan bentuk pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk badan hukum bisnis murni berupa perseroan terbatas yang dalam undang-undang wakaf, bahwa badan hukum yang berwenang mengelola wakaf tunai yang disebutkan hanya bank *syariah* sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Diharapkan penelitian dan pembahasan ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pemikiran hukum, dan menambah khazanah pemikiran hukum-hukum bisnis dan hukum Islam mengenai masalah wakaf tunai/uang yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, sehingga dapat memberi manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara, dan lebih sangat bermanfaat bila asumsi ini dapat segera diwujudkan dan dipraktikkan oleh masyarakat dengan didukung oleh peraturan-peraturan baru pendukung lainnya. Dan apabila terdapat pemikiran hukum dari sisi lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat dilanjutkan dan diteliti oleh berbagai pihak yang terkait lainnya.

## **B. Filsafat Hukum Wakaf Tunai**

Patokan untuk berperilaku pantas kadang kala timbul dari pola perilaku manusia yang ajek, dikenal dengan sebutan norma (kaidah) dan dapat juga timbul dari pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, yang lazim disebut sebagai nilai. Aturan hukum yang ada dalam Al-Qur'an yang berlaku di Indonesia sebagian masih berupa nilai, sebagian sudah menjadi asas hukum dan beberapa bagian

telah diberlakukan sebagai norma (peraturan hukum).

Kaitannya sebagai agama yang telah sempurna sebagai hukum maka diperlukan berbagai upaya agar hukum Islam mempunyai kedudukan hukum (legalitas) yang tetap dalam tataran hukum positif di Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam memerlukan patokan yang ajek untuk menata kehidupan publik dalam beragama dan bernegara sesuai dengan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Norma atau kaidah hukum Islam dapat digunakan sebagai acuan untuk:

1. Mengatur diri pribadi manusia, khusus mengenai bidang kepercayaan (bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman) dan kesusilaan (bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih).
2. Mengatur kehidupan antarpribadi manusia, khusus mengenai bidang kesopanan (bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain) dan hukum (bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama. Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan, yang mana menjadi tujuan dari hukum. Sehingga tugas hukum adalah tidak

lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum).<sup>32</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka berpikir seperti di atas dapat juga digunakan sebagai titik tolak untuk membicarakan masalah penegakan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Lima faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum tersebut yang juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum, yaitu:<sup>33</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan hal penegakan hukum Islam di Indonesia dari segi faktor hukumnya, maka Islam sebagai hukum telah sempurna aturan pokoknya. Akan tetapi, pemberlakuannya dari segi faktor penegak hukum, sarana pendukung, lingkungan, dan kebudayaan perlu dikembangkan

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *op cit.*, hal. 8



dan ditata ulang (*revitalisasi*) agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat namun tetap mengacu pada ketentuan *nash*. Penegakan hukum yang telah ditetapkan dalam ranah hukum Islam sekarang, yaitu wakaf tunai dapat ditinjau dari berbagai aspek dan macam bentuk pengelolaannya, maka kelima faktor tersebut di atas dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum wakaf tunai di Indonesia. Dalam menegakkan hukum, harus mengacu pada konsep-konsep dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang tadinya merupakan *ius constituendum* harus dibumikan menjadi *ius constitutum* dan dilaksanakan dengan konsekuen oleh penegak hukum.<sup>34</sup>

Wakaf tunai adalah bentuk pemberian harta milik pribadi untuk kepentingan publik bersifat abadi (terus-menerus). Ini adalah bentuk keadilan yaitu pemerataan harta kekayaan sekaligus memberikan kemanfaatan sosial dan aspek kepastian hukumnya dari aspek hukum Islam merupakan sebuah perbuatan sosial (filantropi) yang sangat dianjurkan dan bernilai tinggi di hadapan Allah Swt dan dalam ranah hukum perdata Indonesia telah menjadi kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, diharapkan efektivitas penegakan hukum wakaf tunai di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta perangkat peraturan lainnya.

Untuk itu, diperlukan juga politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam oleh publik, digambarkan

<sup>34</sup>Abu Daud Busroh, 2005, *Kapankah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Dikikis oleh Penyelenggara Negara Republik Indonesia, dalam Derap Langkah Menabur Keadilan; Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Jilid ke-1, Cet. ke-1*, Sinar Grafika, Palembang, hal. 397

oleh Ismail Sunny menjadi dua periode:<sup>35</sup>

1. *Periode Persuasive Source*, di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam.
2. *Periode Authority Source*, di mana setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.

Wakaf yang merupakan ajaran agama Islam sudah melewati tahapan sebagai nilai, asas hukum dan norma hukum telah dilakukan sejak pertama kali kedatangannya di Indonesia. Hal ini dikarenakan secara *persuasive source* dan *authority source*, secara umum wakaf dianggap mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan publik. Wakaf tunai diharapkan demikian pula karena jenis wakaf ini masih baru dalam ranah pemikiran hukum Islam di Indonesia meski di negara-negara Islam lainnya sudah lama diberlakukan.

Aspirasi tentang formalisasi hukum Islam di Indonesia kebanyakan terjadi juga di negara-negara Islam lainnya, terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang menginginkan hukum Islam dilaksanakan secara formal, seperti hukum positif lainnya.
2. Kelompok yang menolak formalisasi hukum Islam.

<sup>35</sup> Ismail Sunny, 1997, Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid ke-1, Ulul Albab Press, Bandung, hal. 40-43

3. Kelompok yang mengambil jalan tengah, yaitu menginginkan formalisasi hukum Islam untuk hukum-hukum privat. Sedangkan selain itu, seperti hukum publik, cukup dijadikan sebagai bahan pengembangan hukum nasional. Kelompok ketiga ini pun, dalam hal pelaksanaan hukum Islam, mengkristal menjadi tiga bentuk, yaitu:
  - a. Penerapan hukum Islam secara formal;
  - b. Penerapan hukum Islam secara substantif, yakni substansinya saja yang diterapkan sekalipun namanya tidak persis sama dengan yang ada dalam istilah hukum Islam;
  - c. Penerapan hukum Islam secara esensial, sekalipun secara formal atau substansinya berbeda dengan aturan hukum Islam.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, wakaf tunai secara langsung dan tidak langsung telah dilaksanakan sebagaimana dalam kelompok pertama dan ketiga di atas.

Tulisan yang berkaitan dengan wakaf telah dilakukan oleh banyak penulis dan peneliti hukum Islam, di antaranya Duski Ibrahim dalam bukunya, *Metode Penerapan Hukum Islam*, membahas wakaf uang dalam relevansi dan implementasi metode *Al-Istiqra' Al-Ma'nawi* menurut Asy-

<sup>36</sup> Masykuri Abdillah, 2004, *Demokrasi yang Religius: Membincang Kembali Konsep Demokrasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Fiqh Siyasah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 37-38



Syatibi'. Menurutnya, penerapan hukum Islam di Indonesia yang penduduknya memeluk agama yang berbeda, pada dasarnya dapat dilakukan secara substantif atau esensial, sekalipun secara formal dapat dilakukan, bila kondisi signifikan masyarakat Indonesia memang memberikan dukungan yang utuh, bukan semu apalagi pemaksaan, serta tidak dibedakan apakah hukum privat atau hukum publik maupun tidak.<sup>37</sup> Berdasarkan argumen ini, dapat dikatakan bahwa penerapan wakaf tunai di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini dapat diterapkan, mengingat hal ini merupakan sebuah bentuk filantropi untuk sesama manusia yang merupakan nilai agama yang telah dipraktikkan sejak dulu.

Saudin, mengkaji bagaimana pengelolaan harta benda wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan dapatkah lembaga wakaf (*nadhir*) melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada upaya mencari keuntungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>38</sup> Penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan wakaf tunai ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana wakaf tunai dikelola dan diinvestasikan pada instrumen keuangan *syariah*.

Telah ada wacana yang menyebutkan untuk mengelola wakaf tunai/uang dalam bentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, mengingat ada perbedaan pendapat mengenai pemberlakuan hukum perseroan dalam ranah hukum Islam,

<sup>37</sup> Duski Ibrahim, 2008, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep *Al-Istiqlal* *Al-Ma'nawi* *Asy-Syatibi*, Cet. ke-1, Ar-Ruzzmedia, Yogyakarta, hal. 240

<sup>38</sup> Saudin, Juni 2008, Aspek Hukum Pengelolaan Wakaf, Tesis pada Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum, BKU. Hukum Bisnis, Universitas Sriwijaya, Palembang

di mana ada yang berpendapat perseroan adalah haram, tidak boleh dilakukan (Yusuf Al-Qardhawi), dan ada yang membolehkan. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana wakaf tunai dikelola secara bisnis murni yang berbentuk badan hukum bisnis, yaitu perusahaan perseroan terbatas.

Dapat saja wakaf tunai dikelola ke dalam bentuk badan usaha badan hukum selain perseroan terbatas seperti CV, firma, yayasan, koperasi dan lain-lain. Berdasarkan pada norma hukum Indonesia tertera pada:

- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya".
- b. Pasal 28 yang menyatakan bahwa: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
- c. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa; "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

ayat (2) menyatakan, bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>39</sup> Menjamin,

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28, 29

bersifat *imperatif*, artinya negara secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>40</sup>

Wakaf tunai merupakan ajaran agama Islam yang telah lama dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu amal jariah (terus-menerus) yang diperuntukkan untuk kepentingan publik, bangsa, dan negara. Seyogianyalah negara dalam hal ini mendukung sepenuhnya upaya pengembangan hukum wakaf tunai dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk perseroan terbatas, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*legal standing*) dan dapat diterapkan utuh tanpa adanya perbedaan pemikiran mengenai hal ini.

Berdasarkan pada dalil-dalil hukum, sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, *as-Sunnah*, *al-Ijtihad*, *al-Ijma'*, *al-Qiyas*, *Istihsan*, *Mashlahah al-Mursalah*, *'Urf*, dan *al-Istishbab*, *Sadduddzara'i*, *Mazhab* sahabat, syariat umat sebelum kita, dan *Dalalah Iqtiran*. Dalil-dalil tersebut dikaitkan dengan asumsi wakaf tunai dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas, untuk membeli saham pada perseroan terbatas tertentu, dana filantropi perusahaan (*corporate social responsibility*/tanggung jawab sosial dan lingkungan) dapat dijadikan sebagai wakaf tunai perseroan terbatas, dan/atau sebaliknya dana wakaf tunai dapat dijadikan sebagai dana *corporate social responsibility* suatu perseroan, serta meneliti

<sup>40</sup> Agustianto, 4 Februari 2008, Ekonomi Syariah Untuk Kepentingan Negara dan Bangsa, <http://www.agustianto>, diakses 7 Januari 2009



bagaimana kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan pada norma hukum Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam terbagi tiga, yaitu:

1. Hukum *I'tiqadiyah*, yaitu yang berhubungan dengan keimanan.
2. Hukum *Amaliah*, yaitu yang berhubungan dengan perbuatan/perkataan seorang *mukallaf*, dibagi dua:
  - a. Hukum *Ibadah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah Swt, seperti shalat, zakat, puasa, haji, nazar, dan sebagainya.
  - b. Hukum *Muamalah*, yaitu mengatur hubungan antarmanusia dengan secara individual, kelompok, dan antarindividu dalam kelompoknya. Adapun pengaturan mengenai muamalah dalam arti luas sekaligus dikomparasikan dengan hukum positif yang sebagian bersumber pada hukum Barat dan produk hukum Nasional.
3. Hukum *Khuluqiyah*, yaitu yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan akhlak baik dan buruk.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan: Sistem Hukum, Edisi ke-1, Cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Press, Jakarta, hal. 167

Hukum wakaf tunai ini termasuk dalam kedua bidang hukum, yaitu hukum *i'tiqadiyah* dan amaliah. *I'tiqadiyah*, bahwa wakaf tunai hanya dapat dilakukan oleh person atau masyarakat yang mempunyai keimanan (ketaatan) pada Allah Swt dan Rasul-Nya. Amaliah, bahwa wakaf tunai merupakan perbuatan mukalaf (orang dewasa) yang berdasarkan pada *nash* (Al-Qur'an, *Al-Hadits*) dan peraturan yang telah ada (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Uang, dan Fatwa Majelis Ulama tentang Wakaf Uang).

Dikaitkan dengan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikategorikan termasuk dalam hukum benda yang mengatur tentang benda pada umumnya, macam-macam benda, hak-hak kebendaan, dan hukum waris. Hal-hal yang termasuk benda menurut hukum, adalah segala sesuatu yang dapat dihaki, baik benda-benda yang terlihat (nyata) maupun benda-benda yang tidak dapat dilihat. Dalam hal wakaf tunai, ia merupakan benda yang hanya dapat dihaki pengelolaannya saja dan tidak dapat dimiliki secara mutlak atau menjadi milik pribadi. Wakaf tunai tidak sama dengan hibah, infak, atau zakat. Dari segi hukum benda ini, wakaf tunai termasuk dalam kategori uang yang dapat terlihat (diserahkan secara *cash*) maupun tidak dapat dilihat (ditransfer melalui bank).

Hukum membagi benda terdiri dari beberapa macam, namun yang terpenting adalah pembagian benda kepada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini penting karena masing-masing benda tersebut akan berakibat pula dalam hukumnya, terutama berkaitan dengan cara penyerahannya.

Berdasarkan pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soerjono Soekanto menjelaskan lebih rinci lagi mengenai macam hak kebendaan tersebut, yaitu:

1. Hak milik (*eigendom*), terdapat beberapa cara memperoleh hak milik, yaitu:
  - a. pendakuan (*toegening*);
  - b. ikutan (*natreking*);
  - c. kedaluwarsa (*verjaring*);
  - d. pewarisan;
  - e. penyerahan (*levering*). Tergantung kepada jenis benda, yaitu benda bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan benda bergerak tidak bertubuh dilakukan sesuai dengan jenis bendanya (piutang tanpa nama dan piutang atas nama).
2. Hak kedudukan berkuasa (*bezit*).
3. Hak kebendaan yang memberikan jaminan.<sup>42</sup>

Wakaf tunai menurut Undang-Undang Wakaf termasuk kategori benda bergerak dan menurut Undang-Undang Hukum Perdata termasuk ke dalam kategori penyerahan (*levering*). Wakaf tunai termasuk jenis benda bergerak yang berwujud tunai (uang) yang dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dari wakif kepada nadhir melalui akta ikrar wakaf. Namun, nadhir tidak berhak mutlak atas uang tunai ini, karena nadhir hanya sebagai pengelola wakaf

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2006, op cit., hal. 13



tunai yang diserahkan oleh wakif secara nyata kepadanya dan yang menjadi pemiliknya yang mutlak, adalah Allah Swt.

Wakaf tunai dikaitkan juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, yaitu; hukum perusahaan, persekutuan perdata, yayasan, firma, *commanditer vennotschap*, koperasi, dan perseroan terbatas.<sup>43</sup> Penelitian ini difokuskan pada wakaf tunai yang dikaitkan dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum yang mengelola dana wakaf tunai agar dapat dipertahankan asetnya (modal/saham) dan dikembangkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan secara berkesinambungan, terus-menerus, abadi. Peruntukan manfaatnya diberikan kepada publik bagi kepentingan keagamaan, perekonomian, kekeluargaan, dan lingkungan sesuai dengan kehendak wakif pada saat ikrar wakaf tunai yang dicantumkan pada akta ikrar wakaf.

Kaitan wakaf tunai dengan perseroan terbatas ini berhubungan erat dengan konsep filantropi perusahaan (*corporate social responsibility*/tanggung jawab sosial dan lingkungan), yaitu adanya keharusan atau kewajiban perusahaan untuk melakukan filantropi pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan berada. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) menyatakan, bahwa "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,

<sup>43</sup> Ade Maman Suherman, loc cit., hal. 167

maupun masyarakat pada umumnya”.

Kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) menyebabkan adanya unsur terus-menerus (kontinuitas) pada perseroan terbatas untuk melakukannya sehingga terdapat adanya anggaran/dana tetap untuk kegiatan tersebut. Disebutkan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>44</sup>

Menyikapi peraturan ini agar efektif dan dapat lebih berdaya guna, diasumsikan agar anggaran dari biaya perseroan dapat dijadikan sebagai wakaf tunai yang dikelola dalam perseroan terbatas itu sendiri dengan membuka divisi khusus wakaf.

Penelitian ini dikaitkan juga dengan disiplin ilmu-ilmu hukum, yaitu:

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1, 2)

- a. Ilmu-ilmu hukum *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*, termasuk ilmu kaidah dan ilmu pengertian (dogmatik hukum).
- b. Ilmu-ilmu hukum *tatsachenwissenschaft* atau *seinwissenschaft*, yang meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (ilmu kenyataan hukum).

Apeldoorn dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, menyebutkan pembagian menurut isi hukum dari sudut objektif dibagi dua yaitu; hukum publik dan hukum perdata. Hukum objektif mengatur pelbagai hubungan, pengaturan tersebut baik jika cocok dengan sifat hubungan yang diaturnya. Dalam artian peraturan harus sesuai dengan apa yang diaturnya. Isi peraturan hukum bergantung kepada hakikat hubungan yang diaturnya dan pengaturan hubungan, yaitu pengaturan kepentingan dari yang bersangkutan. Hubungan hukum, adalah kepentingan yang mendapat perlindungan. Kepentingan yang diatur oleh hukum tersebut dapat berupa:

- a. Kepentingan-kepentingan umum (publik)
- b. Kepentingan-kepentingan khusus (perdata)

Kepentingan yang berkaitan dengan wakaf tunai ini termasuk kepentingan umum yang mendapat perlindungan dari negara, karena peruntukan hasil dari aset pokok (wakaf tunai) manfaatnya diberikan untuk kepentingan publik, yaitu di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, lingkungan, dan sebagainya. Kepentingan wakaf tunai ini sekaligus mencakup juga perlindungan terhadap kepentingan khusus, yaitu perlindungan hukum/negara terhadap amal



jariah wakif yang berbentuk wakaf tunai yang dipercayakan pengelolaannya kepada nadhir agar tetap aset pokoknya (wakaf tunai), terus-menerus/abadi (*perpetual*) dan menghasilkan keuntungan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, nadhir dalam hal ini dapat perorangan, organisasi, dan badan hukum. Kedudukan nadhir yang teramat penting ini sebagai pengelola dan penjaga aset wakaf tunai, maka untuk itu sesuai dengan peraturan seyogianyalah nadhir meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Badan Wakaf Indonesia dan/atau badan lainnya yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan asumsi ini. Karena untuk sementara ini, belum ada nadhir badan hukum lain yang berhak mengelola dan menerima dana wakaf tunai selain dari lima buah bank syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Mega Syariah, dan Bank DKI Syariah.

Penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dilakukan oleh nadhir dapat dilakukan atau tidak, hal ini penting karena nadhir harus bertanggung jawab dalam menjaga agar aset wakaf tunai yang dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas, dibeli saham pada perseroan terbatas tertentu, dan dana filantropi perusahaan (CSR) dijadikan wakaf tunai perseroan terbatas agar tetap pokok asetnya dan/atau sebaliknya aset wakaf tunai dijadikan sebagai dana filantropi perusahaan dapat terus bertambah bahkan dapat dikembangkan dalam bentuk wakaf lainnya.

Mengingat saat ini perkembangan wakaf tunai di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain masih mandek dan terkesan berjalan di tempat, pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai dan aspek lainnya masih bersifat tradisional, aspek keterampilan nadhir mengelola aset/harta benda wakaf masih kurang memadai, dan potensi wakaf tunai yang begitu besar ini belum berdaya guna secara maksimal karena belum dikelola secara profesional menurut manajemen modern padahal wakaf tunai memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Berdasarkan pada landasan filosofis, secara umum wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat.<sup>45</sup> Wakaf adalah ajaran, konsep, dan teori mengenai perilaku manusia mengenai pemerataan ekonomi antara lapisan atas dan bawah masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan antara lapisan bawah dengan lapisan bawah dan pada tataran lapisan luar (publik). Hal ini dapat terjadi atas dasar pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam, kepercayaan terhadap konsep ekonomi Islam yang adil, proses hukum peralihan atau penguasaan wakaf yang transparan dan kedudukan hukum yang sudah pasti.

Dalam berbagai karya ilmu fikih dapat ditemukan penegasan secara implisit dan eksplisit bahwa wakaf memang

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit

bukan hanya sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan ajaran tentang keadilan sosial-ekonomi.<sup>46</sup> Melihat kekuatan hukum yang dimiliki olehnya meski ajaran, konsep, teori wakaf bersifat anjuran (*sunah*), namun memiliki kekuatan yang sungguh dahsyat sebagai roda untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat banyak. Islam menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat keluar dari jaring-jaring ekonomi *ribawi*, yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf dan zakat.<sup>47</sup>

Fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi, dan manfaat wakaf untuk kesejahteraan sosial, bahkan untuk mengembangkan sektor perekonomian masyarakat.<sup>48</sup> Selayaknyalah jika aset ekonomi yang besar yang dalam ranah hukum Islam masih *abu-abu* dari segi aspek pemahamannya dan kepastian hukumnya agar segera diterapkan meski telah diundangkan secara formal dalam bentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai diserahkan kepada badan usaha perekonomian berbentuk badan hukum perbankan Islam. Dalam hal wakaf tunai yang dikelola secara bisnis murni berupa badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas belum diatur dalam perundang-undangan yang ada,

<sup>46</sup> Duski Ibrahim, 2008, *Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan)*, Grafika Telindo Press, Palembang, hal. 5

<sup>47</sup> Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2005, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. ke-1, Mitra Abadi Press, Jakarta, hal. 8

<sup>48</sup> Duski Ibrahim, *op cit.*, hal. 6



sehingga penerapan asumsi ini di tengah masyarakat dalam tataran hukum perdata Indonesia belum mempunyai kekuatan hukum tetap (alas hukum/*legal standing*) dan belum dapat dijalankan dengan penuh kebaikan.

Dalam hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan muamalah (ekonomi Islam) dapat diterapkan dan dikembangkan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengingat dalam hadis Rasulullah saw, bahwa "*Kadang kala kefakiran dapat menyebabkan kekufuran.*" Seseorang dapat kufur/kafir akibat dari kemiskinan yang menyertainya. Sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan dana publik yang bersifat abadi. Salah satunya cara penggalangan dana publik dapat berbentuk wakaf tunai.

Wakaf dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur:

- a. Wakif;
- b. Nadhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.<sup>49</sup>

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>50</sup> Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>51</sup> Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit., Pasal 6

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit., Pasal 1 Ayat (2)

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit., Pasal 1 Ayat (4)

panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.<sup>52</sup> Badan Wakaf Indonesia, adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.<sup>53</sup>

Dengan kata lain, rukun wakaf yaitu:

- a. Wakif, orang yang berwakaf. Syaratnya pemilik sah dari harta yang diwakafkan, dewasa, tidak memiliki utang.
- b. *Mauquf*, harta yang diwakafkan tahan lama dan bermanfaat. Bisa berbentuk tanah, bangunan, serta uang.
- c. *Mauquf'alaibi*, tujuan wakaf, yaitu untuk kepentingan umum sebagai upaya mencari keridhaan Allah Swt.
- d. Sifat wakaf, yaitu pernyataan yang diucapkan wakif harus jelas dan lebih baik tertulis, ada saksi yang dianggap patut dalam akad wakaf.
- e. Nadhir, penerima yang akan mengelola harta wakaf baik perseorangan, lembaga atau badan hukum, ucapan kabul (menerima). Jika tidak ada nadhir, maka penerima ikrar wakaf dilakukan oleh hakim.

Badan hukum sebagai nadhir yang dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf, yaitu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang berkaitan dengan nadhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b: badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit., Pasal 1 Ayat (5)

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit., Pasal 1 Ayat (7)

keagamaan Islam. Hal ini lebih mengarah kepada yayasan. Untuk badan hukum bisnis seperti perseroan terbatas belum diatur dengan jelas.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum, tapi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan, bahwa perseroan diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai manusia. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Disebut "*artificial person*" atau manusia buatan, atau "*person in law*" atau "*legal person/rechtspersoon*".<sup>54</sup>

Berbicara mengenai konsep badan hukum, sebenarnya ia timbul dari hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan badan hukum tiada lain sekadar ciptaan hukum, yaitu dengan menunjukkan kepada adanya suatu badan di mana terhadap badan ini diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Hal ini tidak lain agar memudahkan menunjuk siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab di antara sedemikian banyak orang-orang yang terhimpun dalam badan tersebut, yaitu secara yuridis mengkonstruksikannya cukup dengan menunjuk "badan" itu sebagai hukum yang

<sup>54</sup> I.G. Rai Widjaya, 2003, Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Cet. ke-3, Editor Herman Sudrajat, Kesaint Blanc, Jakarta, hal. 27



bertanggung jawab.<sup>55</sup> Perseroan terbatas sebagai badan hukum maka dapat dikatakan perseroan terbatas sebagai nadhir wakaf tunai yang berbentuk badan hukum.

Mengingat keterbatasan pemahaman dan profesionalisme nadhir menyebabkan saat ini wakaf tunai belum populer aplikasinya dibandingkan dengan zakat. Hal ini menyebabkan profesi nadhir tidak mendapat tempat yang layak sebagaimana profesi yang lainnya (guru/dosen, pengacara, notaris, dokter), karena untuk saat ini karena profesionalitas nadhir belum terbukti dan teruji kelayakannya. Salah satu faktor yang terpenting bahwa nadhir yang ada belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola harta benda wakaf (benda bergerak dan benda tidak bergerak), atau tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Kebanyakan umumnya dikerjakan sebagai pekerjaan sambilan dalam konteks sebagai amal ibadah dan tidak diberikan gaji sebagaimana layaknya profesi tetap yang dihargai karena hanya dinilai dari segi amal sosial kemanusiaan dan ibadah semata. Agar perwakafan (wakaf tunai) lebih populer ketimbang filantropi Islam lainnya (hibah, zakat, sedekah) maka perlu sertifikasi yang pas untuk menghargai profesi nadhir sebagaimana penghargaan yang telah diberikan kepada profesi lainnya dan menjanjikan dari segi finansial (gaji).

---

<sup>55</sup> Setiono, 2002, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averoes Press, Malang, hal. 4

### C. Istilah Hukum

#### 1. Wakaf

Adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal; benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas; hadiah atau pemberian yang bersifat suci.<sup>56</sup>

#### 2. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>57</sup>

#### 3. Wakaf menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.<sup>58</sup>

#### 4. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 1266

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit

<sup>58</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002 M (28 Shafar 1423 H)

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>59</sup>

### 5. Wakaf Tunai

Adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>60</sup> Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga seperti saham, efek, dan lainnya.

### 6. Tunai

Tidak bertanggung lagi, tidak bertanggung pada saat itu juga; kontan; diterima (diserahkan) segera setelah dilakukan pembayaran.<sup>61</sup>

### 7. *Cash Waqf*

Sebenarnya bila melihat dari segi objek wakaf yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.<sup>62</sup> Oleh karena pengertian uang luas mencakup surat-surat berharga seperti saham, efek, dan sebagainya. Sedang yang dimaksudkan di sini, adalah wakaf uang kontan/tunai/*cash* (uang kartal) lawan dari uang deposito (uang giral). Maka digunakan istilah wakaf tunai terjemahan dari *cash waqf*, ketimbang istilah wakaf uang. *Cash waqf* berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi wakaf tunai.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Bab I Pasal 215 Ayat (1,4)

<sup>60</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Edisi ke-2, Cet. ke-2, Jakarta, hal. 1

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 1223

<sup>62</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, loc cit

<sup>63</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, loc cit



### 8. Wakif

Adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum (Pasal 7). Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

### 9. Nadhir

Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 Ayat 4). Nadhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum (Pasal 9). Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

### 10. Filantropi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu cinta kasih.<sup>64</sup> **Filantropi Islam** terdiri dari kata filantropi dan Islam. Filantropi artinya cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama.<sup>65</sup> Islam, artinya agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, op cit., hal. 316

<sup>65</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 316

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 444

### **11. Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)**

Adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam bentuk filantropi perusahaan (*corporate philanthropy*), yaitu derma perusahaan untuk aktivitas sosial masyarakat.<sup>67</sup>

### **12. *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stake holders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

### **13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>68</sup>

### **14. Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

Yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>69</sup>

<sup>67</sup>Andi Surugi/Ardhian Novianto, Sabtu, 20 Mei 2006, Bisnis dan *Corporate Philanthropy*, <http://www.ibl.or.id>, diakses 19 Juli 2008

<sup>68</sup>Gunawan Widjaja, 2007, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, Cet. ke-1, Praninta Offset, Jakarta, h. 96

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas op cit., Pasal 1 Ayat (1)

### 15. *Syirkah*

Atau Syarikat Dagang, yaitu dua orang atau lebih, sama berjanji akan bekerja sama dalam berdagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecil modal masing-masing mereka.<sup>70</sup>

### 16. *Pengelolaan*

Berarti proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>71</sup>

### 17. *Badan Hukum*

Badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya).<sup>72</sup> Badan hukum atau pribadi hukum sesuatu yang dianggap sama dengan manusia kodrati, sehingga dapat melakukan perjanjian, memiliki kekayaan, melakukan gugatan, dapat digugat; bedanya dengan manusia, badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan dan tidak dapat dipenjara, kecuali hukuman denda atau administrasi.<sup>73</sup>

### 18. *Modal*

Uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk

<sup>70</sup>Idris Ahmad, 1994, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, Jilid ke-4, Cet. ke-1, Multazam, Siliwangi, hal. 106

<sup>71</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 534

<sup>72</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 84

<sup>73</sup> Joni Emirzon, 2000, op cit., hal. 30



berdagang, melepas uang dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.<sup>74</sup>

### 19. Saham

Adalah:

- Bagian; andil; sero (tentang permodalan).
- Surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
- Hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.<sup>75</sup>

### 20. *Corporate Governance* (CG)

Serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 750

<sup>75</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op cit., hal. 977

<sup>76</sup> CGPI., Penilaian dan Peningkatan Penerapan *Corporate Governance*, <http://www.iicg.org/.index.>, diakses 26 Oktober 2008

## II

# WAKAF TUNAI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS IDE REVITALISASI HUKUM PERDATA INDONESIA

### A. Wakaf Tunai Wujud Kepedulian (Filantropi Islam) terhadap Sesama

Dalam tataran hukum, Islam merupakan kumpulan hukum dan ajaran agama yang sempurna, menyeluruh dari berbagai aspeknya (Al-Maidah: 2). Kesempurnaannya dapat dilihat dari tujuan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yaitu untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan ganda yang cenderung ideal ini tidak dapat dicapai begitu saja melainkan dengan menyeimbangkan pelaksanaan ajaran-ajaran yang berdimensi *hablum-minallah* dalam bentuk ibadah langsung kepada Tuhan dan ajaran-ajaran yang berdimensi *hablum-minannas* dalam bentuk ibadah tidak langsung atau sering disebut muamalah, hubungan sesama manusia dan lingkungannya.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya, sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan memerlukan perangkat aturan/patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda mengenai keteraturan dalam hidup

<sup>77</sup> Duski Ibrahim, *Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan: (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan)*, op cit., hal. 1

bermasyarakat. Patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.<sup>78</sup> Nilai merupakan suatu keadaan yang dapat dialami, namun sifatnya masih sangat abstrak. Dalam situasi hukum, nilai tersebut haruslah dikonkretkan lagi dalam bentuk yang diberi nama asas hukum. Asas hukum ini pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, dan untuk lebih mengkonkretkan asas hukum ini dalam masyarakat maka dijemlakanlah ke dalam norma yang berupa peraturan hukum.<sup>79</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, maka perubahan pemahaman publik terhadap hukum Islam bergerak begitu cepat dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Juga berkaitan erat dengan keanekaragaman cara pandang dan interpretasi terhadap penerimaan hukum Islam itu sendiri sehingga berimplikasi pada pemahaman mengenainya. Menurut Didi Kusnadi, keanekaragaman adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syariah dan identik dengan *fiqh*.<sup>80</sup> Ini terjadi di kalangan ulama fikih, akademisi, dan praktisi hukum Islam.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed, ke-1, Cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

<sup>79</sup> Muhammad Erwin, Amrullah Arpan, 2007, Filsafat Hukum: Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan, Universitas Sriwijaya Press, Palembang, Cet. ke-1

<sup>80</sup> Didi Kusnadi, Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik dan Produk Hukum), <http://www.badilag.net>, diakses Kamis, 26 Februari 2009



Menurut M. Atho Mudzhar, hal ini terjadi dikarenakan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam yang terbagi ke dalam empat jenis, yaitu:<sup>81</sup>

1. Kitab-kitab *fikih*
2. Keputusan-keputusan peradilan agama
3. Peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim
4. Fatwa-fatwa ulama

Keempat faktor ini diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.

Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Dan hukum Islam yang berlaku secara normatif, yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau pedoman hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya. Menurut Abdul Ghani Abdullah, berdasarkan pada pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang telah mendapat tempat sebagai konstitusi. Hal ini terjadi berdasarkan pada tiga alasan, yaitu:

1. Alasan Filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya

<sup>81</sup> M. Atho Mudzhar, Nomor 4 Tahun II, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama, Jakarta

- norma fundamental negara Pancasila.
2. Alasan Sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan.
  3. Alasan Yuridis, yang tertuang dalam Pasal 27, 28, 29 Undang-Undang Dasar 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis.<sup>82</sup>

Ketiga aspek di atas menjadikan hukum Islam sebagai sebuah nilai ajaran agama yang bergerak menjadi sebuah peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemeluknya. Sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, *as-Sunnah*, *al-Ijtihad*, *al-Ijma'*, *al-Qiyas*, *al-Istihsan*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *al-'Urf*, dan *al-Istishbab*. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dalam hukum Islam yang terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Hukum *I'tiqadiyah*, yaitu yang berhubungan dengan keimanan.
2. Hukum Amaliah, yaitu yang berhubungan dengan perbuatan/perkataan seorang mukallaf, dibagi dua:
  - a. Hukum Ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarmanusia dengan Allah Swt (shalat, zakat, puasa, haji, nazar, dan sebagainya).
  - b. Hukum Muamalah, yaitu mengatur hubungan

<sup>82</sup> Abdul Ghani Abdullah, Nomor 12 Tahun V, Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Departemen Agama, Jakarta

antarmanusia secara individual, kelompok, antarindividu dalam kelompoknya. Adapun pengaturan mengenai muamalah dalam arti luas sekaligus dikomparasikan dengan hukum positif yang sebagian bersumber pada hukum Barat dan produk hukum Nasional.<sup>83</sup>

- c. Hukum *Khuluqiyah*, yaitu yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan akhlak baik dan buruk.

Hukum ibadah merupakan jalan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan *Al-Hadits* sebagai cara untuk menyembah dan berhubungan langsung dengan Allah Swt. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah pada dasarnya mempunyai dua prinsip, yaitu:

1. Supaya tidak menyembah melainkan Allah

*"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku."* (Q.S. An-Anbiya: 25)

2. Ibadah itu dilakukan sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya

*"Barangsiapa yang membuat peraturan baru dalam agama, yang bukan merupakan agama maka hal itu ditolak".* (Muttafaq'alaihi dari Aisyah r.a.).<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Ade Maman Suherman, loc cit., hal. 167

<sup>84</sup> Yusuf Al-Qardhawi, 1997, *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Cet. ke-1, alih bahasa Faizah Firdaus, Danakarya, Surabaya, hal. 316



Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dalilnya telah jelas (*qath'iy*), sedangkan yang berkaitan dengan muamalah dalilnya masih *dzanny* (dapat dikembangkan sesuai dengan zaman dan tempat). Peraturan hukum yang berkaitan dengan ibadah bersifat tetap, tidak boleh diubah sesuai dengan zaman dan tempat. Hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dapat diubah sesuai dengan zaman dan tempat dengan syarat tetap mengacu kepada prinsip-prinsip umum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan *Al-Hadits*.

Sebagaimana ijtiha<sup>d</sup> Nabi saw yang tampak salah ketika memberikan pendapat kepada orang-orang Madinah yang sedang mencangkok kurma dan ternyata hasil panen tidak seperti yang diharapkan. Hal ini disampaikan kepada beliau, dan Nabi saw bersabda, *"Aku manusia juga. Kalau aku perintahkan hal tentang agama, barulah kalian taati, tetapi kalau mengenai pendapatku sendiri, itu juga dugaan saja sebagai manusia biasa. Bahkan mungkin kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tentang nasihat, kalau tidak ada wahyu, aku seperti kalian juga."*<sup>85</sup>

Peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang ibadah, keluarga dan waris bersifat terperinci, selain bidang ekonomi, sosial, politik, negara, dan sebagainya perumusannya bersifat *limitatif enunciatif* (global) atau hanya ketentuan umumnya saja. Dalam Al-Qur'an bidang muamalah tertera pada 70 ayat setara dengan bidang hukum keluarga. Hukum pidana termaktub dalam 30 ayat, hukum acara 13 ayat, hukum kenegaraan 10 ayat, hukum internasional dan antar agama 25 ayat, hukum ekonomi dan harta kekayaan 10 ayat.

<sup>85</sup> Said Ramadan, Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam, alih bahasa Badri Saleh, Firdaus, Jakarta, hal. 81

Etika ekonomi Islam dimuat dalam ayat-ayat Al-Qur'an lebih seperlima dari tema-tema lainnya, yaitu ibadah, politik, negara, dan lain-lain. Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme, sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan pada empat sifat sekaligus, yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Hukum Islam diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan baru, khususnya dalam segala cabang dari muamalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Para ulama (lokal) dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kebaikan (*sense of mashlahah*) yang tinggi dan kreativitas yang penuh dengan tanggung jawab dalam upaya merumuskan alternatif *fikih* baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya.<sup>86</sup> Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik mengenai urgensi dan tujuan ditetapkan hukum Islam. Para ulama *Ushul Fiqh* telah menetapkan bahwa maksud dan tujuan hukum Islam (kemaslahatan) itu bersifat menyeluruh dan bervariasi, yaitu:

1. Hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat agama dan spiritual. Termasuk bidang aqidah dan ibadah, karena agama merupakan inti alam dan ruh kehidupan.
2. Hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan membentuk akhlak mulia. Dalam hadits disebutkan "Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia".

<sup>86</sup> Darul Ulum, Jum'at, 23 November 2007, Tema Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (1905-1975 M), <http://darul-ulum.blogspot.com>., diakses Kamis, 26 Februari 2009

3. Hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan kemanusiaan (menjaga kehormatan, manusia, darahnya, hartanya, harga dirinya dan akalnya, reputasi dan kemerdekaannya).
4. Hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan ekonomi. Karena harta benda sebagai kebutuhan utama yang harus dijaga dengan cara apapun.
5. Hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan orientasi ke masa depan. Karena hukum Islam tidak hanya menjaga generasi yang ada sekarang, tapi juga memerhatikan generasi mendatang, yaitu menjaga keturunan.<sup>87</sup>

Intisari ajaran Islam adalah untuk menjadikan manusia mempunyai akhlak yang baik (moral dan etika). Salah satu di antaranya menganjurkan agar umatnya senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, berbakti kepada masyarakat dengan sukarela untuk menguatkan yang lemah, mengajari yang belok, membimbing yang bingung dan membantu yang tak berdaya. Perbuatan-perbuatan yang mengandung moral ini merupakan salah satu cerminan dari perilaku berbudaya.<sup>88</sup> Allah berfirman, *"Dan lakukanlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan."* (Al-Hajj: 77).

Maksud dan tujuan hukum Islam ada juga yang bersifat khusus dan umum, yaitu:

1. Keadilan. Merupakan maksud dan tujuan yang bersifat umum dan bahkan ia merupakan maksud dan tujuan dari seluruh masalah agama

<sup>87</sup> Yusuf Qardhawi, op cit., hal. 298

<sup>88</sup> Yusuf Qardhawi, op cit., hal. 344



samawi. Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Al-Hadid: 23).

2. Kesejahteraan dan keamanan hidup. Mewujudkan kesejahteraan dan keamanan hidup merupakan maksud dan tujuan yang bersifat umum: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (Quraisy: 3-4).
3. Pemerataan. Qur'an menjelaskan mengenai maksud Rasulullah membagi-bagikan harta *fa'i* pada beberapa kelompok orang yang lemah sebelum membagikan kepada kelompok lain. Yang termasuk kelompok ini ialah anak-anak yatim, orang miskin, dan ibn sabil. Allah berfirman: "Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu"(Al-Hasyar: 7).<sup>89</sup>

Kaitannya dengan sosial kemasyarakatan, bahwa unsur keadilan, kesejahteraan, dan keamanan hidup serta pemerataan kekayaan merupakan persoalan hukum yang penting ditegakkan agar kehidupan publik menjadi aman dan sejahtera.

<sup>89</sup> Yusuf Qardhawi, op cit., hal. 297

Sekarang ini marak dibicarakan mengenai filantropi. Sebenarnya hal tersebut telah ada semenjak dulu kala. Filantropi (kedermawanan) merupakan kebaikan sosial antara sesama manusia yang diajarkan oleh berbagai macam agama yang ada. Dalam ajaran Islam (sebagai salah satu agama di Indonesia), maka bentuk-bentuk tanggung jawab anggota masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial ini berwujud dalam berbagai macam perintah untuk memberikan sebagian harta kekayaan yang dimiliki untuk diberikan kepada anggota masyarakat lain yang memerlukan.

Filantropi dalam Islam sangat dianjurkan dan di antara jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan bagi manusia adalah bersedekah di jalan-Nya dengan memberikan harta terbaik yang dimilikinya, dan ini menjadi syarat untuk memperoleh kebaikan. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman, *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"* (Ali-Imran: 92).<sup>90</sup> Sedekah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sedekah Wajib, yaitu zakat.
2. Sedekah Sunnah, di antaranya:
  - Wakaf, yaitu apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada.

<sup>90</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, op cit

- Hibah, yaitu apabila dia memberikan suatu barang kepada orang lain untuk dimiliki.
- Wasiat, yaitu apabila ia berderma dengan hartasetelah meninggalatauperintahuntuk mengurus sesuatu sepeninggalnya.<sup>91</sup>

Islam merupakan agama yang sempurna (*ad-Din as-Syamil*) yang ajarannya mencakup segenap aspek kehidupan, dari mulai yang terkecil hingga yang besar. Ajaran Islam yang memiliki ciri khas tersendiri berbeda dengan agama lainnya, yaitu adanya unsur tolong-menolong dan saling peduli sesama penganutnya (*ta'awun dan takaful ijtima'i*) yang dilakukan berdasarkan atas Ketuhanan belaka. Filantropi dalam Islam, berupa pertolongan dan kepedulian terhadap sesamanya dapat berwujud harta benda, perbuatan, doa, senyuman dan sebagainya. Banyak sekali ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan muamalah (sosial) selalu ada unsur "pemeliharaan" terhadap hak-hak orang lain yang terkait dengan objek, saksi, wakil, dan sebagainya. Dan salah satu darinya adalah masalah wakaf.<sup>92</sup>

Filantropi dalam Islam yang berupa wakaf sesungguhnya hanya mampu dilakukan oleh manusia pilihan. Sebab wakaf pada praktiknya adalah memberikan harta terbaik kepada Allah Swt, dan itu tidaklah mudah.

<sup>91</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsimin, 2008, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Cet. ke-1, alih bahasa Abu Hudzaifah, Pustaka Iman Asy-Syafi'i, Jakarta, hal. ix-x

<sup>92</sup> Rizka Maulan, 2 Desember 2006, Wakaf Sebagai Kekhususan Umat Islam, Perseroan Terbatas Syarikat Takaful Indonesia, <http://www.rizkamaulan>, diakses 1 April 2007



“Seorang sahabat Rasul *Shalallahu'alaibi Wassalam*, Abu Thalhah pernah merasa terpanggil ketika mendengar surat Ali Imran ayat 92: ‘Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna disisi Allah) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya’. Ia lalu berkata: ‘Ya Rasul, aku memiliki sebuah kebun kurma yang luas dan amat rimbun di sisi masjid ini (masjid Nabawi). Tiada harta yang lebih aku cintai dari itu. Aku menginfakannya (mewakafkannya) di jalan Allah *Subhanahurwata'ala*. Usai berikrar, Abu Thalhah langsung menuju ke kebunnya yang terletak di sebelah masjid. Di sana terdapat istri dan anak-anaknya yang sedang memetik kurma. Dengan lantang, Abu Thalhah berteriak ke arah mereka: ‘Hei, keluar dari kebun segera! Kebun ini mulai sekarang bukan lagi milik kita. Ia telah aku serahkan kepada Allah *Subhanahurwata'ala*. Segeralah kalian keluar darinya’.<sup>93</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah ibadah manusia pilihan yang tidak pernah berhitung dalam membela agama Allah dan bukankah Allah swt juga tidak pernah berhitung kepada manusia ketika memberikan nikmat-Nya? Wakaf sangat berkaitan erat dengan dimensi ibadah (ketuhanan) dan dimensi sosial-ekonomi (kemanusiaan/publik), maka keberadaan wakaf tidak terlepas dari konsep

<sup>93</sup> Herman Budianto, Jum'at, 4 Mei 2007, Wakaf Ibadah Manusia Pilihan, <http://www.tabungwakaf.com>, diakses 3 April 2008

keimanan dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial, ia merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif apabila telah meninggal dunia di mana wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan (amal jariyah). Sedang dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Filantropi menurut Islam dapat dikaitkan dengan alasan keagamaan dan alasan kemanusiaan.

Selama ini yang berlaku dalam filantropi Islam berupa pemberian harta kekayaan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan berbentuk infak, zakat, sedekah dan wakaf tapi belum ditata dengan baik sehingga belum tampak kelihatan manfaatnya yang signifikan di tengah kehidupan masyarakat banyak dalam jangka panjang. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius dalam hal pengelolaan aset sosial tersebut dan sekarang tengah gencar dilakukan pemberdayaan dana-dana umat agar bermanfaat lebih banyak dan secara luas sehingga hal ini dapat sinkron dengan tujuan umum filantropi itu sendiri.

Pengertian filantropi berasal dari bahasa Yunani, *philos* artinya cinta dan *anthropos* artinya manusia. Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum, filantropi bisa didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary actions for the public goods*).<sup>94</sup> *Philanthropy*, berarti kedermawanan, dan *voluntary*, artinya sukarela.<sup>95</sup> Dalam bahasa Belanda, *philanthroop*, artinya orang yang cinta kepada sesama manusia.<sup>96</sup>

Ajaran wakaf yang mengarah kepada upaya pemenuhan tujuan ganda, yaitu selain untuk ibadah (tujuan akhirat), juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkecil jurang pemisah antara kaum berada (*the have*) dan kaum tak berpunya (*the have not*), mengentaskan kemiskinan, juga memerhatikan kontinuitas benda-benda wakaf untuk tetap eksis, dapat dipertahankan bahkan terus dikembangkan dengan mempertimbangkan sumber dana pemeliharaan dan pengembangannya (tujuan duniawi).

Berbeda dengan zakat, terutama zakat fitrah yang memang diperuntukkan untuk kesenangan kaum fakir dan miskin menjelang Hari Raya Idul Fitri setelah melaksanakan

<sup>94</sup> HM. Cholil Nafis, 27 Mei 2007, Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, <http://www.pmiikomfaksyahum.wordpress.com>, Jakarta, diakses 19 Juni 2008

<sup>95</sup> Jackie Ambadar, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Praktik di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha*, PT. Elex Media Komputindo (Gramedia), Jakarta, hal. 6

<sup>96</sup> S. Wojowasito, 2001, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 495



puasa Ramadhan selama lebih kurang 30 hari lamanya. Hal ini tampak jelas berbeda meski sama-sama beranjak pada pemikiran hukum sebagai bentuk dari filantropi (kedermawanan) kepada sesama manusia, bahkan filantropi pada wakaf dapat lebih luas lagi.

Khusus mengenai masalah zakat dalam Al-Qur'an dan *Al-Hadits* telah dijelaskan secara rinci, sehingga ajaran zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *qath'iyyud ad-dalalah* (jelas dan pasti penunjukan lafaznya). Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional zakat seperti pola pengambilan zakat, pihak-pihak yang berhak (mustahik) mendapatkan zakat dan jenis-jenis barang yang harus dizakati telah jelas disebutkan.

Perbuatan wakaf yang status hukumnya hanya sunat (*zanni ad-dilalah*) berbeda dengan zakat yang status hukumnya adalah wajib (*qath'iyyud ad-dalalah*). Oleh karena itu, dalam ajaran wakaf membuka peluang yang lebih besar agar pengelolaan harta benda wakaf bisa lebih dimanfaatkan dan dikembangkan bagi kepentingan publik, karena pada pokok harta benda wakaf harus tetap eksis, tidak boleh habis atau berkurang bahkan harus bertambah.

Zakat ketika diterima Badan Amil Zakat (BAZ) langsung diberikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Tetapi wakaf tunai sifatnya semacam investasi, di mana wakaf tunai tidak boleh diserahkan kepada siapa pun, yang diberikan adalah hasil investasi dari wakaf tunai untuk kepentingan publik atau keluarga sesuai peruntukannya yang tertera dalam akta ikrar wakaf.

Dalam perkembangannya, teknis operasional pengelolaan zakat telah mengalami inovasi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat secara optimal yang digunakan untuk keperluan umat Islam, selain itu juga untuk kepentingan sarana dan prasana ibadah sebagai mitra pemerintah dalam upaya membangun mental spiritual, perekonomian dan kepedulian sosial masyarakat beragama Islam khususnya dan komunitas masyarakat Indonesia lainnya yang telah dilakukan. Seperti dalam menangani masalah sosial ekonomi masyarakat berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan bencana alam, bantuan pengembangan unit usaha masyarakat dan lain sebagainya.

Meskipun zakat dan wakaf sama-sama bernuansa ibadah langsung kepada Allah Swt, merupakan ibadah sosial sekaligus beraspek hukum yang mesti diberlakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Pemberlakuan hukum sekaligus bernuansa ibadah berlaku pada keduanya, namun dari segi sumber hukum (*mabda'ul-ahkam*) berbeda, di mana perintah wakaf hanya bersumber pada pemahaman teks ayat dan hadis Rasulullah saw sebagai sebuah amal kebaikan,<sup>97</sup> sementara zakat telah jelas kriterianya dan dalam tataran hukum Islam mempunyai kedudukan hukum yang harus dan wajib dilaksanakan.

Wakaf merupakan salah satu ajaran agama yang sama kedudukannya dengan zakat, infak, dan *sedekah*. Bahkan menurut penilaian para pakar dan pengamat, bahwa optimalisasi Wakaf bisa lebih luas dibandingkan zakat, karena

<sup>97</sup> Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar, 2005, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, Cet. ke-2, Mitra Abadi Press, Jakarta, hal. 58

pada Wakaf tidak ada kualifikasi *nishab* maupun mustahik.<sup>98</sup> Terdapat perbedaan dan persamaan mengenai zakat, wakaf, infak, sedekah, dan hibah.

Zakat berasal dari bahasa Arab *az-zakah*, artinya suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban salat.<sup>99</sup>

Perkataan infak berasal dari bahasa Arab *infaq*, yaitu sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya; mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas (karena Allah Swt semata).<sup>100</sup>

Perkataan sedekah berasal dari bahasa Arab *as-shadaqah*, artinya benar; pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt dan pahala semata.<sup>101</sup> Hibah berasal dari bahasa Arab. Hibah, artinya pemberian/hadiah. Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharap balasan apa pun.<sup>102</sup>

Jika dilihat dari bendanya, wakaf sangat identik dengan sedekah jariah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki

<sup>98</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta, hal. 1

<sup>99</sup> Dahlan Abdul Aziz, et.al., 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-6, Cet. ke-1, Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 1985

<sup>100</sup> Dahlan Abdul Aziz, et.al., ibid., Jilid ke-3, hal. 716

<sup>101</sup> Dahlan Abdul Aziz, et.al., ibid., Jilid ke-5, hal. 1617

<sup>102</sup> Dahlan Abdul Aziz, et.al., ibid., Jilid ke-2, hal. 540



pahala yang terus mengalir selama harta wakaf masih bisa dimanfaatkan oleh manusia, diberikan sesuai dengan peruntukannya, bisa diberikan kapan saja. Berbeda dengan zakat yang bukan merupakan sedekah jariah (terus-menerus) karena dalam posisi tertentu akan habis begitu saja, harus dilaksanakan tiap tahun (haul), dan harus diberikan kepada orang yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (*al-Ashnaf* delapan golongan yang berhak menerima zakat).

Zakat dan wakaf dapat dikatakan mirip dengan sedekah karena merupakan suatu pemberian secara sukarela, namun terdapat perbedaan antara keduanya dari segi waktu dan jumlah. Sedekah dalam zakat, adanya batasan yaitu harus mencapai nishab (jumlah yang telah ditetapkan) dan haul (satu tahun). Sementara sedekah dalam wakaf tidak dibatasi waktunya dapat kapan saja dan tidak ditentukan berapa besar jumlahnya.

Ahmad Sarwat, membedakan wakaf dengan sedekah biasa. Wakaf termasuk sejenis ibadah maliyah yang spesifik.<sup>103</sup> Asal katanya dari kata *wa-qa-fa* yang artinya tetap atau diam, maksudnya adalah bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya. Sedangkan sedekah biasa, begitu seseorang memberikan hartanya, maka biasanya harta itu langsung habis manfaatnya saat itu juga. Tidak ada pahala lainnya setelah itu, sebab pokok sedekah itu sudah selesai manfaatnya.

Zakat dan wakaf dapat dikategorikan sebagai infak, karena memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi

<sup>103</sup> Ahmad Sarwat, 10 Mei 2006, Beda Wakaf dan Zakat, <http://www.ahmadsarwat>, diakses 19 Maret 2007

kebutuhannya. Tapi terdapat perbedaan antara wakaf dengan infak. Wakaf adalah pemberian hibah kepada kaum muslimin atas nama Allah Swt hibahnya kepada Allah Swt untuk keperluan kaum muslimin, statusnya milik Allah Swt sehingga tidak boleh dihadiahkan, dihibahkan, diwariskan, atau dijual.

Sedangkan infak, adalah pemberian seseorang kepada orang lain hanya dalam bentuk harta, ada yang wajib dan ada yang tidak wajib (sunnah), yang wajib adalah zakat, yaitu pemberian seseorang atau pengeluaran sebagian harta tertentu dengan ukuran dan persentase tertentu, hukumnya wajib serta terikat dalam aturan tertentu. Yang tidak wajib adalah sedekah, yaitu perbuatan baik kepada orang lain, dalam bentuk harta maupun nonharta dengan ukuran yang sebebas-bebasnya, misalnya tersenyum kepada orang lain atau berinjak.<sup>104</sup>

Salah satu bentuk perwujudan filantropi dalam hukum Islam, yaitu wakaf, dapat berupa benda bergerak (wakaf tunai) dan benda tidak bergerak. Secara wujud, benda wakaf masih banyak dan tetap keberadaannya hingga sekarang ini, tapi masih ada sisi penekanan yang tersisakan, yaitu peran sosialnya yang merupakan tujuan duniawi dari ajaran Wakaf belum terpikirkan secara serius, sehingga perannya sebagai alternatif pengentasan kemiskinan belum terlihat dalam realitas.<sup>105</sup>

Untuk menyatakan terminologi kata wakaf, para ahli fikih (fukaha) menggunakan dua kata, yaitu *habas* dan *waqaf* yang merupakan kata benda dan jamaknya adalah *arwaqaf*, *ahbas*, dan *mahbus*. *Al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah

<sup>104</sup> Pikiran Rakyat, Selasa, 10 Agustus 2004, Beda Infak dan Sedekah, <http://www.pikiranrakyat>, diakses 31 Desember 2006

<sup>105</sup> Duski Ibrahim, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan: (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan), op cit., hal. 4

atau melarang) dan *al-imsak* (menahan),<sup>106</sup> atau kebalikannya *takhliyah* (membiarkan). Menurut Az-Azhari, ia mengatakan bahwa *al-hubus* jamak dari *al-habis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya, dan semua peralatannya.

Kesimpulan yang diambil oleh Mundzir Qahaf, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakhust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Perkataan wakaf dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Menurut istilah hukum Islam berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Swt. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang yang memisahkan hartanya demi kepentingan peribadatan dan hanya mengharap ridha dari Allah Swt semata, maka dapat dikatakan seseorang itu telah melakukan wakaf.<sup>107</sup>

Wakaf, berasal dari bahasa Arab *waqf*, artinya menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ulama berbeda pendapat dalam definisi wakaf yang

<sup>106</sup> Mundzir Qahaf, 2004, Manajemen Wakaf Produktif, Cet. ke-1, alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta, hal. 44

<sup>107</sup> Sayid Sabiq, 1971, Fiqh Sunnah, Jilid ke-3, Dar Al-Bayan, Kuwait, hal. 378



membawa perbedaan tentang akibat hukum.<sup>108</sup> Kata Arab *waqf* (dalam ejaan bahasa Indonesia: wakaf) berarti *al-habs* (*confinement*, penahanan, penghentian) atau *al-man'* (*prohibition*, pelarangan), yaitu pengkhususan kekayaan untuk kepentingan umum tertentu atau pelarangan penggunaannya untuk selain yang sudah ditetapkan oleh pemberi wakaf, yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemilik asalnya.<sup>109</sup>

Definisi wakaf menurut hukum Islam yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Definisi mengenai wakaf, di antaranya menurut TM. Hasbi Ash-Shieddieqy, dalam kitab (buku) wakaf dalam Bab Hukum-Hukum Wakaf, menuliskan bahwa wakaf itu suatu ibadat yang disyariatkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan *lafadh*, walaupun tidak diputuskan (diakui) oleh hakim, dan hilang miliknya si wakif daripadanya, walaupun barang itu tetap ada di tangannya.<sup>110</sup> Ini adalah pendapat Asy-Syafi'iy yang disetujui oleh Malik dan Ahmad. Pendapat lain mengatakan, baru dipandang sah (menjadi wakaf) apabila telah dikeluarkan dari tangannya, yakni diserahkan kepada seseorang pengurus yang mengurus wakaf itu.

Menurut mazhab Syafi'i, wakaf diartikan berhenti atau tertahan. Menurut istilah *syara'* ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, serta kekal

<sup>108</sup> Dahlan Abdul Aziz, et.al., op cit., Jilid ke-6, hal. 1905

<sup>109</sup> Rifyal Ka'bah, 2004, Wakaf Dalam Perspektif Hukum Nasional, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hal. 25-26

<sup>110</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1970, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet. ke-4, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 159

'ain-nya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh *syara'*, serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu.<sup>111</sup> Abu Hanifah menyatakan bahwa wakaf itu suatu pemberian yang benar, tetapi tidak lazim yakni tidak terlepas dari milik si wakif. Kata Malik dan Ahmad, milik barang yang diwakafkan itu menjadi kepunyaan Allah, bukan kepunyaan si wakif (orang yang mewakafkan) dan bukan si *mauquf'alaibi* (pengelola wakaf), tapi berpindah kepada si *mauquf'al* (Allah).<sup>112</sup>

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dituntut sekali dalam agama Islam, sebab wakaf ini termasuk amal saleh yang pahalanya tidak akan putus-putusnya diberikan Allah kepada orang yang berwakaf selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang. Benda yang diwakafkan adalah mutlak hak Allah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada siapa pun.<sup>113</sup> Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.<sup>114</sup>

Menurut Rizka Maulan, dari segi bahasa, wakaf memiliki beberapa arti, yaitu terkembalikan, tertahan, tertawan, mencegah. Karena harta yang diwakafkan, asli dari harta tersebut harus tertahan, artinya tidak boleh habis dikonsumsi.<sup>115</sup> Menurut Farid Hasan, bahwa konsep wakaf dalam hukum Islam, adalah penahanan benda bernilai

<sup>111</sup> Idris Ahmad, 1994, *Fiqh Syafi'i : Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, Jilid ke-2, Multazam, Siliwangi, hal. 156

<sup>112</sup> Idris Ahmad, *ibid.*, hal. 156

<sup>113</sup> Idris Ahmad, *ibid.*, hal. 156

<sup>114</sup> HM. Cholil Nafis, <http://www.pmiikomfaksyahum.wordpress.com>, op cit

<sup>115</sup> Rizka Maulan., <http://www.rizkamaulan>, op cit

ekonomis dari peralihan kepemilikan dan pengelolanya untuk terus menghasilkan manfaat yang dapat diberikan secara berkelanjutan bagi tujuan-tujuan kebajikan menurut syariah Islam.<sup>116</sup>

Konsep wakaf dalam hukum nasional, adalah merujuk pada konsepsi hukum Islam, tapi tujuan wakafnya hanya mendukung kepada kesejahteraan umum yang mencakup tujuan keagamaan, sedangkan tujuan kekeluargaan dikesampingkan karena kurang dapat memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan umum.<sup>117</sup> Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadhir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.<sup>118</sup>

Dompot Dhuafa Republika (DD-Republika) memberikan definisi wakaf, adalah menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah. Diberikan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat secara permanen untuk kepentingan umum, masyarakat dan bermanfaat lebih bagi dhuafa. Wakaf bisa berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dapat digunakan terus-menerus oleh masyarakat sesuai koridor syariat.<sup>119</sup> Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai sebagai penyerahan aset wakaf berupa uang tunai

<sup>116</sup> Farid Hasan, *Temporalitas Wakaf dalam Hukum Nasional Beserta Syari'ah Islam yang Melandasinya*, <http://www.faridhasan>, diakses 17 Nopember 2008

<sup>117</sup> Farid Hasan, <http://www.faridhasan>, *ibid*

<sup>118</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, *op cit.*, hal. 3-4

<sup>119</sup> Dompot Dhu'afa Republika, Pendar, *loc cit*



yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.<sup>120</sup>

Menurut Farid Hasan<sup>121</sup>, bahwa wakaf tidak berarti putusnya hubungan kepemilikan, karena tidak terdapat suatu dalil yang kuat yang mendukung hal tersebut. Dan status harta wakaf tersebut sama dengan pemberian lainnya yaitu si pemberi sudah tidak lagi punya hak atas apa pun atas harta itu, namun hal itu tergantung dari akadnya (surat perjanjian), di mana:

- a. Bisa saja akan sebuah wakaf hanya pada manfaatnya, sedangkan kepemilikan benda itu tetap masih ada dimiliki oleh si empunya. Contoh seekor kambing tetap miliknya namun bila ada susu yang diperas maka menjadi hak milik fakir miskin. Akad seperti itu pun bisa dibenarkan.
- b. Penerima wakaf bisa dikhususkan kepada orang tertentu saja atau bisa untuk umum sebagaimana yang diamanatkan yang memberi wakaf.
- c. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan bila memang sejak awal kepemilikannya sudah dilepas, para ahli waris tidak berhak mengaku sebagai pemilik juga para ahli waris sama sekali tidak punya hak apalagi berkewajiban untuk mengelola sebuah harta

<sup>120</sup>Bank Indonesia, Biro Perbankan Syari'ah, <http://www.bankindonesia>, diakses 17 Nopember 2008

<sup>121</sup> Farid Hasan, <http://www.faridhasan>, op cit

wakaf, bila memang tidak diserahkan oleh si pemberi wakaf, yang berhak dan berkewajiban adalah nadhir wakif.

- d. Menurut hukum Indonesia, penunjukan nadhir wakif dikuatkan dengan sebuah akta wakaf. Bila berbentuk sebidang tanah yang lebih kuat adalah sertifikat tanah. Namun nadhir bukanlah pemilik, sehingga tidak berhak menjualnya, menyewakannya ataupun memanfaatkannya bila tidak sesuai dengan amanah yang diberikan.<sup>122</sup>

Dari berbagai pengertian wakaf yang diberikan di atas, maka wakaf secara umum mengandung makna sebagai pemberian harta benda untuk kepentingan agama dan sosial yang sifatnya abadi selama harta benda wakaf tersebut tetap ada, yang mana harta tersebut meskipun diserahkan kepada nadhir sebagai pengelolanya, namun pada hakikatnya harta tersebut telah diserahkan kepada Allah Swt sebagai pemiliknya.

Menurut Mundzir Qahaf, definisi tersebut mencakup wakaf abadi (tanah, bangunan) dan wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Pendapat ini disetujui oleh empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan wakif (pendapat para pengikut mazhab Maliki); juga mencakup jenis wakaf baru dan belum ada di zaman dulu seperti Wakaf hak yang bernilai uang dan Wakaf manfaat dengan berbagai macamnya. Pendapat

<sup>122</sup> Ahmad Sarwat, <http://www.ahmadsarwat>, op cit

pengikut mazhab Maliki telah menyatakan terus terang tentang adanya wakaf manfaat, seperti wakaf manfaat rumah yang disewa.

Secara historis, wakaf yang dikenal paling tua adalah suatu bentuk yang tetap dan layak yang terdiri dari tanah, lahan, atau kebun. Setelah itu, para ahli hukum Islam setuju bahwa harta wakaf itu bisa berbentuk harta yang tidak bergerak.<sup>123</sup> Jenis harta benda tidak bergerak tersebut bisa digunakan misalnya peralatan ternak dan pertanian, koran untuk bacaan di masjid, kuda perang, unta, pedang, dan lemari uang untuk pinjaman bagi orang miskin.

Harta wakaf memiliki dua ciri, yaitu berbentuk harta-harta yang nyata dan bisa digunakan meskipun tidak bisa dikonsumsi atau harta apa saja. Wakaf dilihat dari jenis bendanya juga dapat mencakup:<sup>124</sup>

1. Benda tidak bergerak, meliputi bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain berkaitan dengan tanah, hak milik atas rumah susun.
2. Benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan peraturan syariah atau ketentuan lainnya.

<sup>123</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Outline of Muhammadan Law*, Oxford University Press, Bombay, India, hal. 291

<sup>124</sup> Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung, hal. 411



## B. Perkembangan Wakaf Tunai dalam Sejarah Hukum

Wakaf pertama kali terjadi dalam Islam ialah wakaf dari Umar r.a. At-Tirmidzi berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat antara para sahabat dan ulama terdahulu tentang kebolehan wakaf tanah. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathu Al-Bari* menyatakan, bahwa hadis Umar inilah yang merupakan awal mula disyariatkannya wakaf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Umar, dia mengatakan: awal mula wakaf di dalam Islam ialah wakaf yang dilakukan oleh Umar.<sup>125</sup>

Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa wakaf itu hanya khusus ajaran Islam yang tidak dikenal pada masa jahiliah.<sup>126</sup> Sebagaimana diketahui bahwa wakaf secara umum telah dimulai pada zaman Rasulullah saw di mana banyak sekali riwayat dalam hadist mengenai telah dilakukannya wakaf pada masa Rasulullah saw masih hidup. Abu Thalhah seorang sahabat setelah mendengar ayat dari surat Ali-Imran: 92. Ia kemudian ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya berupa kebun di Birha.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Apabila manusia wafat. Terputuslah amal perbuatannya. Kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak saleh yang mendoakannya"*. (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah saw, sedekah jariah dengan wakaf bukan seperti wasiat memanfaatkan harta.

<sup>125</sup> Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, 1994, *Nailul Authar*, Jilid ke-6, Cet. ke-1, alih bahasa Adib Bisri Musthafa, et al., CV. Asy-Syifa', Semarang, hal. 228

<sup>126</sup> Sayid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, As-Shan'ani Al-Ma'ruf, op cit., hal. 311

wakaf, bila memang tidak diserahkan oleh si pemberi wakaf, yang berhak dan berkewajiban adalah nadhir wakif.

- d. Menurut hukum Indonesia, penunjukan nadhir wakif dikuatkan dengan sebuah akta wakaf. Bila berbentuk sebidang tanah yang lebih kuat adalah sertifikat tanah. Namun nadhir bukanlah pemilik, sehingga tidak berhak menjualnya, menyewakannya ataupun memanfaatkannya bila tidak sesuai dengan amanah yang diberikan.<sup>122</sup>

Dari berbagai pengertian wakaf yang diberikan di atas, maka wakaf secara umum mengandung makna sebagai pemberian harta benda untuk kepentingan agama dan sosial yang sifatnya abadi selama harta benda wakaf tersebut tetap ada, yang mana harta tersebut meskipun diserahkan kepada nadhir sebagai pengelolanya, namun pada hakikatnya harta tersebut telah diserahkan kepada Allah Swt sebagai pemiliknya.

Menurut Mundzir Qahaf, definisi tersebut mencakup wakaf abadi (tanah, bangunan) dan wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Pendapat ini disetujui oleh empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan wakif (pendapat para pengikut mazhab Maliki); juga mencakup jenis wakaf baru dan belum ada di zaman dulu seperti Wakaf hak yang bernilai uang dan Wakaf manfaat dengan berbagai macamnya. Pendapat

<sup>122</sup> Ahmad Sarwat, <http://www.ahmadsarwat>, op cit

pengikut mazhab Maliki telah menyatakan terus terang tentang adanya wakaf manfaat, seperti wakaf manfaat rumah yang disewa.

Secara historis, wakaf yang dikenal paling tua adalah suatu bentuk yang tetap dan layak yang terdiri dari tanah, lahan, atau kebun. Setelah itu, para ahli hukum Islam setuju bahwa harta wakaf itu bisa berbentuk harta yang tidak bergerak.<sup>123</sup> Jenis harta benda tidak bergerak tersebut bisa digunakan misalnya peralatan ternak dan pertanian, koran untuk bacaan di masjid, kuda perang, unta, pedang, dan lemari uang untuk pinjaman bagi orang miskin.

Harta wakaf memiliki dua ciri, yaitu berbentuk harta-harta yang nyata dan bisa digunakan meskipun tidak bisa dikonsumsi atau harta apa saja. Wakaf dilihat dari jenis bendanya juga dapat mencakup:<sup>124</sup>

1. Benda tidak bergerak, meliputi bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain berkaitan dengan tanah, hak milik atas rumah susun.
2. Benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan peraturan syariah atau ketentuan lainnya.

<sup>123</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Outline of Muhammadan Law*, Oxford University Press, Bombay, India, hal. 291

<sup>124</sup> Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung, hal. 411



## B. Perkembangan Wakaf Tunai dalam Sejarah Hukum

Wakaf pertama kali terjadi dalam Islam ialah wakaf dari Umar r.a. At-Tirmidzi berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat antara para sahabat dan ulama terdahulu tentang kebolehan wakaf tanah. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathu Al-Bari* menyatakan, bahwa hadis Umar inilah yang merupakan awal mula disyariatkannya wakaf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Umar, dia mengatakan: awal mula wakaf di dalam Islam ialah wakaf yang dilakukan oleh Umar.<sup>125</sup>

Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa wakaf itu hanya khusus ajaran Islam yang tidak dikenal pada masa jahiliyah.<sup>126</sup> Sebagaimana diketahui bahwa wakaf secara umum telah dimulai pada zaman Rasulullah saw di mana banyak sekali riwayat dalam hadist mengenai telah dilakukannya wakaf pada masa Rasulullah saw masih hidup. Abu Thalhah seorang sahabat setelah mendengar ayat dari surat Ali-Imran: 92. Ia kemudian ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya berupa kebun di Birha.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasul saw bersabda: *"Apabila manusia wafat. Terputuslah amal perbuatannya. Kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak saleh yang mendoakannya"*. (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah saw, sedekah jariah dengan wakaf bukan seperti wasiat memanfaatkan harta.

<sup>125</sup> Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, 1994, *Nailul Authar*, Jilid ke-6, Cet. ke-1, alih bahasa Adib Bisri Musthafa, et al., CV. Asy-Syifa', Semarang, hal. 228

<sup>126</sup> Sayid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, As-Shan'ani Al-Ma'ruf, op cit., hal. 311

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia mengatakan: *"Umar mengatakan kepada Nabi saw: 'Saya mempunyai seratus saham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya'. Nabi saw mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya dan jadikan buahnya untuk sabilillah"*.

Kalimat dalam hadis "kalau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Ini dikatakan oleh pengarang, bahwa yang dimaksud adalah jasa memanfaatkannya. Dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan: Umar menahan pokoknya dan mewakafkan buahnya. Sedang Umar bin Syabah meriwayatkan dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz yang mengatakan: *"Aku pernah bertanya mengenai permulaan Wakaf di dalam Islam. Orang-orang dari kaum Muhajirin mengatakan yaitu wakafnya Umar. Sementara orang-orang dari kaum Anshar mengatakan yaitu wakafnya Rasul saw"*.<sup>127</sup>

Para sahabat Rasulullah saw telah merespons ajaran berwakaf ketika Rasulullah saw masih hidup. Seperti respons Umar bin Khathab r.a. Jabir r.a. menyebutkan tidak seorangpun dari sahabat yang mempunyai kemampuan yang tidak ikut berwakaf. Respon tersebut sekaligus menjadi bukti kebenaran adanya ajaran-ajaran tentang wakaf. Ajaran wakaf dalam sejarah peradaban Islam (*tarikh al-hadlarah al-Islamiyah*) telah diakui sebagai bagian dari khazanah intelektual Islam (*at-turats al-Islami*) yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat majemuk.<sup>128</sup> Dengan demikian,

<sup>127</sup> Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, loc cit., hal. 228

<sup>128</sup> Duski Ibrahim, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan: (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan), op cit., hal. 7-8

dapat diketahui bahwa dalam sejarah Islam, ajaran, konsep, praktik, dan teori wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw, bahkan wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Dalam sejarah Islam, tercatat wakaf tunai (*cash waqf*) telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis*, wafat tahun 124 Hijriah memfatwakan dengan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang wakaf tersebut sebagai modal usaha dan menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Kebiasaan memberi yang terbaik dari yang dimiliki menjadi sebuah kebiasaan atau gaya hidup. Yaitu gaya hidup para intelektual, eksekutif, selebritis, dan seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadikan sedekah baik berupa infak atau wakaf akan menjadi berkelas dan tidak selalu identik dengan budaya recehan, seperti yang dilakukan para *salafush-shaleh* yang telah mewakafkan ribuan dinar, ratusan unta, kuda, emas, kebun, dan barang berharga lainnya.<sup>129</sup>

Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik dari Dinasti Umayyah, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadramiy yang memiliki perhatian besar terhadap wakaf. Ia lalu membentuk lembaga pengelola wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya yang berada di bawah pengawasan hakim di Mesir, Basrah, dan Irak. Lembaga wakaf

<sup>129</sup> Herman Budianto, Majalah FOZ, Edisi Feb-Maret 2007, Berwakaf Sebagai Gaya Hidup, [www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com), diakses 19 Agustus 2008



inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di negara Islam.

Sejak saat itu, lembaga wakaf berada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman sehingga wakaf dapat dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga pengelola wakaf yang disebut "*Shadr Al-Wuquf*". Lembaga ini bertugas mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.<sup>130</sup>

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat menggembirakan, wakaf tidak terbatas hanya pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Dinasti ini juga menjadikan harta milik negara yang berada di *Baitul Mal* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya, yaitu Dinasti Fathimiyah.

Wakaf secara umum berkembang luas terutama pada masa Pemerintah Amawiyah baik di Mesir, Syam (meliputi Palestina, Yordania, Syiria) dan daerah Islam lainnya. Banyak mujahidin (pejuang Islam) di daerah Islam menyumbangkan kekayaan mereka sebagai wakaf, baik tanah (pertanian, kebun) maupun bangunan. Di antara keberhasilan harta wakaf untuk pembangunan tercatat dalam sejarah, antara lain pada masa Pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid, Putri Zubaidah (istri Khalifah) membangun jalan raya dari Baghdad di Irak

<sup>130</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, op cit., hal. 9

sampai ke Mekah untuk memperlancar perjalanan jamaah yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Seluruh pembangunan jalan tersebut berasal dari harta wakaf yang dikelola oleh Putri.

Perkembangan wakaf di Timur Tengah juga ikut berperan nyata dalam kesejahteraan masyarakat terutama ekonomi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan masyarakat Islam. Melihat pada sejarah kejayaan Khilafah Turki Utsmani yang telah menguasai dunia selama 600 tahun, salah satu sumber utama penyebab kuatnya perekonomian mereka adalah karena wakaf tunai (uang). Wakaf tunai telah menjadi inspirasi kejayaan peradaban Turki.

Al Azhar Universitas Kairo di Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunis, dan Universitas Nizamiyyah di Baghdad bukanlah lembaga pendidikan yang *fully profit oriented* tetapi merupakan lembaga pendidikan yang lebih bercorak sosial yang pendanaannya tidak hanya mengandalkan sedekah dan infak masyarakat setempat, mereka bisa besar mampu bertahan selama berabad lamanya dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih dari seribu tahun dari seluruh penjuru dunia di mana salah satu sebabnya karena lembaga tersebut telah berhasil mengembangkan *cash waqf* sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan.<sup>131</sup>

Di Mesir, wakaf tunai sudah lama dipraktikkan. Universitas Al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf dengan cara mengelola gudang

<sup>131</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan Umat*, <http://www.muhammadsyafi'iantonio>, Senin, 4 Februari 2008



atau perusahaan di Terusan Suez, hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian, Pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam.<sup>132</sup>

Dalam perkembangannya sekarang ini, setelah keberadaan wakaf tunai (uang) diabaikan oleh kalangan intelektual Islam. Di beberapa negara yang berpenduduk muslim, objek wakaf tidak lagi didominasi dan tidak hanya terbatas pada aset tetap tetapi berkembang kepada uang dan surat-surat berharga lainnya. Berdasarkan catatan Murat Cizakza, konsep wakaf tunai telah diterima luas di negara-negara Islam (Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Iran, dan lain-lain) yang telah dikembangkan dan tidak terlepas dari peran MA. Mannan dari Bangladesh yang memopulerkan istilah Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*), yaitu dengan mendirikan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) berfungsi sebagai badan yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.<sup>133</sup>

Menurut Tulus, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, menyatakan bahwa wakaf tunai produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman. Hal mana mengingat perkembangan wakaf secara umum pascakolonial (Indonesia

<sup>132</sup> UGM., Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islam, <http://lebi.fe.ugm.ac.id/shirat/data>, diakses 5 Juni 2009

<sup>133</sup> Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 19 Desember 2007, Wakaf Tunai, ISBIR, <http://www.bimas-islam>, diakses 30 Agustus 2008



merdeka) tidak mengalami perubahan yang berarti, kegiatan wakaf kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Walaupun beberapa peraturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, akan tetapi Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal sejak kedatangan Islam di Nusantara yang identik dengan wakaf tanah dan kegunaannya terbatas pada ruang lingkup kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

Perkembangan wakaf di kemudian hari tidak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid, mushala, langgar, madrasah, pekuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Meski wakaf merupakan salah satu bentuk perwujudan keimanan dalam rangka beribadah kepada Allah Swt yang diwujudkan dalam bentuk benda untuk kepentingan publik yang sudah cukup dikenal di masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan dakwah Islam. Terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf, sehingga ibadah wakaf terus tersebar di bumi Indonesia baik pada masa dakwah pra-penjajahan, masa penjajahan, dan pasca-penjajahan.<sup>134</sup>

Menurut Tholhah Hasan, di Indonesia kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam

<sup>134</sup> Herman Budianto, Masa Depan Wakaf Indonesia, Majalah FOZ., Edisi Feb-Maret 2007, [www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com), diakses 19 Agustus 2008

di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama (penyampai dan pengajar Islam) juga memperkenalkan ajaran wakaf. Pada masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf.<sup>135</sup>

Wakaf yang telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di mana pun juga termasuk di Indonesia, dan lembaga wakaf ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat, di mana hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.<sup>136</sup> Menurut Terhar, lembaga hukum islam wakaf ini telah diterima (*gerecipeerd*) di banyak daerah di Nusantara ini dan yang disebut dalam istilah Belandanya, yaitu "*Vrome Stichting*".<sup>137</sup>

Kelembagaan serupa wakaf telah eksis sebelum Islam tersebar di Nusantara, akan tetapi mulai menonjol pada abad ke-19 yang ditandai oleh perkembangan madrasah dan pesantren khususnya di Pulau Sumatra dan Jawa. Bahkan, seiring perubahan zaman, angka pertumbuhan madrasah dan pesantren semakin tinggi,<sup>138</sup> realitas tersebut merupakan penanda bahwa filantropi Islam telah lama dipraktikkan di Indonesia.

<sup>135</sup> Tholhah Hasan, <http://bw.indonesia.net/index.>, op cit

<sup>136</sup> Dedi Supriyadi, op cit., hal. 407-408

<sup>137</sup> Abdurrahman H., 1994, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

<sup>138</sup> Dawam Rahardjo, 7-8 Januari 2002, Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Makalah Workshop Internasional "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", Wisma Haji Batam, tidak diterbitkan

Terdapat tiga sumber pengetahuan yang dikaji untuk dapat memahami keberadaan lembaga wakaf di Indonesia, yaitu:

1. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan *Al-Hadits* serta ijtihad para mujtahid. Kendatipun dalam Al-Qur'an tidak disebut soal wakaf seperti halnya dengan zakat, dari beberapa ayat Al-Qur'an para ahli menyimpulkan bahwa Allah Swt menghendaki adanya lembaga wakaf. Sunnah Rasulullah saw yang termaktub dalam *al-Kutub as-Sittah*, yaitu enam kitab hadis yang disusun oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i juga tidak menyebut perkataan wakaf. Yang dipakai adalah kata *habs*, sinonim dari wakaf.
2. Peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:
  - 1). Pemerintah Belanda:
    - a. Tahun 1905, dikeluarkannya surat edaran yang memerintahkan kepada Bupati untuk membuat daftar rumah-rumah ibadat umat Islam yang berada dalam daerah mereka masing-masing.
    - b. Tahun 1931, dikeluarkannya surat edaran yang juga menegaskan bahwa untuk mewakafkan harta kekayaannya, diperlukan izin Bupati untuk maksud wakaf dan tempat harta yang diwakafkan.
    - c. Tahun 1934, surat edaran yang mempertegas dan menambahkan ketentuan apabila terdapat persengketaan dalam masyarakat Islam tentang



pengadaan shalat Jumat.

- d. Tahun 1935, surat edaran mengenai wakaf, mengenai keterangan tentang maksud pendaftaran agar Bupati diberi kesempatan meneliti dan melihat daftar dalam pelaksanaan wakaf itu.

2). Pemerintah Indonesia (Departemen Agama Republik Indonesia):

- a. Tahun 1953, petunjuk mengenai wakaf.
- b. Tahun 1956, petunjuk mengenai wakaf yang bukan milik masjid dan prosedur perwakafan tanah.
- c. Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 2, bahwa hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49 ayat 3, bahwa perwakafan tanah milik diatur dan dilindungi dengan peraturan pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.

Menurut pendapat Kusuma Atmadja, bahwa sebelum Islam datang ke tanah air, telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang dikenal dengan nama Huma Serang di masyarakat suku Badui di Cibeo, Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok. Setelah Islam datang ke Indonesia, lembaga wakaf kemudian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial yang sangat potensial yang berkaitan erat bagi kesejahteraan umat Islam. Wakaf di Indonesia merupakan institusi keagamaan

yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf diakui keberadaannya oleh syariat (hukum Islam), dan wakaf termasuk salah satu jalan kebajikan baik terhadap keluarga maupun kepada orang lain.<sup>139</sup> Ridwan Al-Makassary berpendapat, bahwa wakaf umumnya dipahami oleh masyarakat Islam sebagai "penyerahan" benda untuk tujuan publik atau untuk tujuan agama semata seperti tanah untuk masjid atau makam, di samping tidak diragukan lagi adanya berbagai manfaat wakaf baik secara langsung maupun tidak langsung telah dirasakan oleh publik.<sup>140</sup>

Banyaknya wakaf benda tidak bergerak dapat diketahui dari data wakaf yang dimiliki Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa luas tanah wakaf di seluruh Indonesia sebanyak 1.566.672.406 m<sup>2</sup> yang terletak pada 403.845 lokasi.<sup>141</sup> Hal ini terkait dengan banyaknya tanah wakaf yang ada disebabkan pemahaman tentang wakaf pada umumnya yang selalu berhubungan dengan tanah dan bangunan (pesantren, masjid, madrasah, lokasi pekuburan) sehingga sebagian besar harta yang diwakafkan sekitar pada aset tetap atau benda tidak bergerak. Di belahan negara Islam lainnya di dunia yang disimpulkan dari berbagai kajian terhadap beberapa yayasan wakaf di Mesir, Suriah, Palestina, Turki, bahwa dalam rentang waktu antara tahun 1940-1947 bagian terbesar dari harta wakaf terdiri dalam bentuk real

<sup>139</sup> Syekh Manshur Ali Nashif, Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw., *Taajul Jaami'u lil Ushul fi Ahaadisi Rasul*, Jilid ke-2, Cet. ke-1, alih bahasa Bahrin Abu Bakar, Sinar Baru Al-Gensindo, Bandung, hal. 739

<sup>140</sup> Ridwan Al-Makassary, 21 Mei 2007, Merintis Jalan Menuju Wakaf Untuk Keadilan Sosial di Indonesia, <http://www.philanthropyfor>, diakses 21 Mei 2007

<sup>141</sup> Halal Guide Info, 5 September 2006, Tanah Wakaf Perlu Sertifikat, <http://www.halalguide.info>, diakses 5 Februari 2008

estate 93% dan dalam bentuk harta wakaf 7%.<sup>142</sup>

Terdapat perbedaan yang mencolok mengenai perkembangan perwakafan di Indonesia dibanding dengan negara-negara Islam lainnya. Meskipun sama-sama berupa wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, tetapi di Indonesia memerlukan biaya perawatan sedangkan pada negara-negara lain menghasilkan keuntungan dari aset wakaf tersebut. Tidak mengherankan bila kemudian aset-aset wakaf di negara tersebut dapat berdampak luas dan banyak memberikan manfaat, seperti di Turki yang mana tempat wisata sebagian besar merupakan aset wakaf.

Dilihat dari sisi *legal standing* dengan diundangkan oleh negara, Undang-Undang Perwakafan yang baru (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), maka perkembangan hukum wakaf tunai di Indonesia saat ini menggembirakan, meski aplikasinya di tengah masyarakat belum kelihatan marak dibandingkan dengan zakat. Di Indonesia, sekarang ini wakaf tunai mulai dikenal, ia adalah objek wakaf selain tanah, bangunan, dan lain-lain yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf tunai merupakan aset yang sangat bernilai dalam mengembangkan ekonomi umat. Dengan demikian, pengembangan wakaf tunai di tanah air menjadi begitu urgen bagi berbagai pihak yang terkait.<sup>143</sup>

<sup>142</sup>Agustianto, Produktif Untuk Kesejahteraan Umat, <http://agustianto.niriah.com/w>. diakses 30 Agustus 2008

<sup>143</sup> Hendra Khalid, 13 s/d 15 April 2004, Wakaf Tunai Upaya Mensejahterakan Umat, Makalah disampaikan pada Orientasi Perwakafan Mahasiswa Se-Jawa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia di Wisma Haji, Jakarta



Dalam perkembangan terkini, di Indonesia wacana tunai telah muncul dan menjelma secara nyata dalam produk-produk *funding* Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat. Contohnya, Wakaf Tunai Dompot Dhuafa Republika, Wakaf Tunai PKPU, dan Waktumu (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat-BMI. Perwujudan dan pengembangan wakaf tunai di Indonesia bermula dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZIS WAF), lebih lanjut oleh Dompot Dhuafa diperkenalkan pula apa yang dikenal dengan wakaf investasi dan sekaligus mendirikan Tabung Wakaf Indonesia sebagai lembaga pentadbir. Pengembangan wakaf melalui gerakan wakaf tunai ini juga sudah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti Badan Wakaf Universitas Islam di Yogyakarta dan banyak lagi lembaga-lembaga wakaf lainnya.

### C. Pendapat Pakar Hukum Tentang Wakaf Tunai (*Cash Waqf*)

Dari segi bahasa, wakaf tunai merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah *waqafan-nuquud*, dalam bahasa Inggris menjadi *cash waqf*. Dalam terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan dua istilah, yaitu wakaf tunai atau wakaf uang. Pengertian wakaf tunai yaitu penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau lembaga nadhir (pengelola wakaf). Ketentuan, hasil, dan manfaatnya digunakan untuk amal kebajikan sesuai dengan

syariat Islam dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya.

Pengertian uang dalam bahasa Arab disebut dengan kata "*nuqud*" yang merupakan jamak dari kata "*naq dun*", yang berarti uang kontan (*cash*).<sup>144</sup> Kata *naq dun* merupakan antonim kata *an-nasi'ah* yang berarti penundaan pembayaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah.<sup>145</sup> Menurut bahasa, uang memiliki tiga makna, yaitu:<sup>146</sup>

1. uang kontan (*cash*)
2. standar nilai
3. alat tukar-menukar

Dari segi sejarah lahirnya, uang bertujuan untuk mengatasi kesulitan pertukaran dengan sistem barter (barang dengan barang), maka dalam kegiatan perekonomian uang mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Uang sebagai alat tukar-menukar (*medium of exchange*).  
Dengan adanya uang, maka proses tukar-menukar (perdagangan) lebih mudah, cepat, dan lancar. Di samping itu, uang juga memberikan kemudahan

<sup>144</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, tt., Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Krapyak, Yogyakarta, hal. 2033-2034

<sup>145</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 979

<sup>146</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, op cit., hal. 67

kepada kita untuk menukarkannya dengan barang apa pun yang kita kehendaki sesuai dengan kebutuhan kita.

2. Uang sebagai satuan hitung/nilai (*unit of account*). Sebagai satuan hitung, artinya uang berfungsi sebagai standar satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai (harga) berbagi jenis barang.<sup>147</sup>

Di antara pendapat pakar hukum Islam mengenai hukum wakaf tunai (*cash waqf*), Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, berdasarkan pada kaidah hukum *Istihsan bi al-'urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Yaitu soal sah tidaknya mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan di satu tempat,<sup>148</sup> di mana wakaf uang dirham dan dinar sudah menjadi kebiasaan di Negeri Romawi.

Mazhab Hanafi berpendapat, hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks Al-Qur'an dan *Al-Hadits*). Dasar hukum mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a. yang artinya: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*". Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan

<sup>147</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, op cit., hal. 86

<sup>148</sup> An-Nawawi, 1996, *Al-Majmu*, Juz ke-16, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 277



uang) menurut mereka, ialah dengan menjadikan wakaf tunai modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*, sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Menurut Ibnu Abidin, menambahkan wakaf dirham dan dinar boleh diwakafkan apabila ditukar dengan barang tertentu yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama.<sup>149</sup> Semua ulama terdahulu mengatakan bahwa diperbolehkan wakaf tanah dan wakaf harta bergerak. Imam Malik dengan terang-terangan telah membolehkan wakaf uang, termasuk emas dan perak.<sup>150</sup>

Mazhab Syafi'i sebagian membolehkan wakaf uang, dengan dalil bahwa uang bisa dipinjamkan dan dimanfaatkan sebagai hiasan. Sebagian dari mereka tidak membolehkan dan ini pendapat yang paling kuat, dengan dalil bahwa tidak kekalnya uang menjadikan tidak kekalnya manfaat atas uang tersebut.<sup>151</sup> Menurut Al-Bakri hal tersebut dikarenakan dirham dan dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Sedang Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah.

Ulama mazhab Hambali belakangan mengatakan bahwa wakaf dinar dan dirham tidak boleh dan Wakaf yang bersifat sementara, hukumnya batal (tidak sah wakafnya),

<sup>149</sup> Mundzir Qahaf, op cit, hal. 95

<sup>150</sup> Mundzir Qahaf, op cit, hal. 83

<sup>151</sup> Syaikh Mustafa Az-Zarqa,, 1947, *Ahkam Al-Awqaf*, Jilid ke-1, Percetakan Universitas Syiria, Damaskus, hal. 330

demikian juga Wakaf manfaat.<sup>152</sup> Ibn Qudamah meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan Wakaf uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya.<sup>153</sup>

Di kalangan ulama fikih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persoalan yang masih diperselisihkan (*debatable, ikhtilaf*), ini disebabkan tidak terlepas dari tradisi yang lazim terjadi bahwa masyarakat kebanyakan mewakafkan pada harta tetap (*fixed asset*), dan pada penyewaan harta wakaf. Dari adanya pendapat fukaha yang menyatakan boleh dan tidaknya mewakafkan mata uang (uang), juga dipersoalkan pada apakah wujud uang tersebut setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula atau tidak.<sup>154</sup>

Perdebatan tentang unsur "keabadian" wujud uang setelah diwakafkan, pada dasarnya tidak terlepas dari pemahaman terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar bin Khathab, yaitu: "*tabanlah pohonnya dan seledakkan buahnya*". Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi (wafat 476 H/1083 M) petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan).<sup>155</sup>

Melihat pada salah satu penyebab mengapa perwakafan di Indonesia mengalami kemandekan, adalah

<sup>152</sup> Mundzir Qahaf, loc cit., hal. 95

<sup>153</sup> Ibn Qudamah, tt., *Al-Mughni wa Syahrul Kabir*, Dar Al-Kutub, Beirut, hal. 235

<sup>154</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Hal Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, op cit., hal. 98

<sup>155</sup> Abu Ishaq Asy-Syirazi, tt., *Al-Muhadzdzab dan Syarahnya, Al-Majmu'*, Zakaria Al Yusuif, Kairo, hal. 572

karena terciptanya paradigma di masyarakat bahwa wakaf selalu *fix asset* yang peruntukannya selalu untuk kegiatan sosial keagamaan. Namun, kebekuan perkembangan dan pemahaman terhadap wakaf mulai sedikit mencair ketika pada tahun 2001, M.A. Mannan, Ketua SIBL memberikan seminar di Indonesia mengenai *cash waqf* (wakaf tunai). Kemudian stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia ini mulai mengalami dinamisasi (2001) ketika beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ini ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Konsep ini (SBIL) menarik dan mampu memberikan energi baru untuk menggerakkan kemandekan perkembangan wakaf di Indonesia.

Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia menyambut baik dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang (*waqf an-nuquud*). Keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 M (28 Safar 1423 H), yang mengatur kebijakan mengenai:

1. Wakaf, yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya (pokoknya), dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Dari pengertian tersebut maka selain wakaf uang (*waqf al-nuqud, cash wakaf*) adalah tidak sah.<sup>156</sup>

<sup>156</sup> Ramli, 1984, *Nihayah Al-Muhroj ila Syarh Al-Minhaj*, Juz ke-5, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 357



2. Wakaf, adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Benda wakaf, adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>157</sup> Sehingga atas dasar pengertian ini bagi mereka bukan wakaf uang (*waqf al-nuqud, cash wakaf*) adalah tidak sah.
4. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, dan oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menerapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. Definisi wakaf tersebut berdasarkan pada argumentasi yang didasarkan pada hadits Ibn Umar: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)".<sup>158</sup>

Mengingat pada landasan hukum terhadap firman Allah Swt surat Ali Imran: 92, Al-Baqarah: 261-262; dan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Abu

<sup>157</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), op cit., Buku III, Bab I, Pasal 215 ayat (1, 4)

<sup>158</sup> Al-Mawardi, 1994, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz IX, tahqiq Mahmud Mathraji, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 379

Hurairah r.a., Ibnu Umar r.a., Rawi r.a., dan Jabir r.a..<sup>159</sup>

Memerhatikan pendapat fukaha:

1. Imam Az-Zuhri, bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf'alaihi*.<sup>160</sup>
2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi, bahwa membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a.<sup>161</sup>
3. Pendapat sebagian ulama mazhab As-Syafi'i, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam As-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).<sup>162</sup>
4. Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai.<sup>163</sup>
5. Pendapat dan pandangan rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui dengan memerhatikan maksud hadis, antara lain riwayat dari Ibnu Umar.

<sup>159</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, op cit

<sup>160</sup> Abu Su'ud Muhammad, 1997, *Risalah fi Jawasi Waqf Al-Nuquud*, Beirut, hal. 20-21

<sup>161</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 1985, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz ke-8, Dar Al-Fikr, Damsyiq, hal. 162

<sup>162</sup> Al-Mawardi, 1994, *Al-Hawi Al-Kabir*, tahqiq Mahmud Mathraji, Juz ke-9, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 379

<sup>163</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, hal. 16

6. Pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf.
7. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama (terakhir) Nomor: Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002.

Wakaf uang (tunai) memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan, bahwa:

- a. Wakaf uang (*cash wakaf waqf al-nuqud*), adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

#### **D. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia**

Politik hukum tentang wakaf secara umum di Indonesia telah ada semenjak pada masa kesultanan Islam di Indonesia (Sumatra, Jawa, dan Kalimantan), pada masa



Hindia Belanda dan masa kemerdekaan hingga sekarang ini. Pada zaman kemerdekaan masalah wakaf telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah melalui Departemen Agama. Selama 44 tahun sejak tahun 1960 dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/L.N.1960-104 T.L.N.2043, dan telah dikeluarkan berbagai undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri/Gubernur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah wakaf.

Khusus mengenai peraturan perundang-undangan mengenai wakaf mulai dari Rancangan Undang-Undang Wakaf pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sampai akhirnya diundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004. Di antara landasan hukum Indonesia mengenai wakaf, yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei Tahun 2002, Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Wakaf Tunai.

Kedudukan wakaf tunai secara hukum perdata Indonesia (*legal standing*), dapat diketahui dengan telah diundangkannya:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30, 31.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya (Pengelolaan Wakaf Uang) Pasal 15, 21, 22, 25, 26, 43.

Secara hukum Islam Indonesia, diperkuat dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sepanjang peraturan-peraturan hukum tersebut mengatur kepentingan-kepentingan umum atau kepentingan-kepentingan khusus, maka peraturan itu dapat dibagi ke dalam hukum publik dan hukum perdata. Pembagian tersebut telah dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus: *Publicum ius est, quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem; sunt enim quaedam publice utilia, quaedam priatim*. Demikian juga H. de Groot: *Alle wet is raeckende lands-stand, ofte byzonder burger-recht*.<sup>164</sup>

Pandangan mengenai pembagian dalam hukum publik dan hukum perdata tersebut ditolak oleh banyak orang. Menurut mereka, kriteria kepentingan umum sebagai lawan dari kepentingan khusus, tidaklah tepat untuk mengadakan perbedaan hukum dalam hukum publik dan hukum perdata. Terdapat dua keberatan diberikan terhadap kriteria tersebut di atas, bahwa:

1. Kepentingan umum menyangkut tiap-tiap peraturan hukum. Segala hukum ditujukan untuk kepentingan umum. Demikian

<sup>164</sup> Hitt. dkk., 2000, *Strategic Management*, tanpa penerbit, hal. 171

pula dengan hukum Perdata, bukan untuk memelihara kepentingan partikelir, melainkan untuk memelihara kepentingan segala orang. Pembentuk undang-undang harus selalu mengingat kepentingan umum dalam menetapkan peraturan-peraturan hukum. Contoh, peraturan hukum tentang hak milik dimasukkan ke dalam hukum Perdata, walaupun peraturan tersebut merupakan kepentingan umum.

2. Tidak mungkin dapat ditarik batas yang tajam, antara kepentingan umum dengan kepentingan khusus. Istilah tersebut menyatakan 'gambaran yang sangat samar-samar', dan karena itu tidak dapat dipakai sebagai kriteria untuk pembedaan hukum dalam hukum Publik dan hukum Perdata.<sup>165</sup>

Sistematika hukum perdata menurut Zaeni Asyhadie diketahui dari kesimpulan pengklasifikasian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat, yaitu:

1. Hukum Publik, terdiri dari hukum pidana, hukum pajak, hukum tata negara, hukum internasional, dan lain-lain.
2. Hukum Privat, adalah hukum perdata dibagi menjadi:
  - a. *Lex Specialis* hukum Perdata; hukum dagang/hukum bisnis, hukum perburuhan, hukum perkawinan, hukum agraria/

<sup>165</sup> Hitt, dkk., *ibid.*, hal. 172, 177



- pertanahan, hukum waris, dan lain-lain.
- b. Sistematika menurut KUH-Perdata; hukum perorangan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum pembuktian & daluarsa.
  - c. Sistematika menurut ilmu pengetahuan; hukum perorangan (*persoon recht*), hukum keluarga (*famillierecht*), hukum harta kekayaan (*vermogen recht*) dan hukum waris (*erfrecht*).<sup>166</sup>

Hukum diartikan sebagai kaidah atau norma. Kaidah atau norma ini merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Atas dasar ruang lingkupnya, biasanya dibedakan antara kaidah yang mengatur kepentingan pribadi dengan kaidah yang mengatur kepentingan antarpribadi. Kaidah hukum tergolong pada kaidah yang mengatur kepentingan-kepentingan antarpribadi. Selain itu, maka hukum juga diartikan sebagai tata hukum, tata hukum tersebut adalah hukum positif yang tertulis.<sup>167</sup>

Para sosiolog biasanya mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau ajek. Artinya, perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kedamaian tersebut merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, yang di satu pihak

<sup>166</sup> Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ed. ke-1, Cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11

<sup>167</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 43

merupakan kepentingan umum dan di lain pihak merupakan kepentingan pribadi. Arti yang mungkin diberikan kepada hukum, adalah:

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaedah atau norma;
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
5. Hukum dalam arti petugas (*law enforcement officer*);
6. Hukum dalam arti keputusan penguasa;
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. Hukum dalam sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur;
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.<sup>168</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjabarkan ketentuan-ketentuan mana saja dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi.<sup>169</sup> Di antara pasal-pasal yang masih berlaku penuh, adalah pasal tentang benda bergerak (Pasal 505, Pasal 509, Pasal 518), dan pasal tentang penyerahan benda bergerak (Pasal 612, Pasal 613). Secara umum dapat dikatakan bahwa sistematika hukum kebendaan Indonesia adalah:

<sup>168</sup> Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cet. ke-3, Rajawali, Jakarta, hal. 366

<sup>169</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta

1. Hukum Kebendaan *Material*, dibagi ke dalam:
  - a. Benda bergerak, yang dibagi ke dalam:
    - 1) Benda bergerak yang berwujud (diatur dalam Buku II KUH Perdata);
    - 2) Benda bergerak yang tidak berwujud (diatur dalam Buku II KUH Perdata, khusus mengenai Saham atas nama sebagai benda dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Efek sebagai benda dapat ditemukan pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
  - b. Benda tidak bergerak, yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam:
    - 1) Benda tidak bergerak berupa Tanah dan Hak atas Tanah, beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
    - 2) Benda tidak bergerak selain Tanah dan Hak atas Tanah.
2. Hukum Kebendaan *Immaterial*, dibagi ke dalam:
  - a. Rahasia Dagang.
  - b. Desain Industri.
  - c. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - d. Paten.
  - e. Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal, dan indikasi geografis.
  - f. Hak Cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta.<sup>170</sup>

<sup>170</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (Dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*, Cet. ke-1, Edisi ke-1, Kencana, Jakarta, hal. 7-8



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa:

- Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499).
- Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh (Pasal 503).
- Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut (Pasal 504).
- Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan, atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan bilamana karena dipakai menjadi habis (Pasal 505).

Benda secara teoretis, masih dapat dibedakan ke dalam benda dalam lalu lintas perdagangan dan benda di luar lalu lintas perdagangan. Yang dinamakan dengan benda di luar lalu lintas perdagangan adalah benda yang tidak dapat diperjual-belikan oleh karena benda tersebut, adalah:

1. Benda yang dilarang untuk diperjual-belikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya candu, atau opium; atau;
2. Benda tersebut adalah benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dan tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan. Benda-benda ini pada umumnya dimiliki oleh negara, tetapi

tidak dapat dipergunakan oleh negara di bidang hukum perdata; atau;

3. Benda tersebut adalah benda yang karena sifatnya tidak mungkin dimiliki, seperti misalnya udara bebas, air di laut; walau demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dengan suatu upaya atau cara tertentu, misalnya udara tersebut kemudian dimurnikan O<sub>2</sub>-nya, atau air laut tersebut kemudian dikelola lebih lanjut, maka udara dan air tersebut dapat menjadi milik seseorang yang dapat diperjual-belikan secara ekonomis. Benda yang disebutkan terakhir ini pada mulanya adalah benda yang tidak dimiliki atau *resnullius*.<sup>171</sup>

Meski tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wakaf dapat dikategorikan ke dalam hukum benda yang mengatur tentang benda pada umumnya, macam-macam benda, hak-hak kebendaan, dan hukum waris. Benda dapat dibedakan antara benda bertubuh dan benda tidak bertubuh.

Hukum membagi benda terdiri dari beberapa macam, yang terpenting adalah pembagian benda atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini penting karena masing-masing benda tersebut akan berakibat pula dalam hukumnya, terutama berkaitan dengan cara penyerahannya. Ada beberapa macam hak kebendaan yang dikenal, yaitu:

<sup>171</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, op cit., hal. 22

1) Hak milik (*egendom*). Dan terdapat beberapa cara memperoleh hak milik, yaitu:

- penemuan (*bezetting*);
- ikutan (*successie*);
- kedaluwarsa (*verjaring*);
- pewarisan;
- penyerahan (*levering*). Terdiri kepada jenis benda, yaitu benda bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijk levering*) dan penyerahan benda bergerak tidak bertubuh dilakukan sesuai dengan jenis bendanya (piutang tanpa nama dan piutang atas nama).

2) Hak kedudukan berkuasa (*bezit*).

3) Hak kebendaan yang memberikan jaminan.<sup>173</sup>

Wakaf benda bergerak (wakaf tunai) masuk ke dalam kategori penyerahan (*levering*), karena jenis benda bergerak yang berwujud tunai/uang dilakukan melalui cara dengan penyerahan nyata dari wakif kepada nadhir. Pengertian *levering*, yaitu pemindahan tangan/penyerahan suatu barang atau hak atas barang.<sup>173</sup> Pengertian lain dari *levering*, yaitu hal menghasilkan/menyerahkan/menyampaikan; barang yang dihasilkan/diserahkan/disampaikan.<sup>174</sup> Wakaf tunai disamakan (*qiyas*) dengan *levering* karena benda bergerak berupa wakaf tunai diserahkan untuk dikelola sehingga menghasilkan

<sup>173</sup> Soerjono Soekanto, 2006, op cit., hal. 13

<sup>175</sup> Rudi T. Erwin, et al., 1983, Kamus Hukum, Cet. ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hal. 103

<sup>174</sup> S. Wojowasito, op cit., hal. 371



keuntungan yang peruntukannya untuk keagamaan/publik.

Berkaitan dengan wakaf tunai dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu:

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan; dan
2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dalam konteks ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapa pun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan/atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang lain (lihat tentang perbuatan melawan hukum). Termasuk pula di dalamnya untuk membebaskan, meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan, atau menggunakan benda tersebut sebagai jaminan utang.<sup>175</sup>

<sup>175</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, op cit., hal. 138-139

Dan cara untuk memperoleh hak milik atas benda ialah:

1. Cara *Originair* Pihak yang memperoleh hak milik atas benda tidak menerimanya dari tangan pihak pendahulu. Pihak yang memperoleh hak milik tersebut memulai dengan suatu hak yang baru, yang bebas dari beban dan kewajiban, tanpa hak dan wewenang. Misalnya pendakuan, perdekatan, dan kedaluwarsa.
2. Cara *Derivatif* Pihak yang memperoleh hak milik atas benda menerimanya dari seorang pendahulu (*voorganger*). Cara *derivative* ini dapat:
  - a. Dengan dasar hukum umum (*algemene title*). Penerima hak menerima benda secara keseluruhan (*massa*), dengan hak dan kewajiban yang melekat pada benda tersebut. Misalnya, percampuran harta perkawinan (*boedel menging*), pewarisan, dan perolehan benda dari badan hukum yang bubar. Badan hukum hasil penggabungan (*merger*) atau hasil peleburan (*konsolidasi*) memperoleh hak milik atas benda dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada benda tersebut, dari badan hukum yang bubar karena merger atau konsolidasi.
  - b. Dengan dasar hukum khusus (*bijzondere title*), yaitu penerimaan hak milik atas benda tertentu. Misalnya dengan cara penyerahan, kedaluwarsa, dan pencabutan hak (*onteigening*) yang disertai dengan pemberian hak baru.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 584 menyatakan hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan

(pendakuan), karena perlekatan, karena kedaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Ketentuan pasal di atas dapat diketahui 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu:

1. Dengan cara pendakuan;
2. Dengan cara perlekatan;
3. Karena kedaluwarsa;
4. Karena pewarisan;
5. Penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan diserahkan hak miliknya tersebut.<sup>176</sup>

Kelima cara perolehan hak milik yang diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, penyerahan merupakan pelaksanaan dari ketentuan terakhir yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.<sup>177</sup>

Ketentuan tersebut diketahui dari adanya dua syarat perolehan hak milik berdasarkan penyerahan, yaitu adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dan

<sup>176</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, op cit., hal. 42

<sup>177</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, op cit., hal. 181



dilakukannya penyerahan itu sendiri. Hakikat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu.

Wakaf tunai dapat dikategorikan sebagai penerimaan hak milik atas benda tertentu/kepemilikan hak atas benda tertentu, melalui cara derivatif dengan dasar hukum khusus (*bijzondere title*). Karena penyerahannya berupa uang tunai untuk dikelola berdasarkan perjanjian yang dibuat dalam akta ikrar wakaf.

## 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pemerintah memperkuat fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dengan pertimbangan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 ayat 1). Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat 2). Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat 4).

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah (Pasal 2). Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya (Pasal 4). Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 5). Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nadhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf (Pasal 6).

Ketentuan mengenai harta benda wakaf, yaitu harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Pasal 15). Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (Pasal 16). Berkaitan dengan wakaf tunai, maka ia termasuk dalam kategori benda bergerak, maka benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang,
- b. logam mulia,
- c. surat berharga,
- d. kendaraan,
- e. hak atas kekayaan intelektual,

- f. hak sewa, dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16).

Sehubungan dengan manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan keagamaan, sosial, dan ekonomi publik, maka dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah,
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22).

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf (Pasal 23 ayat 1). Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nadhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (Pasal 23 ayat 2).

Menurut Undang-Undang Wakaf ini, bahwa:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28).



2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis (Pasal 29 ayat 1).
3. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (Pasal 29 ayat 2).
4. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 ayat 3).
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nadhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (Pasal 30).
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 31).

Mengenai harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (Pasal 40). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 41 ayat



- 1). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 41 ayat 2).

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia menurut Undang-Undang Wakaf, yaitu:

1. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (Pasal 47 ayat 1). Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independent dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 47 ayat 2).
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu (Pasal 49 ayat 2).
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memerhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia (Pasal 50).

Tugas Badan Wakaf Indonesia menurut Undang-Undang Wakaf, yaitu:

1. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48).
  - a. melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,



- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional,
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf,
  - d. memberhentikan dan mengganti nadhir,
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (Pasal 49 ayat 1).
2. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 55 ayat 1).
  3. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55 ayat 2).
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55 ayat 3).
  5. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (Pasal 56).

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit *independent* dan disampaikan kepada Menteri (Pasal 61 ayat 1). Laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat (Pasal 61 ayat 2). Ketentuan pidana terhadap pelanggaran, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 67 ayat 1).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Pasal 67 ayat 2).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 67 ayat 3).

Ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagai berikut:

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 (Pasal 68 ayat 1).
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis,
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah,
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW (Pasal 68 ayat 2).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat 3).

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang**

Hal yang paling penting adalah agar Undang-Undang Wakaf ini dapat berfungsi dengan baik maka memerlukan perangkat lain, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang (PMA.WU) yang menjadi juklak dalam implementasinya, dan diperlukannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai sentra nadhir wakaf. Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf dan Keputusan



Menteri mengenai Pembentukan BWI dan keanggotaannya pada bulan Juni 2007 dengan diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M/2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Periode 2007 s/d 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mendefinisikan wakaf secara umum, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 ayat 1). Wakif adalah pihak yang yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat 2). *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Pasal 1 ayat 5).

Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah (Pasal 1 ayat 9). Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Pasal 1 ayat 10). Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga *independent* dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 1 ayat 11).

Apabila nadhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar

ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW (akta ikrar wakaf), maka pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 12 ayat 1).

Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nadhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenadhirannya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memerhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat (Pasal 12 ayat 2). Dan apabila nadhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nadhir (Pasal 12 ayat 3).

Jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang (Pasal 15). Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Pasal 23). Adapun LKS-PWU bertugas untuk:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang;

- c. menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nadhir yang ditunjuk wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nadhir (Pasal 25).<sup>178</sup>

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS penerima wakaf uang;
- b. nama wakif;
- c. alamat wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama nadhir yang dipilih;
- h. alamat nadhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang (Pasal 26).<sup>179</sup>

<sup>178</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang

<sup>179</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang, ibid



Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nadhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU (Pasal 27). Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas wakif;
- b. nama dan identitas nadhir;
- c. nama dan identitas saksi;
- d. data dan keterangan harta benda wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf; dan
- f. jangka waktu wakaf; (Pasal 32 ayat 4).<sup>180</sup>

Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing (Pasal 32 ayat 5).

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI (Pasal 45). Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang, bahwa:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

<sup>180</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang, ibid

- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. (Pasal 48).<sup>181</sup>

<sup>181</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang, ibid

### III

## PENGEMBANGAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM FILANTROPI

### A. Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum

#### 1. Hukum Islam

Pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada perseroan terbatas dalam Islam, alasan yang dikemukakan bahwa secara prinsip Islam tidak mengenal konsep perseroan dalam pengertian perseroan sebagai sebuah legal entity, di mana terdapat lima karakter utama sebuah korporasi seperti yang dikemukakan oleh Henry Hansmann dan Reinier Kraakman (2004), yaitu *legal personality*, *limited liability*, *transferable shares*, *delegated management with a board structure*, dan *investor ownership* yang merupakan karakter hukum yang sangat asing bagi Islam.<sup>182</sup> Contoh *legal personality* adalah konsep yang *a historis* dan tidak ditemukan presedennya dalam tradisi hukum Islam. Dalam Islam relasi hukum yang berlaku hanyalah relasi antarpribadi (*natural person*) atau *bablumminannas* dan pribadi dengan Tuhannya (*bablumminallah*).

Yang menjadi persoalan sekarang berdasarkan kenyataan yang ada hingga saat ini, terdapat kekosongan literatur Islam dalam masalah perseroan terbatas/ perseroan

<sup>182</sup> Andi Safrani, Perseroan Terbatas Syari'ah?, <http://www.assyafrani@yahoo.com>. Andi Safrani, diakses 25 Agustus 2008



terbuka versi Islam. Absennya diskursus *legal personality* dan lebih umum lagi masalah perseroan terbatas dalam Islam pada dasarnya amat dimaklumi, mengingat inovasi hukum ini baru muncul pada masa modern di belahan dunia Barat. Dikarenakan tingginya arus perdagangan antarnegara sejak tahun 1600-an, sebagaimana dicatat oleh Timur Kuran (2009), bahwa mengawali masa terinstitusionalisasinya bisnis-bisnis di Eropa dan pada pertengahan akhir abad ke-19, Inggris memelopori pengembangan hukum korporasi dengan pertama kali melegalisasi Undang-Undang Perseroan *Companies Act* 1844. Konsep *legal personality* baru muncul belakangan dalam kasus klasik yang sangat terkenal, yaitu *Solomon V, Solomon dan Co.Ltd* tahun 1897, juga di Inggris.<sup>183</sup>

Berdasarkan kronologis sejarah di atas, tidak mengherankan jika kemudian dalam khazanah klasik intelektual Islam tidak ditemukan pergulatan wacana seputar perseroan terbatas dan juga konsep *derivatif* darinya seperti *legal personality*. Dalam catatan historis atas perseroan yang didirikan pertama kali pada dinasti Islam, adalah perseroan yang didirikan oleh Sultan Abdul Mecit pada masa Ottoman tahun 1851 yang bernama *Sirket-i Hayriye*. Mengikuti pendirian perusahaan ini, pada tahun 1908 Parlemen Ottoman mengeluarkan undang-undang tentang korporasi yang merupakan produk hukum tentang korporasi yang pertama dalam tradisi Islam.

Pada masa pasca Dinasti Ottoman melakukan transpalasi hukum perseroan terbatas dari Eropa, diskursus perseroan terbatas dalam Islam sama sekali tidak berkembang

<sup>183</sup> John Farrar, 2009, *Corporate Governance in Australia and New Zealand*, Oxford University Press, Oxford

dan bukan berarti dalam sejarah Islam perseroan terbatas sama sekali tidak ada, hal ini disebabkan faktor kejumudan (*stagnasi*) ijtihad (perkembangan pemikiran hukum Islam) yang sudah terjadi jauh hari sebelum keruntuhan khilafah Islam terakhir di Turki.

Perseroan terbatas belum ada peraturannya dalam khazanah dunia Islam, tetapi dasar perseroan tertera dalam:

1. Al-Qur'an:

- a. Surat Ali Imran: 12, "... maka mereka bersekutu dalam sepertiga harta ...."
- b. Surat Al-Shaad (30): 24, "... sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini."

2. Al-Hadits:

- a. Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa Aba Manhal pernah mengatakan, "Aku dan perseroku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit. Kemudian kami didatangi oleh Al-Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, "Aku dan perseroku, Zaid bin Arqam, telah mengadakan (perseroan). Kemudian kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami. Beliau menjawab, "Barangsiapa yang (diperoleh) dengan cara tunai silakan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) dengan cara kredit, silakan kalian kembalikan."
- b. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw, Allah berfirman (dalam hadis Qudsi): 'Aku ada pihak

ketiga dari dua orang yang melakukan perseroan. Selagi tidak ada pada keduanya saling berkhianat. Jika mereka saling berkhianat, maka aku lepas dari mereka'. (HR. Imam Abu Dawud) dan Imam Hakim menyatakan "shahihnya" hadis ini.<sup>184</sup>

- e. Dari Saib Al-Makhsumi r.a.: Bahwasanya Rasulullah saw adalah perseranya sebelum beliau diangkat sebagai Rasul Allah, maka setelah jatuh negeri Mekah, beliau bersahda, Selamat datang dengan sedekah dan perseroan. (HR. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah).<sup>185</sup>

Perseroan diterjemahkan dari bahasa Arab dengan kata *syirkah*, berasal dari kata *syarika* (*fi'il maadhi*), *yasyruku* (*fi'il mudhari'*), *syarikan/syarikatan* (*masburi/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau berserikat. Kata dasarnya tersebut boleh dibaca *syirkah*, boleh juga *syarikah*, tapi menurut Al-Jaziri dibaca *syirkah* lebih fasih.<sup>186</sup> Pengertian *syirkah* (perseroan) adalah kerja sama usaha atau bisnis dalam Islam. Secara etimologi (menurut asli bahasa Arab), *syirkah* berarti penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain.<sup>187</sup> Sedangkan menurut makna syariat, *syirkah*/perseroan adalah transaksi (suatu akad) antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh

<sup>184</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar As-Qalani, loc cit., hal. 439

<sup>185</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar As-Qalani, loc cit., hal. 439

<sup>186</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid ke-3, Ihyi At-Turats Al-'Arabi, Beirut, hal. 581

<sup>187</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, An-Nidham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, hal. 153



keuntungan.

*Syirkah* menurut mazhab Syafi'i diartikan sebagai syarikat dagang, yaitu dua orang atau lebih, sama berjanji akan bekerja sama dalam berdagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecil modal masing-masing mereka.<sup>188</sup> Ber-*syarikah* di sini diartikan juga dengan berkongsi.

Perserikatan dagang (*syirkah*) dalam hukum Islam, berarti percampuran antara satu harta dan benda lainnya sehingga sulit dibedakan. Dalam fikih, *syirkah* termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, dimaksud untuk menunjukkan sikap saling tolong-menolong yang saling menguntungkan. Definisi para ahli fikih (pakar hukum Islam) tentang *syirkah*, menurut:

1. Mazhab Maliki, *syirkah* adalah suatu izin untuk bertindak hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.
2. Mazhab Syafi'i, *syirkah* adalah adanya hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakatinya.
3. Mazhab Hanafi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.

Secara redaksional, definisi di atas berbeda, pada dasarnya esensinya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Apabila

<sup>188</sup> Idris Ahmad, op cit., hal. 106

akad *syirkah* telah disepakati maka semua pihak bertindak hukum dan mendapat keuntungan terhadap harta serikat itu.

Pemahaman yang berasal dari hadis yang ada dapat dipahami bahwa perseroan dalam sistem ekonomi Islam adalah perseroan keluarga bukan perseroan terbatas yang pemegang sahamnya dapat menyerahkan pengelolaan perusahaan pada direktur atau manajer yang digaji. Sebenarnya sistem ekonomi Islam berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara mayoritas berpenduduk agama Islam, namun dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, maka bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktik-praktik bisnis yang nonislami. Misal perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan serta dalam proses meningkatkan modal melalui pasar modal (bursa efek) dan sering pula terpaksa menerima asas-asas sistem kapitalisme yang tidak dikenal dalam hukum Islam.

Dalam hukum perusahaan di Barat, terdapat ketentuan bila perusahaan telah memenuhi semua ketentuan legal maka perusahaan tersebut dinyatakan telah berdiri dan sekutu akan menjadi bagian terpisah dari perusahaan, sebab perusahaan telah menjadi sebuah entitas legal dalam hak-hak tersendiri. Ini berarti sebuah perusahaan adalah sebuah entitas fisik seseorang dan dapat dikenakan pajak atas dirinya sendiri dan dapat diseret ke pengadilan bila melakukan kesalahan. Contoh, bila seseorang membawa Mc.Donald ke pengadilan, maka kekayaan para pemegang saham, pekerjanya, atau direktornya tidak akan ditahan dan orang-orang yang tidak terjangkau ini menyebut Mc.Donald berada dalam ujian.

Hal ini kontradiksi dengan hukum Islam, di mana bila perusahaan dibawa ke pengadilan maka sekutu perusahaan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bila di Barat perusahaan akan mengambil semua elemen personal di perusahaan itu, maka dalam kasus bila perusahaan jatuh bangkrut pemiliknya hanya akan kehilangan apa yang mereka investasikan tidak lebih dari itu dan semua yang memiliki piutang ke perusahaan tidak akan mendapatkan apa pun.

Terdapat perbedaan fundamental antara perusahaan dalam Islam dan perusahaan di dunia Barat. Struktur perusahaan di Barat tidak menyetujui aturan Islam mengenai struktur perusahaan. Hal ini membuat pembelian saham pada sebuah perusahaan menjadi batil (tidak sah secara hukum Islam) selama saham tersebut merepresentasikan bagian perusahaan.

Pendapat fukaha tentang hukum mengenai saham dalam Islam. Kata saham berarti saling memberi bagian (saham) perserikatan dagang dalam bentuk jual-beli sebagian modal perusahaan (saham) kepada masyarakat dengan ketentuan imbalan sebagai persentase modal yang diberikan.<sup>189</sup> Definisi saham menurut ulama fikih modern, adalah sebagian modal perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal masing-masing dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>190</sup>

<sup>189</sup> Republika, Kamis, 16 Oktober 2008, Jam 14.05.00, <http://www.republika.co.id/berita/8347/>, diakses Kamis, 19 Februari 2009, Jam 13.00.00

<sup>190</sup> Dahlan Abdul Aziz, et.al., op cit., hal. 16



Hadis yang menyatakan bahwa qiradh (saham) itu harus bersyarat yaitu: *"Dari Hakim putra Hizam r.a., ia berkata: Bahwasanya ia memberikan syarat kepada seseorang yang ingin menyerahkan hartanya sebagai saham, hendaknya ia mengatakan: Jangan kamu jadikan hartaku ini pada binatang, dan jangan kamu bawa ke laut, jangan pula kamu menyeberang sungai, bila kamu kerjakan sesuatu menyimpang dari itu, maka kamu harus mengganti hartaku ini."* (HR. Imam Darul Quthni). Rawi hadis ini kuat.<sup>191</sup>

Para ahli fikih modern mengemukakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad *musahamah* dapat diterima sebagai salah satu bentuk muamalah dalam Islam, yaitu:

1. Ijab kabul yang jelas.
2. Komoditas yang diperdagangkan oleh perusahaan bukan komoditas yang dilarang *syara'*.
3. Kedua belah pihak adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum.
4. Adanya persetujuan yang jelas tentang bagian masing-masing pemilik modal sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Keuntungan dan kerugian yang diderita perusahaan menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan persentase saham masing-masing.

Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram, yaitu

<sup>191</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar As-Qalani, op cit., hal. 453

bidang produksi minuman keras, bisnis babi, dan apa saja yang terkait dengan babi, jasa keuangan konvensional (bank dan asuransi), industri hiburan (kasino, perjudian, prostitusi, media porno), dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan jual-beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut.<sup>192</sup> Saham yang diperdagangkan di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal (transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya), maka menanam modal dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara *syar'i*. Dalil yang menunjukkan kebolehan adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.<sup>193</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi, jual-beli valuta asing dan saham diperbolehkan oleh Islam, baik transaksinya dilakukan di bursa valuta asing dan bursa efek maupun di tempat lain, karena transaksinya telah memenuhi syarat rukun jual-beli menurut hukum Islam.<sup>194</sup> Menurut Abdurrahman Isa, bahwa jual-beli saham itu diperbolehkan oleh agama, termasuk saham-saham yang dikeluarkan oleh bank, sekalipun sebagian besar kegiatan bank itu untuk kegiatan perkreditan dengan sistem bunga, karena umat Islam dewasa ini dalam keadaan terpaksa (darurat).<sup>195</sup>

<sup>192</sup> Syahatah, dan Fayyadah, 2004, Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal, (*adh-Dhahbit asy-Syari'ah liat-Ta'amul fi Suq al-Auraq al-Maliyah*), alih bahasa A. Syakur, Pustaka Progresif, Surabaya, hal. 18

<sup>193</sup> Syahatah, dan Fayyadah, *ibid.*, hal. 17

<sup>194</sup> Masjfuk Zuhdi, 1991, Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam, Cet. ke-2, Ed. ke-2, Masagung, Jakarta, hal. 134

<sup>195</sup> Abdurrahman Isa, t.t., *Al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, Maktabah Mukhalmir, Mesir, h. 70-73, dalam Masjfuk Zuhdi, 1991, Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam, Cet. ke-2, Ed. ke-2, Masagung, Jakarta, hal. 135-136

Para fukaha (Taqiyuddin An-Nabhani, Yusuf As-Sabatin, Ali Ahmad As-Salus) yang tetap mengharamkan jual-beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha (perseroan terbatas) yang sesungguhnya tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya seharusnya yang dilihat lebih dahulu adalah bentuk badan usahanya. Apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami (*syirkah Islamiyah*) atau tidak.

Yang menjadi persoalan mendasar adalah aspek bentuk badan usaha (perseroan terbatas), apakah memenuhi syarat sebagai perusahaan Islam (*syirkah Islamiyah*) atau tidak? Hal ini betul-betul diabaikan oleh sebagian besar ahli fikih dan pakar ekonomi Islam saat ini, terbukti mereka tidak menyinggung sama sekali aspek krusial ini. Perhatian mereka lebih terarah/terfokus pada identifikasi bidang usaha (halal/haram), mekanisme transaksi yang ada, transaksi *spot* (kontan di tempat), transaksi *option*, transaksi *trading on margin*, dan sebagainya.<sup>196</sup>

Argumen yang diberikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa perseroan terbatas (*syirkah musahamah*), adalah bentuk *syirkah* yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hukum-hukum *syirkah* dalam Islam. Di antaranya, dalam perseroan terbatas tidak terdapat ijab kabul sebagaimana dalam akad *syirkah*. Yang ada hanya transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal

<sup>196</sup> Mpu Gandrink/KH. Shiddiq al-Jawi, 24 Maret 2008, Perdagangan Saham: Tinjauan Menurut Hukum Islam, <http://beningstock.com/?P=18>, diakses 24 Januari 2009



tanpa perundangan atau negosiasi apa pun baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya.

Menurut Shiddiq Al-Jawi, pendapat yang mengharamkan bisnis saham walau bidang usahanya halal adalah lebih kuat (*rajih*), karena lebih teliti dan jeli dalam memahami fakta khususnya yang menyangkut bentuk badan usaha (perseroan terbatas). Adapun pendapat pertama, sandaran hukumnya yang membolehkan bisnis saham asalkan bidang usaha perusahaannya halal, adalah *al-mashalih al-mursalah* sebagaimana analisis Yusuf Sabatin (p.53), padahal menurut Taqiyuddin An-Nabhani *al-mashalih al-mursalah* adalah sumber hukum yang lemah karena kehujahannya tidak dilandaskan pada dalil yang *qath'i* (pasti).

## 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Hal pertama yang dibicarakan dalam topik hukum perusahaan (*company law*), adalah apakah setiap aktivitas bisnis baik yang dikelola secara pribadi maupun yang telah berstatus sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional termasuk dalam kualifikasi perusahaan atau ada suatu kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai perusahaan? Untuk mengetahuinya terdapat satu rumusan tentang perusahaan yang dikemukakan oleh M. Smith dan Fred Skousen, perseroan (*corporation*) adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya, dan dapat

melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa.<sup>197</sup>

Perseroan dan perkumpulan para peserta berdiri, berdampingan satu bersama-sama guna mengejar suatu tujuan. Dalam hal apakah persetujuan perseroan dapat dikatakan bersifat timbal balik (*wederkerig*). Para penulis dan ahli hukum Belanda dan hakim tertinggi menganggap adanya sifat timbal balik, bahwa persetujuan yang bersifat timbal balik mengandung kewajiban tertentu dari masing-masing pihak, seperti halnya jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan lain-lain. Kewajiban masing-masing ini dititikberatkan pada kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Bila tercapai dalam hal perseroan mereka mendapat keuntungan benda, pihak yang dapat menikmati pemenuhan kewajiban itu, dan keuntungan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak lawan, melainkan juga bagi pihak yang memenuhi kewajiban itu. Ada dua unsur mutlak dari persetujuan perseroan, yaitu:<sup>198</sup>

1. masing-masing pihak harus memasukkan hal sesuatu dalam perseroan (*inbreng*).
2. maksud dari pemasukan ini, ialah untuk bersama-sama mendapat untung (*voordeel*) yang akan dibagi-bagi.

Secara normatif, rumusan tentang perusahaan terdapat dalam pasal 1 butir b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP), bahwa

<sup>197</sup> M. Smith, Fes Skousen, Akuntansi Intermediate, Jakarta: Airlangga, 1993, hal. 104

<sup>198</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1961, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet. ke-4, Sumur Bandung, Bandung, hal. 96

perusahaan, adalah *setiap bentuk usaha* yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (huruf miring tambahan Sentosa Sembiring). Menurut pengertian perusahaan tersebut cukup luas cakupannya karena terminologi perusahaan mencakup setiap bentuk usaha.

Bentuk usaha dalam kepustakaan hukum perusahaan oleh para ahli hukum pada umumnya dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:

1. Badan usaha berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas (nasional dan asing), koperasi, dan yayasan. Tanggung jawabnya terbatas pada sebesar modal yang dimasukkan.
2. Non-badan hukum, yaitu persekutuan perdata (*matschaap, partnership*), CV (perseroan komanditer), firma, dan usaha dagang/perusahaan dagang. Tanggung jawabnya tidak terbatas, artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan, aset pribadi para pemilik bisa disita terutama jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang perusahaan.

Letak perbedaan antara kedua jenis badan usaha tersebut pada tanggung jawab para pemilik perusahaan.

Di Indonesia dapat dijumpai beragam bentuk badan usaha yang sebagian besar adalah merupakan bentuk



badan usaha peninggalan zaman pemerintahan Belanda yang beberapa di antaranya telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia. Namun, masih ada sebagian yang masih menggunakan nama aslinya, misalnya firma dan CV (*commanditaire vennootschap*).<sup>199</sup> Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *maatschap*, firma disingkat Fa, dan *commanditaire vennootschap* yang disingkat CV.<sup>200</sup>

Bentuk badan usaha dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Perseroan terbatas atau PT;
2. Koperasi;
3. *Maatschap* atau Persekutuan;
4. VOF atau *vennootschap onder firma* atau Fa; dan
5. CV atau *commanditaire vennootschap*;

Perseroan terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi perseroan terbatas tidak dapat bertindak sendiri.<sup>201</sup> Untuk dapat bertindak dalam hukum, perseroan terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut. Organ-organ tersebut terdiri dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum). Jadi untuk dapat bertindak dalam hukum, perseroan terbatas tetap memerlukan orang perorangan untuk mewakilinya.

<sup>199</sup> Dhaniswara K. Harjono, 2006, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Edisi ke-1, Cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

<sup>200</sup> I.G. Rai Widjaya, 2003, Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Cet. ke-3, Editor Herman Sudrajat, Kesaint Blanc, Jakarta, hal. 1

<sup>201</sup> Widjaya, Gunawan, 2007, op cit., hal. 3

Di Indonesia ketentuan mengenai perseroan terbatas dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan berlakunya:

1. Buku I Bab III Bagian III pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847: 23).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971; (per tanggal 7 Maret 1996)
3. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen* (Stb 1939-569 jo. 717) (per tanggal 7 Maret 1999).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Ilmu hukum mengakui adanya tiga tingkatan penyertaan modal dalam suatu perseroan, yaitu membedakan modal perseroan terbatas ke dalam:<sup>202</sup>

1. Modal dasar (*authorized capital*), yaitu menunjukkan nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu perseroan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sekurang-kurangnya harus memiliki modal dasar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan catatan undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar.
2. Modal ditempatkan atau modal dikeluarkan atau modal yang diambil bagian (*issued capital*), yaitu menyatakan

<sup>202</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, op cit

komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi/disepakati untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk dimasukkan ke dalam perseroan terbatas sebagai tambahan dari modal yang dikeluarkan sebelumnya. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan, maka sekurangnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah harus diambil bagian oleh para pendiri perseroan terbatas pada saat pendirian, dengan ketentuan bahwa besarnya modal yang dikeluarkan tidak boleh kurang dari 35% dari seluruh modal dasar perseroan.

3. Modal disetor (*paid-up capital*), yaitu bagian modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum) yang disetorkan para pendiri atau pemegang saham dalam perseroan. Ini dapat dilihat pada neraca perseroan.

Ketentuan yang berkaitan dengan modal dasar perseroan, bahwa:

- Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat 1).
- Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat 1).
- Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh



(Pasal 33 ayat 1).

- Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat 1).

Cara penyetoran modal dalam perseroan terbatas, yaitu bahwa modal disetor perseroan terbatas dinyatakan dalam suatu jumlah atau nilai tertentu. Ini berarti secara umum, penyetoran dilakukan dengan uang tunai, dan harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran yang sah. Selain uang tunai, memungkinkan dilakukan penyetoran dalam bentuk lainnya, yaitu benda berwujud (Pasal 34 ayat 1). Penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan (Pasal 34 ayat 2).

Pada saat suatu perseroan terbatas pertama kali didirikan, modal perseroan adalah modal yang disetor oleh seluruh pendiri perseroan, sekurang-kurangnya harus berjumlah 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan dan diambil bagian oleh para pendiri perseroan terbatas. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasar modal adalah sebuah tempat modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (pihak investor) dan orang yang membutuhkan modal (pihak *issuer/emiten*) untuk mengembangkan investasi.<sup>201</sup>

<sup>201</sup> Muttaqin Hidayatullah, 20 Desember 2003, Telaah Kritis Pasar Modal Syariah, <http://www.e-syariah.org/jurnal/?p.>, diakses 24 Januari 2009

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, mendefinisikan pasar modal sebagai "kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek".

Saham bukan fakta yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasar modal sebagai tempat perdagangan dan juga terkait dengan perusahaan publik (perseroan terbatas) sebagai pihak yang menerbitkannya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal (*stock market*). Dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga (*securities*) seperti saham dan obligasi, *waran*, dan reksadana, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan, inilah yang disebut efek.<sup>204</sup> Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.<sup>205</sup> Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal, saham didefinisikan sebagai "surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatbald* Nomor 23 Tahun 1847).

Pengertian saham adalah bukti telah dilakukannya penyertaan penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas. Saham diterbitkan segera setelah perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, yaitu segera setelah perseroan terbatas disahkan

<sup>204</sup> M. Ali Hasan, 1996, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

<sup>205</sup> Junardi, 1990, *Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta

oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>206</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (1) menyebutkan, bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Saham, adalah bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang memberikan hak tagih atas sisa hasil pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan piutang atas nama; bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan (Pasal 36 ayat 1). Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan *peralihan karena hukum*, hibah, atau hibah wasiat (Pasal 36 ayat 2). Kepemilikan saham berdasarkan peralihan karena hukum ini diasumsikan dapat dengan adanya perbuatan hukum wakaf.

Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham

<sup>206</sup> Gunawan Widjaja, 2008, *op cit.*, hal. 27



dalam perseroan (Pasal 36 ayat 3). Dalam hal perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 36 ayat 4).

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memerhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48 ayat 2). Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang”, adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan.

Persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam *kuarom* yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan (Pasal 48 ayat 3).

Pemegang saham adalah pendiri perusahaan yang telah melakukan pengaturan modal dalam perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau setiap pihak yang membeli saham dari pemegang saham sebelumnya. Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya (Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 51).

Dan pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1), bahwa Pemegang saham mempunyai hak untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan di atas berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya (Pasal 52 ayat 2).

#### **B. Filantropi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/* Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)**

Ide filantropi perusahaan berlandaskan pada pemikiran bahwa tidak semua persoalan sosial kemanusiaan tertangani pemerintah, pengusaha, dan perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan juga sangat tergantung pada keberlangsungan hidup dan dukungan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Filantropi berasal dari bahasa Yunani, *philein* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia. Filantropi bisa dipahami sebagai seseorang yang mencintai sesama manusia. Esensi filantropi pada prinsipnya adalah pembicaraan tentang

persaudaraan terbaik manusia, maka membicarakan filantropi pada substansinya merupakan perbincangan tentang hakikat kehidupan manusia. Filantropi perusahaan, dengan sederhana bisa diartikan sebagai derma perusahaan untuk kemanusiaan.<sup>207</sup> Filantropi, juga berarti seseorang yang mencintai sesama (manusia). Bentuk kecintaan ini umumnya diwujudkan oleh manusia kaya yang membantu manusia lain yang miskin atau yang kekurangan. Tercakup dalam pengertian filantropi adalah semua kegiatan kedermawanan masyarakat seperti kegiatan menyumbang atau memberikan bantuan baik dilakukan oleh individu maupun oleh organisasi dan perusahaan.<sup>208</sup>

Telah terjadi perubahan paradigma (cara pandang) dalam dunia bisnis modern. Paradigma lama yaitu bisnis yang semula hanya bertujuan untuk mencari laba, telah berubah menjadi bisnis dengan paradigma yang memiliki misi yang lebih luhur, yaitu selain bertujuan mencari laba, bisnis juga memerhatikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Ali Darwin, menyimpulkan bisnis tidak hanya secara sempit dimaksudkan semata-mata mendapatkan keuntungan, namun juga harus berperan dan memberi kontribusi meningkatkan kehidupan dan memajukan masyarakat dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.<sup>209</sup>

Sri Redjeki Hartono, menjelaskan dalam hal ini dimaksudkan sebagai kegiatan ekonomi yang pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yang dilakukan legal,

<sup>207</sup> Andi Surugi/Ardhian Novianto, <http://www.ibl.or.id>, op cit

<sup>208</sup> Amil Zakat, 5 Januari 2007, Strategi Penggalangan dan Pendayagunaan Dana Filantropi Melalui LSM dan Organisasi Sosial, <http://amilzakat.blogspot.com/2007>, diakses 4 Agustus 2008

<sup>209</sup> Ali Darwin, t.t., Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia, *EBAR-Economic Business Accounting Review*, Ed. ke-3



dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>210</sup> Bisnis adalah kegiatan untuk memproduksi, menjual, dan membeli barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>211</sup> Tujuan bisnis bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga melayani kepentingan masyarakat. Bisnis yang baik selalu mempunyai misi yang luhur dan tidak sekadar mencari keuntungan, namun juga meningkatkan standar hidup masyarakat, menyejahterakan masyarakat, dan membuat standar hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhannya dengan baik.<sup>212</sup>

Sekarang orientasi bisnis yang tidak hanya berfokus pada laba tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, dikenal dengan istilah 3P (*profit, people, and planet*). Paradigma ini mengubah orientasi bisnis sebelumnya, yaitu 5P (*product, price, promotion, place, and profit*).<sup>213</sup> *Corporate social responsibility* pada dasarnya menghubungkan 3P yang dulunya dalam strategi bisnis dianggap tidak relevan dalam mendapatkan *profit* dan *benefit*. Konsep 3P, yaitu *people* (masyarakat/sosial), *planet* (bumi/lingkungan hidup), dan *profit* (keuntungan atau perusahaan), bahwa pembangunan sosial dan lingkungan hidup mempunyai korelasi positif dalam strategi bisnis demi mendapatkan keuntungan.

<sup>210</sup> Sri Redjeki Hartono, Nomor 2 Tahun 1995, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional (ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi Bisnis), Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

<sup>211</sup> Ketut Rindjin, 2004, Etika Bisnis dan Implementasinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 63

<sup>212</sup> Ketut Rindjin, ibid

<sup>213</sup> Atantya H. Mulyanto, 21 Januari 2007, Workshop "Enterprise Management in New Business Paradigma", Tanjung Enim

Pelaksanaan *corporate social responsibility* merupakan strategi bisnis yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan citra dan reputasi baik agar perusahaan menjadi unggul dalam kompetisi bisnis. Banyak perusahaan saat ini melakukannya dengan cara memasang iklan besar di surat kabar mengenai program *corporate social responsibility* mereka (filantropi dengan alasan komersial). Dengan cara itu maka perusahaan akan mendapat nilai tambah, yaitu bisnis akan berhasil dalam jangka panjang, tahan lama, dan berkelanjutan. Juga pelaksanaan *corporate social responsibility* akan mendukung tujuan perusahaan untuk meraih laba atau keuntungan, sehingga dalam hal ini tidak ada kontradiksi antara pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh perusahaan dengan tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba.

Tumbuhnya perhatian dunia usaha pada konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*corporate social responsibility*), didasarkan pada pandangan bahwa program sosial merupakan upaya timbal balik perusahaan kepada masyarakat. Masyarakat telah berkorban pada industri termasuk bila timbul akibat dampak negatif yang langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan yang menyerap sumber-sumber daya dan berpengaruh terhadap lingkungan.

Perusahaan swasta kini banyak yang mengembangkan *corporate social responsibility*, yaitu pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. Ada berbagai penafsiran tentang *corporate social responsibility* dalam kaitan aktivitas atau perilaku suatu

perusahaan, namun yang paling banyak diterima saat ini adalah pendapat bahwa yang disebut *corporate social responsibility* adalah yang sifatnya melebihi (*beyond*) laba, melebihi hal-hal yang diharuskan peraturan dan melebihi sekadar *public relations*.<sup>214</sup>

Sesungguhnya konsep *corporate social responsibility* sudah lama dikenal dalam dunia perbisnisan internasional. Kelahirannya tidak bisa lepas dari gelombang besar gerakan lingkungan hidup yang mulai memantik pada dekade 1960-an terutama konsep Pembangunan Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan tahun 1987. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan ini yang memengaruhi tata kerja bisnis yang ada termasuk dengan lahirnya *global impact* dan *corporate social responsibility*.

Dengan adanya aturan atau ketentuan khusus mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang baru, yang merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 ayat 3).

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal

<sup>214</sup> Anastasia Dwi Pebri Martanti, *Corporate Social Responsibility (CSR) Seharusnya Ikut Serta Perbaiki Perekonomian Bangsa*, Sinar Mas, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia



74 ayat 1). Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (Pasal 74 ayat 1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat 3). Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 74 ayat 4).

### C. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Di kebanyakan negara maju, penerapan *corporate social responsibility* pada korporasi bersifat sukarela karena ditunjang oleh kesadaran yang tinggi dari pelaku usaha serta regulasi yang mengatur aspek sosial dan lingkungan hidup terkait aktivitas bisnis sudah berjalan dengan baik. Namun di Indonesia mengambil jalan lain dengan mewajibkan *corporate social responsibility* dengan pertimbangan masih buruknya kesadaran pelaku usaha dalam bidang dan/atau terkait sumber daya alam dalam menerapkan tata kelola perusahaan (*corporate*



itu berada jauh di bawah Singapura yang menduduki posisi keenam dengan nilai 9,16; Malaysia (peringkat ke-36 dengan nilai 4,83); Thailand (peringkat ke-59), dan Filipina menduduki peringkat ke-69. Negara yang paling bersih dari korupsi adalah Finlandia dengan skor 10 (sempurna). Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil dengan baik bila tidak dilakukan langkah pencegahan, penindakan, dan pendidikan kepada masyarakat secara bersamaan.<sup>217</sup> Hal ini disebabkan dengan tidak berjalannya tata kelola perusahaan sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi ambruk dan menjadikan seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi tidak terkendalikan.

Penataan perekonomian Indonesia seyogianya dimulai dengan menjalankan konsep *corporate governance* dan berbagai aturan implementasinya (*code of best practice*) yang diadopsi dari negara-negara Barat, karena dalam hukum bisnis Indonesia model dan sistem *corporate governance* yang dianut oleh korporasi di Indonesia, dapat dianggap mengikuti pola kontinental Eropa dengan karakteristik sistem yang mengacu pada "*insider dominated control*" sebagaimana yang terdapat dalam model *bank-oriented system*.<sup>218</sup> Beberapa ciri yang mengacu pada sistem ini adalah:

- a. Undang-undang perusahaan di Indonesia diadopsi menurut "*French civil-law tradition*" dari Kontinental Eropa.

<sup>217</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan: Mengelola Kredit Berbasis *Good Corporate Governance*, Balairung & co., Yogyakarta, hal. 99

<sup>218</sup> Akhmad Syakhroza, 2005, *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta



- b. Digunakannya struktur dua dewan perusahaan (*two-tier board system*) sebagaimana juga ditemukan pada berbagai negara Kontinental Eropa.
- c. Terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, bahkan yang sudah *go public*, pada sekelompok orang.
- d. Dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa hutang (*external-bank financing*).
- e. Tidak likuidnya pasar modal dan tidak berjalannya mekanisme kontrol oleh pasar.<sup>219</sup>

OECD mendefinisikan *corporate governance* (penyelenggaraan korporasi atau tata kelola perusahaan) sebagai "*the system by companies are directed and controlled*". 5 prinsip tersebut adalah:

1. Keadilan (*fairness*), intinya bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas. Atau dengan kata lain memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

<sup>219</sup> Lukviarman, N., 2001, *Key Characteristics of Corporate Governance: The Case of Indonesia*, Working Paper, No.01-01, Graduate School of Business, Curtin University of Technology, Perth

2. Transparansi (*transparency*). Intinya adalah meningkatkan keterbukaan (*disclousure*) dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*). Dalam pengambilan keputusan, direksi dan dewan komisaris senantiasa berupaya mengetengahkan keterbukaan kepada para *stakeholders*, dengan lima karakteristik, yaitu *komprehensif, relevan, friendly, reliable dan comparable*.
3. Akuntabilitas (*accountability*). Intinya adalah terciptanya sistem pengendalian yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan diantara anggota direksi, pemegang saham, komisaris dan pengawas. Para komisaris direksi dan jajarannya wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk mnejalankan usaha sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, kewenangan *board of commissioners* dan *board of directions* diatur dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) perusahaan yang dilaksanakan secara konsekuen.
4. Tanggungjawab (*responsibility*), adalah bahwa selain bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris serta jajarannya juga bertanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya, termasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki

tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggung lingkungan dimana perusahaan berada.<sup>226</sup>

*Corporate social responsibility (CSR)* adalah prinsip *corporate governance (CG)* ibarat dua sisi mata uang, keduanya sama pentingnya tidak terpisahkan. Salah satu dari empat prinsip tersebut di atas yaitu *responsibility* (pertanggungjawaban), memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan ketiga prinsip lainnya. Di mana ketiga lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*) sehingga lebih mencerminkan *shareholders-driven concept*. Seperti perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (*fairness*), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (*transparency*), dan fungsi serta kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi (*accountability*).<sup>227</sup>

Prinsip *responsibility* menekankan kepada kepentingan *stakeholders* perusahaan. Perusahaan diharapkan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Prinsip *responsibility* lebih mencerminkan *stakeholders-driven concept*. Melihat pada sisi perkembangan konsep *corporate governance* dari dua pandangan, yaitu:

<sup>226</sup> Iman Sjahputra Tunggal, Iman Sjahputra Tunggal, 2002, *Implementasi Konsep Good Corporate Governance*, Harwardindo, Jakarta, hal. 295

<sup>227</sup> Republika, 20 Oktober 2006, *Corporate Social Responsibility (CSR) Salah Pahami GSE*, <http://www.republika.co.id>, diakses 6 Agustus 2008



1. Perspektif sempit. Bahwa konsep *Corporate Governance* merupakan konsep yang menitik beratkan pada keselarasan hubungan organ-organ perusahaan (pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi yang mengelola perusahaan), dikenal dengan nama "*shareholders model of governance*". Ada 2 isu, yaitu:
  - a. Permasalahan keagenan (*agency problem*).
  - b. Permasalahan kontrak yang tidak lengkap.
2. Secara luas. Bahwa konsep *Corporate Governance* merupakan konsep yang menitik beratkan pada tanggung jawab sosial yang diemban kepada sejumlah pemangku kepentingan, disamping pemilik/pemegang saham Yang meliputi para kreditor, konstituen-konstituen sosial (anggota masyarakat tempat perusahaan berlokasi, lingkungan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat), yang menekankan pada keberadaan perusahaan sebagai institusi yang harus dikelola untuk kepentingan publik. Dikenal dengan nama "*stakeholders model of governance*". Salah satu bentuknya, adalah *Corporate Social Responsibility*, ialah merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kepedulian kepada kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) melalui praktik-praktik bisnis yang sesuai dengan aturan, etika dan moral serta

melalui kontribusi dari sumber-sumber yang dimiliki perusahaan.<sup>222</sup>

Mengikuti perkembangan yang ada, kemudian peraturan perundang-undangan Indonesia memasukkan unsur *corporate sosial responsibility* ini ke dalam salah satu pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai suatu keharusan yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam laporan tahunan, perusahaan melaporkan kegiatan *corporate social responsibility* yang telah dilakukan.

Secara umum untuk memahami *corporate governance* dapat dikategorikan ke dalam dua paradigma yang secara prinsipil sangat berbeda, yaitu dari segi:

1. Perspektif pemegang saham (*shareholding*). Dianggap sebagai cara memandang korporasi secara "tradisional" yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dioperasikan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham *per-se* sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya.
2. Perspektif berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholding*). Baru marak dibicarakan pada akhir abad ke 20 dengan diperkenalkannya konsep *stakeholder theory* oleh Freeman (1984). Dari sudut pandang *stakeholding* perusahaan didefinisikan sebagai organ (*locus*) yang berhubungan dengan berbagai "pihak

<sup>222</sup> CGPI., <http://www.licg.org/index.>, op cit

yang berkepentingan" (*stakeholders*) lainnya yang berada, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dibandingkan dengan hanya memerhatikan "kepentingan" pemegang saham.<sup>223</sup>

Secara khusus semua setuju terhadap penerapan *corporate governance* dalam sebuah perusahaan karena praktik-praktik *governance* yang baik sangat dibutuhkan dalam membangun negara Indonesia secara terarah, kokoh, dan berkesinambungan. Karena konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*), adalah sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh mencakup aspek budaya, hukum, dan kelengkapan institusional lainnya berupa mekanisme yang didasarkan pada konsep pengendalian korporasi dan sistem akuntabilitas dari pihak yang memegang kendali.<sup>224</sup>

Maka konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*) ini dapat diterapkan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian wakaf tunai (aset) yang dijadikan modal untuk mendirikan perseroan terbatas, dibelikan saham pada perseroan terbatas tertentu, serta dana filantropi perusahaan (*corporate social responsibility*) yang dijadikan sebagai wakaf tunai perseroan terbatas dan/atau sebaliknya.

<sup>223</sup> Akhmad Syakhroza, op cit., hal. 13-14

<sup>224</sup> Blair, M.M., 1995, *Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century*, The Brooking Institution, New York



#### D. Perseroan Terbatas Sebagai Nadhir Badan Hukum Wakaf Tunai

Undang-Undang Perwakafan Indonesia menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya aset tetap (benda tidak bergerak) tapi juga dapat berupa aset tidak tetap (benda bergerak). Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16).

Juga diatur mengenai beberapa kebijakan perkawakafan di Indonesia dari pembentukan nadhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Pengertian nadhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>225</sup> Nadhir, berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadhar* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nadhir adalah *isim fail* dari kata *nadhar*, yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan yang lazim disebut dengan nadhir, adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.<sup>226</sup> Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang/badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Atau berarti juga orang atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas harta wakaf, baik mengurus,

<sup>225</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, op cit., Pasal 1 ayat (4)

<sup>226</sup> Mawardi Muhammad Sholeh, M., 4 Desember 2008, Wakaf Tunai Dan Implementasinya: Sebuah Paradigma Baru Wakaf di Indonesia Peranan Nadhir dalam Pengelolaan Wakaf, <http://fikridawa.blogspot.com>, diakses 19 Januari 2009

mengembangkan, memelihara, dan mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>227</sup>

Nadhir dalam kitab-kitab fikih disebut penguasa terhadap wakaf atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf. Itulah yang disebut dengan nadhir atau *mutawalli* atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik.

Dari pengertian nadhir di atas, bahwa dalam konteks perwakafan, nadhir memegang peranan dan tugas yang sangat penting yaitu membuat dan mempertahankan agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus. Untuk itu harta wakaf (wakaf tunai) harus dijaga, dipelihara, dikelola, dan dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan (wakaf tunai). Hasil penelitian wakaf oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta terhadap 500 responden nadhir di 11 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa:

- a. Wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan 66%, organisasi 16%, badan hukum 18%.
- b. Wakaf lebih banyak yang tidak menghasilkan 77%, wakaf menghasilkan/produktif 23%.
- c. Pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid 79%.

<sup>227</sup> Uswatun Hasanah, Nazhir Wakaf, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hal. 85

- d. Lebih banyak berada di wilayah pedesaan 59%, diperkotaan 41%.
- e. Nadzir yang bekerja secara penuh 16%, bekerja sambilan dan tidak digaji 92%.<sup>228</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa wakaf yang dikelola dalam bentuk badan hukum dan wakaf produktif relatif lebih sedikit daripada wakaf yang dikelola oleh perseorangan dan wakaf tidak produktif; dan pemanfaatan wakaf lebih banyak berupa sarana ibadah (masjid) dan kebanyakan terletak di pedesaan. Agar pengembangan dunia perwakafan di Indonesia lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan perlu peraturan pemerintah lebih lanjut mengenai hal ini.

Untuk itu diharapkan agar nadhir (pengelola wakaf) tidak di bawah naungan pemerintah dalam artian, para pengurus dan pengelola wakaf tidak diangkat, diberhentikan, dan digaji oleh pemerintah, seperti Pegawai Negeri Sipil. Tapi nadhir harus independen, ia tumbuh, berkembang, dari, oleh, dan untuk masyarakat/publik itu sendiri. Biarkan waktu yang dapat menyeleksi nadhir yang berbentuk perorangan/ organisasi/ lembaga/ badan hukum yang profesional dan *kredibel* di tengah masyarakat. Diharapkan kemandirian publik pada sektor agama, ekonomi, dan sosial dapat eksis sebagai mitra pemerintah untuk memajukan kehidupan masyarakat dan negara. Berdasarkan hasil riset dari PBB dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, menunjukkan bahwa rendahnya mutu pengelolaan Wakaf, karena rendahnya

<sup>228</sup> HM. Cholil Nafis, <http://www.pmiil.kom.fak.syahum.wordpress.com>, op cit



mutu nadhir. Maka untuk itu perlu pendidikan khusus untuk profesi nadhir ini sebagaimana profesi-profesi lain yang telah ada (dosen, pengacara).

Dengan tersedianya tenaga nadhir yang profesional, pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi publik, maka perlu pengelolaan wakaf tunai secara optimal oleh nadhir. Juga perlu suatu badan wakaf yang berskala nasional (Badan Wakaf Indonesia) yang berfungsi di antaranya untuk memberikan pertimbangan pengelolaan wakaf. Di samping itu, Badan Wakaf Indonesia berfungsi juga sebagai nadhir untuk pengelola wakaf produktif atau wakaf uang.<sup>229</sup>

Mengingat minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, tidak heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi hanya sebagian kecil lembaga wakaf (nadhir) saja yang mampu mengelola harta benda wakaf secara optimal, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>230</sup> Kesimpulan sementara berdasarkan hasil riset Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2005) menunjukkan, bahwa wakaf di Indonesia disinyalir tidak memainkan peranan yang signifikan dalam terealisasinya keadilan sosial. Kunci kelemahannya terletak pada nadhir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi

<sup>229</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hal. 95

<sup>230</sup> Tholhah Hasan, <http://bw.indonesia.net/index>, op cit

dengan baik dan kelemahan lembaga wakaf Indonesia terletak pada aspek manajemen yang belum modern.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa nadhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum (Pasal 9). Persyaratan perseorangan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a) dapat menjadi nadhir apabila:

- a. warga negara Indonesia,
- b. beragama Islam,
- c. dewasa,
- d. amanah,
- e. mampu secara jasmani dan rohani, dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 10 ayat 1).

Persyaratan badan hukum (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c) dapat menjadi nadhir apabila:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (Pasal 10 ayat 3).

Tugas nadhir adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Pasal 11).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) (Pasal 12).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nadhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 13). Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, nadhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 14 ayat 1). Ketentuan lebih lanjut mengenai nadhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat 2).

Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk hukum atau sering disebut sebagai badan hukum. Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 4). Mengenai status harta benda wakaf yang dikelola oleh nadhir ditetapkan, bahwa harta benda wakaf



harus didaftarkan atas nama nadhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya (Pasal 3 ayat 1). Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadhir tidak membuktikan kepemilikan nadhir atas harta benda wakaf (Pasal 3 ayat 2). Penggantian nadhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 3).

Kaitan dengan asumsi untuk menjadikan wakaf tunai sebagai modal mendirikan perseroan terbatas dan untuk membeli saham pada perseroan terbatas tertentu, dari sudut pandang hukum perseroan di Indonesia dapat dikatakan nadhir sebagai pemegang saham (pemilik saham). Tetapi karena berkaitan dengan asumsi tersebut di atas, hal ini menjadikan kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai hanya sebagai mewakili atau sebagai pengelola saham perseroan terbatas meskipun nama nadhir yang didaftarkan dalam akta ikrar wakaf (AIK) dan tercantum sebagai pemilik saham ketika perseroan terbatas tersebut didirikan atau ketika pembelian saham. Dengan demikian tidak menjadikan nadhir sebagai pemilik saham perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengenai bentuk nadhir (wakaf tunai) dapat berbentuk sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf Uang Pasal 2, bahwa nadhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Pasal 11 mengatur tentang ketentuan nadhir berbentuk badan hukum, yaitu:

- 1) Nadhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama

setempat.

- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nadhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- 3) Nadhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam,
  - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nadhir perseorangan,
  - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, dan
  - d. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang,
    2. daftar susunan pengurus,
    3. anggaran rumah tangga,
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf,
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, dan

6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf Uang Pasal 13, menyebutkan bahwa:

- 1) Nadhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) Nadhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan Peraturan Menteri.

Masa bakti nadhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali (Pasal 14 ayat 1). Pengangkatan kembali nadhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah Pasal 14 ayat 2).



Peraturan Pemerintah Pasal 32 mengatur mengenai tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf, adalah sebagai berikut:

- 1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nadhir di hadapan PPIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *mauquf'alah* dan harta benda wakaf diterima oleh nadhir untuk kepentingan *mauquf'alah*.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nadhir dalam AIW oleh PPAIW.
- 4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas wakif,
  - b. nama dan identitas nadhir,
  - c. nama dan identitas saksi,
  - d. data dan keterangan harta benda wakaf,
  - e. peruntukan harta benda wakaf, dan
  - f. jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal nadhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nadhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 6) Dalam hal nadhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nadhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Peraturan Pemerintah Pasal 45 mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diemban oleh nadhir, di mana:

- 1) Nadhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- 2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nadhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Wakaf Pasal 43 ayat (2), dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Asumsi mengenai wakaf tunai sebagai saham perseroan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka aspek pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan dengan cara pengelolaannya yang berbentuk badan hukum. Perseroan terbatas secara legal standing telah diakui secara

hukum negara dan bentuk pengelolaan manajemen bisnis ini banyak diminati oleh kalangan pengusaha meskipun secara modal dianggap cukup besar ketimbang bentuk-bentuk badan hukum bisnis lainnya yang telah ada dan berkembang di Indonesia.

Kendala yang ada, selama ini nadhir dalam mengelola harta wakaf tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola benda wakaf yang diamanahkan kepadanya. Kebanyakan nadhir hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan dalam konteks sebagai amal ibadah, tidak diberikan gaji tetap sebagai sebuah profesi yang menjanjikan sebagai pekerjaan tetap. Dengan adanya wacana wakaf tunai yang dijadikan sebagai saham dalam rangka pendirian perseroan terbatas atau membeli saham pada perseroan terbatas yang telah ada, dan filantropi perusahaan yang dijadikan sebagai dana wakaf tunai pada suatu perseroan terbatas.

Dengan adanya wacana ini diharapkan keberadaan nadhir bisa menjadi suatu profesi yang menjanjikan sebagaimana profesi-profesi lainnya, karena dari satu sisi nadhir mendapatkan haknya tidak lebih dari 10% dari keuntungan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dan bentuk wakaf-wakaf lainnya (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), dan yang bisa menjadi nadhir harus profesional dalam bidangnya dan mengerti tentang hukum perwakafan di Indonesia.



## IV

# KONSEP DAN PENDAPAT HUKUM TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM BENTUK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

### A. Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia

Keberadaan wakaf telah lama dilakukan di Indonesia, sejak diundangkannya Undang-Undang Wakaf tahun 2004 gaung wakaf tunai mulai menguak. Di berbagai masjid dan kegiatan filantropi Islam, wakaf tunai mulai disebut sebagai salah satu bentuk wakaf yang baru. Sebelumnya muncul berbagai pemikiran hukum mengenai kebolehan berwakaf tunai dengan menggunakan uang yang merupakan salah satu alat transaksi perekonomian di Indonesia. Melihat pada perkembangan, meski sebenarnya hukum Islam tidak dapat dikatakan sebagai sistem hukum yang mandek dan tidak pernah menampilkan sebuah keseragaman. Sebelum hukum Islam hendak diadopsi dalam unifikasi hukum nasional, persoalan yang pertama kali muncul justru di seputar masalah internal, yaitu mazhab (pemahaman hukum) yang mana yang akan diadopsi, atau hukum Islam menurut struktur pemikiran siapa yang akan diambil.<sup>231</sup>

<sup>231</sup> Kompas, 9 Oktober 2003, Ratno Lukita, Memahami Pro Kontra Revisi KUH Pidana, <http://www.unisosdem.org.kompas>, diakses 19 Juni 2009

Persoalan sosial religi terus menuntut perubahan, perombakan sistem hukum menjadi sangat penting karena studi perbandingan hukum secara teoretis maupun secara praktis, adalah bukan hanya untuk membandingkan satu sisi dari hukum saja akan tetapi demi tercapainya kualitas ilmu hukum (*legal standing*). Yang dilakukan pemerintah ini diakui sebagai salah satu langkah terbaik dalam memecahkan problem pluralisme hukum, karena dalam praktiknya hal itu tidak serta merta dapat membuahkan hasil positif, karena pada kenyataannya suatu tradisi hukum yang ada tidak pasif dan *rigid*, tetapi selalu bergerak sesuai dengan gerak perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah merupakan hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di persada Indonesia. Setelah kedatangan penjajah Belanda penerapan syariat Islam dipersempit dalam bidang keperdataan saja khususnya bidang hukum keluarga (pernikahan).<sup>232</sup> Adapun bidang hukum pidana dan bidang hukum yang lainnya hanya dapat diterima apabila telah diresepsi dalam hukum Adat sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Bumi Putera pada saat itu yaitu *Landraad*, dan Belanda mendirikan berbagai Peradilan Agama di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda di berbagai daerah, antara lain Kerapatan Qadi, Mahkamah Syariah, dan lain-lain.

Pada saat itu pemerintah jajahan Belanda menerapkan *adat recht politik*,<sup>233</sup> yaitu di Hindia Belanda membiarkan

<sup>232</sup> Rifyal Ka'bah, 1999, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yarsi, Jakarta, hal. 264

<sup>233</sup> Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesisinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta

hukum adat tetap berlaku bagi golongan Indonesia asli sedangkan bagi golongan Eropa berlaku hukum Belanda, demikian juga bagi golongan Cina dan Timur Asing berlaku hukumnya masing-masing kecuali mereka menyatakan tunduk pada hukum golongan Eropa. Dengan berlakunya pluralisme hukum di Indonesia saat itu, pemerintah Belanda menerapkan suatu hukum untuk menjembatannya bila terjadi sengketa atau masalah antar orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Teori hukum yang digunakan adalah transplantasi hukum, atau disebut juga pencangkokan hukum.

Setelah Indonesia merdeka, sumber pembentukan hukum nasional Indonesia adalah bersumber dari atau memperoleh pengaruh dari hukum Eropa warisan Belanda, hukum Islam, dan hukum adat.<sup>234</sup> Dan tetap membiarkan dan meneguhkan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk agama Islam pada bidang-bidang hukum keluarga, yaitu hukum perkawinan, hukum waris, wakaf, hibah, dan wasiat yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dan hingga saat ini pengaruh hukum Eropa bahkan hukum Anglo-Amerika mendapat kedudukan yang semakin kuat terutama dalam bidang hukum bisnis dan perdagangan, disusul oleh syariat Islam terutama dalam bidang bisnis keuangan dan perbankan, sementara hukum adat jauh tertinggal dan hanya bertahan untuk sebahagian dalam hukum pertanahan.<sup>235</sup>

Perkembangan baru dalam paradigma hukum Islam terutama yang berkaitan dengan wakaf dari benda tidak bergerak (tanah, masjid) diperluas menjadi wakaf benda

<sup>234</sup> Daniel S. Lev, *op cit*

<sup>235</sup> Rifyal Ka'bah, *op cit*



bergerak (wakaf tunai dan saham). Mengingat kepentingan pengembangan hukum Islam dalam hukum bisnis yang telah menjadi bagian dari hukum perdata Indonesia dan hukum adat sekaligus. Sebelum menjadi hukum politik, hukum syariat membutuhkan formulasi dalam bentuk kode hukum Islam yang siap pakai sesuai kebutuhan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini pertama-tama merupakan tugas pakar hukum syariat yang merumuskan fikih lama dan baru sesuai dengan bahasa perundang-undangan.<sup>236</sup>

Dalam kaitan pengembangan wakaf konvensional menjadi wakaf kontemporer, penetapan hukum Islam menjadi begitu penting. Dengan adanya ketetapan hukum yang pasti dapat menimbulkan rasa kepercayaan publik terhadap pengembangan wakaf tunai yang dikelola melalui saham perseroan terbatas. Bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum yang dirasa paling tepat untuk mengelola wakaf tunai adalah berupa perseroan terbatas, bukan yayasan, firma, CV, atau yang lainnya. Pertimbangan lain, bahwa perseroan terbatas memiliki kelebihan dibanding yang lain, di samping jenis usaha yang lebih banyak diminati, lebih cepat, dan banyak menghasilkan keuntungan sehingga keberadaan perseroan telah diatur dalam bentuk perundang-undangan. Meski sebenarnya untuk modal dasar pendirian perseroan lebih besar ketimbang bentuk badan usaha yang lainnya.

Upaya pemantapan untuk itu, perlu kajian lebih lanjut mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan asumsi wakaf tunai dijadikan modal untuk mendirikan perseroan terbatas, dibelikan saham perseroan terbatas tertentu, dana *corporate*

<sup>236</sup> <http://www.hupelita.com>, diakses 19 Juni 2009

*social responsibility* (tanggung jawab sosial dan lingkungan/filantropi perusahaan) dijadikan sebagai wakaf tunai perseroan terbatas dan/atau sebaliknya, dan kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman mengenai istilah syariat, hukum Islam, dan fikih itu sendiri.

Syariat dalam kamus dimaknai sebagai ajaran pokok, tetapi syariat dalam konteks wacana yang berkembang di Indonesia dimaknai sebagai hukum-hukum Islam pada umumnya, padahal aspek hukum merupakan sebagian saja dari bangunan syariah Islam.<sup>237</sup> Istilah lain yang populer di Indonesia adalah hukum Islam. Kata ini merupakan istilah khas Indonesia dan tidak didapati dalam Al-Qur'an maupun *as-sunnah*.<sup>238</sup> Definisi lain menyebutkan, hukum Islam sebagai perangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Rasul saw tentang tingkah laku orang mukalaf yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>239</sup>

Dalam hal ini hukum Islam dapat dibagi dua macam, yaitu hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. Fikih berarti paham, baik secara mendalam atau tidak.<sup>240</sup> Syariah kebenarannya bersifat mutlak dan otoratif sedangkan fikih cenderung bersifat relatif dan liberal, di mana fikih merupakan ilmu tentang seperangkat hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyyah* yang didapatkan melalui penalaran dan

<sup>237</sup> Murkholis, 29 Januari 2009, Penegakan Syari'at Islam di Indonesia Perspektif Ekonomi, <http://murkholis77-staff.vii.ac.id>, diakses 29 Juni 2009

<sup>238</sup> Ahmad Rofiq, 1996, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

<sup>239</sup> Amir Syarifuddin, 1997, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hal. 5

<sup>240</sup> Ibn Mansur, 1954, *Lisan Al-'Arab*, Jilid ke-4, Al-Dar Al-Misriyah li Al-Ta'lif wa Al-Tarjamah, Kaherah, hal. 522

*istidlal*.<sup>241</sup>

Untuk sebutan hukum Islam terhadap istilah syariah versi Indonesia ini, maka pengertian hukum Islam di sini lebih dekat dan tepat dengan pengertian fikih, yaitu sebagai memahami hukum-hukum *syara'* yang bersifat amali berdasarkan pada dalil-dalilnya yang terperinci,<sup>242</sup> dan hukum yang dimaksudkan mempunyai karakteristik Islam dengan dasar wahyu.<sup>243</sup> Ahli hukum Islam (*fukaha*) mendefinisikan fikih dalam dua sisi, yaitu fikih sebagai ilmu, yaitu kumpulan hukum-hukum *syara'* yang dihasilkan melalui ijtihad dan fikih sebagai hasil ilmu, yaitu ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum *syara'* amaliah dari dalil-dali rinci (satuan teks Al-Qur'an dan hadis).<sup>244</sup>

Dari berbagai definisi yang dikemukakan memperlihatkan bahwa apa pun yang dikeluarkan dari fikih adalah suatu produk penalaran (ijtihad) yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensinya sebagai ilmu. Di antara konsekuensi itu, bahwa fikih sebagai ilmu adalah skeptis, fikih sebagai ilmu bersedia untuk diuji dan dikaji ulang.<sup>245</sup> Masyarakat Islam yang tumbuh dan berkembang dengan kemajuan era milenium menghadapi isu dalam menerapkan atau mentransformasikan syariah melalui penerapan fikih.

<sup>241</sup> Saifuddin Al-Amidi, 1967, *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid ke-1, Mu'assarah Al-Halabi, Kairo, hal. 8

<sup>242</sup> Asy-Syaukani, tt., *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilm Al-Ushul*, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 3

<sup>243</sup> Juhaya S. Praja, 2000, *Aspek Sosiologi Dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam Epistemolog Syara' Mencari Format Baru Fiqh di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 119

<sup>244</sup> Muhammad Abu Zahrah, tt., *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Mesir

<sup>245</sup> Abdul Wahab Afif, tt., *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran dan Teoritis dengan Praktis*, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, hal. 5



Karena beberapa mazhab dalam sistem sosialnya berbeda antara satu sama lain dengan sistem sosial yang melatarbelakangi ajaran fikih mazhab tersebut.

Wakaf tunai merupakan produk hukum Islam (fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai hasil ilmu) yang memiliki konsekuensi bersedia untuk diuji dan dikaji ulang, karena kehidupan publik terus tumbuh dan berkembang terutama berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi. Dengan adanya Undang-Undang Wakaf sebagai fikih hasil ilmu (ijtihad fukaha/pakar hukum) telah mendapat legitimasi dalam ranah hukum perdata Indonesia, maka kedudukan hukum wakaf secara umum menjadi semakin kuat keberadaannya.

Untuk melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, menurut Saharuddin Bacik, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan,<sup>246</sup> berpendapat, dengan adanya Undang-Undang Wakaf, sangat tepat sekali untuk memberikan kepastian hukum terhadap wakaf tunai yang telah diikrarkan wakif.

Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah<sup>247</sup> mengatakan:

- a. Secara umum, penerapannya bagus, karena persoalan wakaf banyak menimbulkan masalah, seperti wakaf diserahkan oleh orang tua, tapi kemudian anak keturunan wakif mempersoalkan mengenai wakaf yang telah diberikan oleh orang tuanya tersebut.

<sup>246</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 25 Mei 2009

<sup>247</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

- b. Secara khusus, wakaf tunai belum populer dan tidak dipopulerkan di tengah masyarakat, tidak lazim dan pemerintah juga tidak memopulerkannya.
- c. Secara keilmuan dan fikih, membolehkan wakaf tunai, contoh di Mesir.
- d. Secara umum di dunia Islam cukup populer/familiar, tapi di Indonesia belum lazim/tidak populer.

Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>248</sup> pengembangannya sekarang bisa dikembangkan lebih lanjut. Undang-undang yang ada ini sebagai *legal standing* (alas hak) untuk menjadi lebih luas lagi penerapannya sehingga memberikan kepastian terhadap bagaimana pengelolaan wakaf yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian di Indonesia. Yang mana apabila syariat dpositifkan dalam bidang-bidang tertentu terlalu kaku, tapi dalam hal ekonomi memang perlu, dan hukum bisnis perlu kepastian hukum, sekarang tinggal mekanisme wakaf tunai yang perlu dimodifikasikan.

Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>249</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah melakukan perubahan pandangan dan paradigma tentang pengertian dan batasan wakaf, di mana subjek (wakaf, nadhir) maupun objek wakaf telah mengalami pergeseran.

<sup>248</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>249</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>250</sup> hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dibanding dengan perundang-undangan yang ada selama ini, yaitu dengan adanya konsep wakaf tunai.

Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>251</sup> penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih banyak mengalami kendala, umpamanya pemahaman masyarakat tentang wakaf masih sangat terbatas hanya dalam bentuk wakaf tanah (lahan) atau benda-benda tidak bergerak lainnya. Di samping itu, kebanyakan masyarakat juga belum memahami isi undang-undang tersebut sehingga sosialisasinya masih sangat diperlukan. Badan Wakaf Indonesia pun belum menyebar ke daerah-daerah, baru ada di pusat pemerintahan. Jadi, penerapan Undang-Undang Wakaf belum dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut M. Syawaluddin Eka Saputra, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>252</sup> bahwa Undang-Undang Wakaf secara kelembagaan relatif belum menyentuh masyarakat, hal ini dapat dilihat sampai saat ini belum ada badan-badan wakaf provinsi apalagi tingkat kabupaten. Di samping itu sosialisasi di tengah masyarakat masih kurang sehingga wacana wakaf tunai belum dikenal secara luas dan pemahaman masyarakat tentangnya juga masih dirasakan asing sehingga belum dikenal secara luas. Sehingga hal ini berdampak pada keraguan masyarakat mengenai status

<sup>250</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>251</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>252</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009



hukumnya dari sudut pandangan hukum Islam, apakah wakaf tunai dibolehkan atau tidak?

## B. Keberadaan Perusahaan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata Indonesia

Berbagai badan usaha berbentuk badan hukum dapat digunakan pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Bentuk-bentuk badan usaha berbentuk badan hukum tersebut ada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai berikut:

- 1) Dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, terdiri dari:
  - a. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)
  - b. Persekutuan dengan Firma/Fa
  - c. Persekutuan Komanditer/CV
  - d. Perseroan Terbatas/PT.
- 2) Di luar KUH Perdata dan KUH Dagang:
  - a. Perusahaan Dagang
  - b. Koperasi
  - c. Perusahaan Negara.<sup>253</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk usaha perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi

<sup>253</sup> Joni Emirzon, 2000, *op cit.*, hal. 68

pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan terbatas dalam kiprahnya sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum memerlukan suatu nama bagi jati dirinya. Nama perseroan terbatas yang selanjutnya disebut nama perseroan adalah nama diri perseroan yang bersangkutan (Pasal 1).<sup>254</sup>

Dalam hal pemakaian nama perseroan terbatas harus memerhatikan ketentuan tentang merek terkenal berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang beriktikad buruk yang dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama usahanya, tanpa seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar (Pasal 6).

Bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas juga dikenal di negara-negara lain, di Malaysia disebut *Sendirian Berbad* (SDN BHD), di Singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), di Jepang disebut *Kabushiki Kaisha*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Perancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).

Landasan filosofis yuridis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

<sup>254</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Pengertian perseroan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan, bahwa:

- Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (ayat 1).
- Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (ayat 7).
- Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (ayat 8).

Perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik



(pemegang sahamnya) untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Kata perseroan menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>255</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 18 menyebutkan mengenai pengaturan tentang; perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan pendirian perseroan merupakan usaha pokok perseroan, di mana kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.<sup>256</sup>

Untuk mengetahui bagaimanana keberadaan perseroan terbatas menurut hukum perdata Indonesia, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Yunus Mursid,<sup>257</sup> perseroan terbatas diatur dalam undang-undang, oleh karena itu ditinjau dari hukum perdata bentuk badan hukum ini adalah sah.

<sup>255</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Edisi ke-1, Cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

<sup>256</sup> Gunawan Widjaja, 2008, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, Ed. Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 143

<sup>257</sup> Kuesioner, tanggal 29 Meri 2009

Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>258</sup> perseroan terbatas dibandingkan dengan bentuk badan hukum yang lain adalah jauh lebih bagus dan bagus, serta sesuai dengan perkembangan zaman karena aturannya lebih jelas dibandingkan dengan yang lain. Konflik bisnis yang ditimbulkan biasanya karena aturan yang tidak jelas, dan perseroan terbatas lebih akomodatif, namun biaya pendiriannya lebih besar dibandingkan dari yang lain.

Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang,<sup>259</sup> bahwa hukum perdata di Indonesia (hukum dagang) tidak mengatur perseroan terbatas secara kelembagaan, untuk aktivitas perseroan terbatas dalam hal transaksi merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Statusnya sebagai subjek hukum dalam hal perbuatan hukum, dalam kelembagaannya diatur dalam perseroan terbatas, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dihapus.

Ada pengembangan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* dibandingkan dengan peraturan yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas), dan perubahan sedikit dalam struktur perseroan terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, sekarang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sejajar hanya beda tugas. Tugas Komisaris

<sup>258</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>259</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

menyetujui setiap kebijakan yang dibuat Direksi.

Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>260</sup> hal ini membantu dalam lalu lintas ekonomi dan hukum. Sebagai badan hukum karena perkembangan praktik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang perseroan terbatas namun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>261</sup> perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dijalani oleh para pelaku ekonomi, karena jelas status hukumnya sehingga sangat ditunggu oleh pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan kepastian (hukum) berusaha untuk kemakmuran masyarakat.

Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>262</sup> sesungguhnya perseroan terbatas dapat terus dikembangkan karena ia merupakan bentuk kerja sama dalam suatu usaha yang berbentuk badan hukum untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan (profit).

M. Syawaluddin Eka Saputra, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>263</sup> perseroan terbatas itu adalah nama badan hukum untuk melakukan usaha bisnis, tanpa melihat apakah usaha itu dibolehkan oleh syariat atau tidak, dan aspek bidang usahanya dapat dilihat dari akta

<sup>260</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>261</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>262</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>263</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009



pendirian perusahaan. Dengan adanya peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, maka hal ini berimplikasi terhadap perkembangan perseroan terbatas itu sendiri.

Kegiatan usaha ekonomi di Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang direkomendasikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Pasal 33). Karena itu kegiatan mendirikan perseroan terbatas harus pula melihat seberapa jauh perseroan terbatas dan jenis usaha yang akan digarap dapat ikut serta memberi kontribusi kepada kesejahteraan rakyat, khususnya yang langsung menyentuh masyarakat lingkungan yang ada di sekitar perseroan terbatas tersebut berada. *Corporate social responsibility* yang diamanatkan undang-undang, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 1, 3 UUD 1945). Merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah kepada perusahaan untuk memberikan kontribusi riil bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai salah satu bentuk untuk meminimalisir kesenjangan dan kecemburuan sosial.

### C. Keberadaan Perusahaan Perseroan Terbatas (*Syirkah*) Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, konsep perseroan terbatas bukan merupakan sesuatu yang intrinsik dan berkembang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat dipahami sebagai sebuah lonceng kebangkitan atau batu loncatan bagi munculnya gerakan islamisasi (*syari'abikasi* perseroan terbatas) sebagaimana yang terjadi pada dunia perbankan (ekonomi Islam). Demikian juga kesulitan dalam menggali literatur keislaman tentang masalah hukum perseroan terbatas dan kelembagaan ekonomi hukum lainnya dan terlebih lagi terjebak dalam upaya kebuntuan untuk mencari alternatif lain untuk model hukum korporasi, karena saat ini kiblat inovasi hukum korporasi hanya berporos pada satu sumbu yaitu *American model* (*Anglo-American* hukum Eropa).

Terdapat beberapa variasi model hukum korporasi yang berkembang di dunia saat ini, seperti model Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, dan Australia. Model yang menjadi *mainstream* dalam dunia hukum perseroan adalah model yang bersumber dari negara Amerika Serikat. Atas dasar ini dalam artikelnya yang cukup kontroversial, Henry Hansmann dan Reineer Kraakman (2001) memproklamirkan telah terjadi "*the end of history for corporate law*", dan jikapun Islam ingin menjadi pemain dalam diskursus tema-tema hukum korporasi hanya akan lebih banyak mengikuti prinsip-prinsip utama yang sudah banyak berlaku.

Islam telah mengeluarkan aturan-aturan kepemilikan dan berbagai aturan yang terkait dengan kerja sama

antarindividu yang membagi keuntungan di antara mereka. Hal ini berbeda dengan konsep kerja-upah (*ijarah*) di mana satu orang diberi kompensasi atas penggunaan *skill* mereka atau tenaga mereka dalam bentuk gaji atau upah. Menurut Islam, perseroan adalah kontrak antara dua orang atau lebih atas suatu kesepakatan tertentu. Sedangkan dalam hukum perusahaan di Barat, memandang bahwa memberikan bantuan dana atau hibah, mengklaim asuransi, mendirikan perusahaan, dan berdagang adalah satu tipe kontrak yang sama, namun dalam Islam itu dipandang sebagai tipe kontrak yang berbeda. Terdapat sisi-sisi perbedaan antara konsep perseroan di Barat dan menurut Islam.

Sebenarnya tidak ada konsep perseroan secara detail dalam Islam, akan tetapi mengenai hukum perseroan itu sendiri adalah *mubah* (boleh), sebab ketika Nabi saw diutus sebagai Rasul, telah banyak orang mempraktikkan perseroan pada saat itu dan Rasulullah mendiamkan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan Rasulullah saw terhadap tindakan banyak orang yang melakukan *syirkah* (perseroan) merupakan dalil *syara'* (hukum Islam) tentang kebolehan melakukan *syirkah*. Sedangkan aturan yang lebih detail mengenai bagaimana mendirikan perseroan tidak dijelaskan, karena pada prinsipnya dalam beraktivitas ekonomi bagaimanapun bentuknya dibolehkan sepanjang tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Menurut Wisnu Sudibjo, pemahaman mengenai perseroan dalam Islam, adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan (*Syarikah*), adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih



untuk melakukan tipe pekerjaan tertentu dalam rangka menghasilkan keuntungan di mana salah satu pihak menyediakan modal dan yang lain bekerja investasi kekayaan seseorang.

- b. Perusahaan dan orang-orangnya adalah satu unit tidak terpisahkan. Kekayaan personal mereka yang memberikan modal untuk bisnis berdasarkan kontrak yang dibuat diantara mereka.
- c. Rasio distribusi keuntungan dapat ditentukan berdasarkan persetujuan/ kesepakatan kontrak, misal 50/50, 40/60 dan sebagainya. Dan kerugian yang diderita relatif tetap dalam jumlah investasi individu dalam bisnis itu. Contoh jika dua orang memiliki perusahaan dan mengalami kerugian dengan menanggung hutang sebesar \$15 miliar, maka pertanggungjawaban sekutu tidak terbatas hanya dalam jumlah yang diinvestasikan sehingga tidak ada pertanggungjawaban yang terbatas.
- d. Sebuah perseroan (*syarikah*) adalah sebuah kontrak di mana orang-orang bekerja sama dan mendistribusikan keuntungan yang didapat untuk mereka sendiri. Secara asasi sebuah perseroan adalah sebuah persoalan yang berkaitan dengan kontrak-mengontrak. Dalam Islam, sebuah kontrak harus merupakan sebuah tawaran dan penerimaan antara orang-orang yang bekerja sama atas suatu hal, misal jual beli barang.

Oleh karena itu akan selalu ada dua pihak atau lebih dalam sebuah formasi perseroan, mereka bekerja untuk melakukan apa yang menjadi subjek dari kontrak karena atas dasar subjek ini mereka bekerja bersama-sama. Salah satu dari mereka harus ada yang dapat mengatur kepentingan perseroan, misal melakukan penawaran, mengatur aset dan sebagainya.<sup>264</sup>

Macam-macam bentuk perseroan (*syirkah*) dalam Islam, yaitu:

- 1) *Syirkah al-Amlak* (Serikat/perseroan dalam kepemilikan); terjadi jika dua orang/lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*:
  - a. *Syirkah Ikhtiyar* (perseroan bebas pilih), seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau mereka berdua menerima wasiat harta dari orang lain. Harta tersebut menjadi harta serikat bagi mereka.
  - b. *Syirkah Jabar* (perseroan secara paksa), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang/lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan.
- 2). *Syirkah al-Uqud*, terdapat perbedaan pendapat fuqaha tentang bentuk-bentuknya, yaitu:
  - a. Pendapat mazhab fiqih dalam hal ini, ulama mazhab Maliki dan mazhab

<sup>264</sup> Wisnu Sudibjo, 9 Desember 2007, *Perseroan Dalam Islam*, <http://wisnusudibjo.wordpress.com>, diakses 6 Januari 2008

Syafi'i hanya menerima empat dari lima bentuk *syirkah* yang ada dan menolak *Syirkah al-Mudharabah*.

- b. Ulama Hanafi dan mazhab Hambali membagi *syirkah* tersebut dalam lima bentuk, yaitu:
  1. Perseroan Sederajat (*Inan*), adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Di mana sebuah perseroan yang menempatkan kedua pihak sebagai investor dalam bisnis dan bekerja dengan uang investasi tersebut. Kedua belah pihak akan memiliki hak untuk menjual, membeli dan membawa perusahaan maju. Oleh sebab itu semua sekutu adalah setara dalam hal pengaturan yang mereka lakukan.
  2. Perseroan Badan (*Abdan*), adalah perserikatan dalam kerja yang hasilnya dibagi bersama. Di mana dalam perseroan ini ada dua pihak bekerja sama dengan keterampilan yang mereka miliki, misal sebagai konsultan dan dokter. Meskipun mereka juga menggunakan uang mereka akan tetapi keterampilan yang mereka miliki yang menjadi alasan mereka untuk bekerja sama dalam satu perseroan.



3. Perseroan Badan dan Modal (*Mudharabah*), adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang mempunyai keahlian di bidang dagang, keuntungannya dibagi bersama. Di mana dalam perseroan ini salah satu pihak bertindak sebagai pemodal dan pihak yang lain bertindak sebagai orang yang mengelola modal tersebut. Pihak yang hanya menyediakan modal adalah pihak pasif yang tidak ambil bagian dalam menjalankan perseroan, sedang pihak yang lain adalah pihak yang menjalankan perseroan termasuk membeli atau menjual sesuatu dalam rangka mengurus perseroan.
4. Perseroan *Wujuh*, adalah perserikatan tanpa modal. Bentuk perseroan ini mirip dengan *Mudharabah*, akan tetapi modal yang disediakan oleh pemodal pasif adalah kredibilitasnya dalam dunia perbisnisan dan atas dasar kedudukan ini perseroan melakukan perdagangan. Pemodal ini bisa jadi adalah seorang pedagang yang kaya, artinya disokong oleh orang yang kaya.
5. Perseroan Negoisasi (*Mufawadla*), adalah bentuk usaha yang

merupakan gabungan dari berbagai jenis perseroan di atas. Perserikatan ini modal semua pihak dan bentuk kerja yang mereka lakukan sama kualitas dan kuantitasnya, dan dalam hal ini keuntungan dibagi rata.<sup>265</sup>

Menurut hukum Islam, *syarikah* dibagi ke dalam empat macam, yaitu:

1. *Syarikat Badan*, yaitu dua orang atau lebih, bersyarikat dalam usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlain-lain dengan tidak ada harta yang disatukan. Seperti tukang jahit bersyarikat dengan tukang jahit. Menurut Ash-Shan'ani, syarikat badan/usaha itu sebenarnya adalah perjanjian kerja sama antara anggota syarikat untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Bahwa masing-masing anggota mewakili pekerjaan dari temannya menurut kesanggupan masing-masing, sedang penghasilan yang diperoleh dibagi menurut perjanjian sewaktu akad.
2. *Syarikat Mufawadhah*, ialah penyerahan seorang dari dua orang yang bersyarikat atau lebih kepada temannya untuk memperdagangkan hartanya, biar ketika ia ada ditempat atau tidak.
3. *Syarikat Wujuh*, ialah dua orang yang bersyarikat atau lebih yang berjanji untuk berdagang menurut kesanggupan masing-masing dan keuntungan dibagi rata.
4. *Syarikat Inan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat dengan harta kepunyaan masing-masing untuk sama-

<sup>265</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, op cit, hal. 148

sama berdagang, sedang keuntungan menurut banyak pokok masing-masing. *Inan*, artinya nyata (kelihatan) barang yang disyarikatkan itu.

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa syarikat yang tiga macam pertama di atas (Syarikat Badan, Syarikat Mufawadhah, Syarikat Wujuh), ialah syarikat yang batil, tidak boleh dilakukan sebab mengandung penipuan antara kedua belah pihak yang bersyarikat, karena usaha masing-masing belum tentu sama, sedang modal tidak ada pula yang disyarikatkan. Dan yang dibolehkan, adalah syarikat *inan*.

Perkembangan selanjutnya, atas dasar konsep syarikat *inan*, saat ini telah dibuat orang berbagai macam nama perkumpulan dagang menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratannya, sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku dalam hukum dagang.<sup>266</sup> Syarat dalam melakukan syarikat *inan* adalah sebagai berikut:

- a. Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota syarikat kepada teman yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota syarikat itu percaya-memercayai.
- c. Mencampurkan harta, hingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, yang merupakan mata uang atau bahan makanan.

Meskipun ada pendapat yang setuju dan tidak setuju mengenai status hukum perseroan terbatas (*syirkah*) menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pandangan hukum bagaimana keberadaan perseroan terbatas menurut hukum Islam, menurut Saharuddin Bacik,

<sup>266</sup> Idris Ahmad, op cit., hal. 109



Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan,<sup>267</sup> setuju, tidak haram, karena tidak ada unsur riba, karena sama-sama punya modal, untung rugi ditanggung bersama dan tidak merugikan harta benda milik pribadi.

Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Yunus Mursid,<sup>268</sup> berdasarkan pendapat Taqyuddin An-Nabhani, dalam buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (h.13), adalah batil (tidak sah) menurut *syara'*, hal ini disebabkan dalam transaksi jual-beli saham terutama pada perseroan terbuka tidak ada *ijab qabul* pihak yang melakukan transaksi.

Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>269</sup> perseroan terbatas merupakan badan hukum yang selama tidak ada unsur menzalimi dan memberi manfaat dalam perkembangan perekonomian sekarang ini yang berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka perseroan terbatas diperbolehkan menurut hukum Islam.

Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>270</sup> perseroan terbatas sama dengan *syirkah*, prinsipnya sama-sama melakukan perekonomian, tetapi beda pertanggungjawaban. Dari sisi ini apakah *syirkah* sama dengan perseroan terbatas? Apakah beda pertanggungjawabannya?

<sup>267</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 25 Mei 2009

<sup>268</sup> Kuesioner, tanggal 29 Mei 2009

<sup>269</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>270</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>271</sup> secara tegas Islam tidak mengenal perseroan terbatas, tetapi syarikat. Penafsiran dalam bisnis dapat saja dilakukan di Indonesia. Hukum perseroan terbatas merujuk pada hukum Perancis.

Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>272</sup> perseroan terbatas dalam Islam tidak ada ketentuan *nash* yang melarang, sepanjang memberikan manfaat bagi alam semesta dan umat manusia pada umumnya. Hukumnya boleh sesuai dengan kebutuhan bahkan dianjurkan orang bersyarikat dalam kebaikan dan takwa.

Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>273</sup> mengatakan ada 2 hal penting yang perlu diketahui, yaitu:

1. Perseroan terbatas dalam hukum Islam dibahas dalam konsep *syirkah akad*.
2. Karena ini masalah badan hukum, apakah Islam mengenal badan hukum apa tidak? Ternyata dalam Islam ada, yaitu *asasiyah i'tibariyah* (badan hukum). Di mana dalam Islam ada *baitul maal*, bahwa menjamin fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Maka pada dasarnya Islam membolehkan perseroan terbatas selama tidak dilakukan dengan sistem ribawi.

Dalam hukum Islam perseroan terbatas dapat dimasukkan dalam konsep musyarakah atau *syirkah*, yakni

<sup>271</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>272</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>273</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

*syirkah akad* dalam kategori *syirkah inan* atau *syirkah mufawadhab*. Pengategorian ini sangat tergantung dengan sistem dan cara kerja perseroan terbatas tersebut. Terlepas dari ini, hukum Islam membolehkan adanya perseroan terbatas selama tidak dilakukan dengan sistem ribawi.

Menurut Cholidi Zainuddin, Profesor Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>274</sup> pada prinsipnya menyetujui badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, karena ada unsur usahanya produktif jangan usaha yang tidak aman, berisiko tinggi.

Menurut M. Syawaluddin Eka Saputra, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>275</sup> perseroan terbatas merupakan badan hukum yang diperkenankan oleh perundang-undangan negara untuk seseorang atau sekelompok orang melakukan usaha kegiatan bisnisnya. Jika ingin usaha itu besar maka bisa menggunakan bentuk usaha perseroan terbatas. Tinjauan hukum Islam melihat sektornya apa yang akan dilakukan oleh perseroan terbatas tersebut melalui akta pendirian perusahaan, selama tidak bertentangan dengan syariah maka perseroan terbatas itu dapat dibolehkan.

#### **D. Bentuk Pengelolaan Wakaf Tunai yang Tepat dan Berguna di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang diharapkan mampu mengembangkan perwakafan di Indonesia secara lebih

<sup>274</sup> Wawancara, 10 Juni 2009

<sup>275</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009



baik lagi, terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan nadhir serta pengelolaan wakaf. Menurut Tulus, bahwa kelahiran Badan Wakaf Indonesia terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia.

Di antara tugas Badan Wakaf Indonesia ini, adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, lembaga, atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik.<sup>276</sup> Lahirnya inisiatif untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia diwarnai oleh suasana perubahan sistem politik di Indonesia dari otoritarianisme kepada demokrasi. Dalam konteks ini Badan Wakaf Indonesia diharapkan mencerminkan semangat demokrasi dan *good governance* dalam setiap proses pembentukan pengelolaan dan pengembangan organisasi di kemudian hari.

Tugas dari pada Badan Wakaf Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 47 ayat (2), yaitu Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Keanggotaannya mesti berasal dari unsur masyarakat, yaitu jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 53). Oleh karena itu proses penjaringan dan pemilihan pengurus Badan Wakaf Indonesia mesti mempertimbangkan semangat keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan independensi, namun dengan

<sup>276</sup> Tulus, 2004, Permasalahan Wakaf di Indonesia, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta

tetap mengedepankan prinsip kompetensi agar pengelolaan organisasi dapat berjalan efektif.

Hal yang krusial menyangkut tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur undang-undang wakaf, bahwa di samping melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dan Badan Wakaf Indonesia juga melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ini merupakan tugas yang mulia dan menantang mengingat harta benda wakaf yang dikelola belum ada, maka untuk merealisasikan tugas dan wewenang ini Badan Wakaf Indonesia mengupayakan untuk mendapatkan wakif berskala nasional yang memberikan mandat kepada Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf bergerak maupun tidak bergerak.

Hal yang paling esensi dengan diperbolehkannya wakaf tunai ini adalah sebagai salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif.<sup>277</sup> Dari segi manfaat, wakaf tunai dimaksudkan dapat menghidupi wakaf-wakaf nontunai (tanah, bangunan); menjadi wakaf-wakaf nontunai lainnya (rumah sakit, sekolah, gedung, perkantoran, dan lain-lain) digunakan untuk membiayai prioritas kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi, untuk pemberdayaan ekonomi umat secara makro dan mikro, mengentaskan kemiskinan, pembiayaan UKM, beasiswa, dan sarana pendidikan atau apa saja dalam rangka untuk meningkatkan kualitas umat/publik secara menyeluruh.

<sup>277</sup> Suhwawardi K. Lubis, Sabtu, 29 Nopember 2008, Kebijakan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia (Bagian 2), <http://suhrawadilubis.multiply.com>., diakses 2 Januari 2009

Wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk fakir miskin, untuk umat Islam saja, melainkan untuk kesejahteraan publik (masyarakat umum), dan wakaf juga dapat digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Wakaf sudah lama dilakukan oleh masyarakat Islam, bahkan sudah dianggap sebagai adat istiadat, hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresap) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri.<sup>278</sup>

Maka kegiatan wakaf ini menarik perhatian negara untuk diatur dan dikelola agar lebih baik sehingga akan berimplikasi terhadap pertumbuhan sektor religi, sosial, dan ekonomi publik, dengan wakaf yang dikelola secara baik maka masyarakat akan sejahtera. Dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf uang, menjadikan pengembangan wakaf uang (wakaf tunai/*cash waqf*) semakin mendapatkan legitimasi pada tataran landasan hukum keagamaan. Berdasarkan pada pendapat sebagian kalangan ulama fikih *salafi* (dahulu) tidak sependapat dengan bolehnya wakaf uang, tapi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dijadikan sandaran yang cukup kuat bagi ide pemberdayaan wakaf tunai.<sup>279</sup> Menurut Muhammad

<sup>278</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, op cit., hal. 13

<sup>279</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta, hal. 15



Syafi'i Antonio, terdapat empat manfaat utama dari wakaf uang untuk kondisi sekarang ini, yaitu:

1. Wakaf Uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui Wakaf Uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana Wakaf Tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara.<sup>280</sup>

Dalam menuju format pengembangan wakaf yang ideal di Indonesia, menurut data Departemen Agama tahun 2003 dan data CSRC (*Centre for the Study of Religion dan Research*), bahwa aset wakaf di seluruh Indonesia adalah 32.471 lokasi dengan total nilai 590 triliun rupiah, namun sayang hampir semua aset wakaf tersebut masih *lost centre* sehingga memerlukan investor untuk memproduktifkannya. Salah satu contoh solusi yang telah dilakukan dan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah sumber dana investasi dengan cara mengoptimalkan dana *cash waqf*, seperti yang telah dilakukan oleh M. A. Mannan dengan *Social Investment*

<sup>280</sup> Syafi'i Antonio, 2001, op cit., hal. 185

*Bank Limited* (SIBL)-nya. SIBL ini mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat di Bangladesh, yaitu tentang konsep baru mengenai pengelolaan wakaf tunai (uang) untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Ahmad Juwaini memrediksikan bahwa meski dalam Undang-Undang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf tunai hanya dapat dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah, kelak muncul pengelola wakaf tunai lain. Sebab, wakaf tunai ini sangat terkait dengan rasa kepercayaan.<sup>281</sup> Undang-Undang Wakaf sebagai payung hukum dalam mengelola wakaf tunai dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan mampu memberikan sertifikasi bagi nadhir yang memenuhi syarat mengelola wakaf baik tanah maupun tunai. Maka peran BWI memberi kesempatan bagi lembaga pengelola wakaf (nadhir) untuk turut serta dalam pemberdayaan wakaf tanah maupun tunai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, bahwa pengelolaan wakaf tunai yang kelak lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah, artinya wakif (orang yang memberikan wakaf) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang tunai melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk menteri. Direktur Institut Manajemen Zakat (IMZ), Ahmad Juwaini berpendapat lain,<sup>282</sup> mestinya penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai tak hanya diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah, karena ada lembaga lain yang mampu menjaga keamanan wakaf tersebut dan mestinya dalam Undang-Undang Wakaf tak hanya menyebutkan Lembaga Keuangan

<sup>281</sup> <http://www.Administrator Bina Muslim>, op cit

<sup>282</sup> <http://www.republika.co.id>, op cit

Syariah saja yang dapat menerima dan mengelola wakaf tunai.

Hal itu disebabkan dua alasan, yaitu:

1. Sisi positif.

Ketika penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syariah dikelola bagi pengembangan ekonomi umat Islam, maka akan ada pemberdayaan masyarakat dalam hal-hal produktif.

2. Sisi negatif.

Kalau pengelolaan wakaf tunai diserahkan semuanya kepada Lembaga Keuangan Syariah maka akan mengurangi peran masyarakat dalam ikut serta mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai tersebut, sebab tidak semua lembaga syariah yang akan mampu menjalankan fungsinya agar wakaf tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi umat.

Keuntungan bila dana wakaf tunai hanya dapat dititipkan kepada Bank Syariah dengan bagi hasil 10% per tahun, maka dana wakaf tunai yang dikelola melalui Lembaga Keuangan Syariah akan memberi dampak positif bagi perkembangan lembaga tersebut, selain menambah modal juga mendapat tambahan pendapatan alternatif bagi mereka. Lembaga Keuangan Syariah dapat dikatakan sebagai nadhir wakaf tunai, karena saat ini lembaga bank syariah merupakan satu-satunya lembaga (badan hukum) yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang berhak mengelola dan mengembangkan dana wakaf tunai masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.



Diharapkan bank syariah yang telah diberi hak sebagai nadhir wakaf tunai tetap mendayagunakan dana wakaf untuk kepentingan ekonomi umat, sehingga wakaf tunai ini kelak tidak hanya menjadi penyokong kegiatan komersial bank syariah yang bersangkutan dan melupakan bahwa wakaf itu harus memberikan manfaat ekonomi bagi umat. Pada prinsipnya, wakaf itu dikelola oleh nadhir. Jadi siapa saja dapat bertindak sebagai nadhir selama mereka memenuhi persyaratan sebagai nadhir bisa saja, bukan hanya diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah,<sup>283</sup> karena perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah telah memiliki kegiatan komersialnya sendiri.

Melihat pada perkembangan wakaf di Indonesia, Darwis, pemerhati masalah wakaf dan zakat, mengatakan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih sebatas hal-hal yang bersifat fisik (gedung, tanah, benda yang tahan lama). Hal ini terjadi akibat masih banyak masyarakat yang memahami bahwa persyaratan wakaf adalah benda yang bersifat tahan lama dan tidak bergerak (aset tetap).

Kebanyakan wakif belum memandang penting dan kebiasaan yang telah terbentuk selama ini menyumbangkan tanah, bangunan sekolah, atau sejumlah uang kepada nadhir untuk biaya operasionalnya dalam jangka pendek (karitatif). Akibatnya banyak yayasan pendidikan Islam yang berbasis wakaf gulung tikar atau telantar, sementara jika yang ada

<sup>283</sup> Republika, <http://www.republika.co.id/suplemen/cetak>. Jum'at 21 Oktober 2004, diakses 30 Januari 2008

- *Mudharabah*, di mana pengelola wakaf uang berperan sebagai *shohibul mal* (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.<sup>287</sup> *Mudharabah* ialah suatu kontrak investasi yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola (*mudhorib*) dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- *Musyarakah*, investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya aja pada investasi *musyarakah* ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih.<sup>288</sup> *Musyarakah* ialah kontrak yang dilakukan oleh 2 pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya dapat ditunjuk salah satu dari mereka.
- *Ijarah*, di mana pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan (*commercial center*), rumah sakit, apartemen, dan lain-lain. Kemudian disewakan hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan yang dikehendaki.<sup>289</sup> *Ijarah*, ialah kontrak (akad) sewa-menyewa antara dua pihak.

<sup>287</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Bunga Rampai Perwakafan*, ibid., hal. 86

<sup>288</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Bunga Rampai Perwakafan*, ibid., hal. 87

<sup>289</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Bunga Rampai Perwakafan*, ibid., hal. 87

sebagainya sehingga uang wakaf tetap pokoknya dan hasil untungnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik sesuai dengan peruntukan ketika ikrar wakaf.

Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Selatan, Yunus Mursid,<sup>291</sup> pemerintah hendaknya membuat peraturan tentang pengelolaan *baitul maal*. Badan ini dapat dibentuk oleh pemerintah atau badan swasta yang diawasi oleh pemerintah.

Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>292</sup> bentuk pengelolaan yang dimaksud adalah usaha. Wakaf tunai belum lazim di Indonesia, jadi harus dibedakan aturan wakaf tunai dan wakaf produktif, yaitu:

- a. Wakaf tunai, uang tidak boleh habis.
- b. Wakaf produktif, uang bisa dialihfungsikan ke bentuk barang-barang dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum (publik). Wakaf tunai merupakan salah satu metode kaum muslimin untuk berwakaf, dan dalam jumlah tertentu bisa dimanfaatkan dalam bentuk bermacam-macam. Dengan wakaf tunai bisa dikumpulkan untuk tujuan tersebut di mana tidak harus menjadi kaya dulu baru bisa berwakaf tunai. Bentuk pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan bisa untuk perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut Joni Emirzon, Profoser Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>293</sup> bila 5 prinsip

<sup>291</sup> Kuesioner, tanggal 29 Mei 2009

<sup>292</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>293</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009



*good corporate governance* diterapkan maka bisa baik. Salah satu prinsip dalam Islam, adalah terbuka secara universal. Transparansi harus terbuka dan jelas dan seterusnya, jadi *beneveciary* (pihak ketiga) yang mendapat manfaat wakaf juga harus jelas.

Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>294</sup> pengelolaan yang lebih baik berbentuk badan hukum (yayasan) dan pengelola harus mempunyai program yang jelas, dan pengelola harus bekerja secara profesional.

Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>295</sup> untuk sementara, apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Wakaf tersebut dapat dijalankan dulu, setelah itu baru dievaluasi.

Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>296</sup> yang paling tepat, wakaf tunai itu dikelola oleh badan yang dijamin oleh pemerintah melalui perangkat peraturan perundang-undangan.

Menurut Cholidi Zainuddin, Profesor Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>297</sup> antara setuju dan tidak setuju mengenai pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk perseroan terbatas atau bank. Ini merupakan sebab, karena bila pailit, menyebabkan putus amal jariah wakif yang bersangkutan.

<sup>294</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>295</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>296</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>297</sup> Wawancara, 10 Juni 2009

Menurut M. Syawaluddin Eka Saputra, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>298</sup> harus didirikan lembaga khusus pengelola dana wakaf tunai yang bertujuan agar dana wakaf tunai itu tidak sampai berkurang atau habis, menginventasikan dana wakaf tunai pada sektor yang paling aman dan menguntungkan sebagai lembaga pengelola perantara, yang mana harus memiliki kriteria profesional, amanat, dan teruji.

### 1. Wakaf Tunai Sebagai Modal/Saham untuk Mendirikan Perseroan Terbatas

Sesungguhnya keberadaan wakaf uang telah lama ada, bahkan dalam kajian fikih klasik persoalan ini telah diperbincangkan yaitu seiring dengan munculnya ide revitalisasi *fiqh mu'amalah* (fikih sosial) dalam perspektif *maqashid syari'ah* (filosofi dan tujuan syariat/hukum Islam) yang dalam pandangan Umar Chapra,<sup>299</sup> wakaf uang masuk dalam tataran *al-mashlahah al-mursalah* (kepentingan publik) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan adalah wakaf.<sup>300</sup> Ibnu Taimiyah meriwayatkan satu pendapat dari kalangan

<sup>298</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009

<sup>299</sup> Umar Chapra, 1992, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, SEBI, Jakarta, dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta

<sup>300</sup> Abdurrahman H., 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4

Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang,<sup>301</sup> dan diriwayatkan pula satu pendapat dari Muhammad ibn Abdullah Al-Anshari soal keabadian barang yang diwakafkan, bahwa wakaf dinar hanya akan bermanfaat ketika zat uangnya habis (lenyap ketika dimanfaatkan) dan jika bendanya tidak lenyap, maka tidak akan bermanfaat.<sup>302</sup> Maksudnya ialah manfaat uang itu akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik, meski secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara kekekalannya.

Wakaf benda bergerak dikenal dengan istilah *cash waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf tunai atau wakaf uang. Bila dilihat dari segi objek wakafnya adalah uang maka lebih tepat sekiranya istilah *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang, bukan wakaf tunai. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk juga dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga seperti saham, cek, dan lain-lain.<sup>303</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa, benda bergerak berupa uang dapat diwakafkan:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

<sup>301</sup> Ibn Taimiyah, 2000, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid ke-18, Juz ke-31, Dar Al-Kutub Ilmiyah, Beirut, hal. 101

<sup>302</sup> Ibn Taimiyah, *ibid.*, hal. 101

<sup>303</sup> <http://www.Bank Indonesia>, op cit



atas dapat melakukan *qardh*, yaitu meminjamkan uang tanpa meminta laba atau kelebihan, dan

- bagi yang memiliki uang berlebihan Islam menganjurkan untuk bersedekah atau berwakaf, tanpa mengharapkan kembalinya uang tersebut, dan semata-mata hanya mengharapkan balasan dan keridhaan dari Allah Swt semata.

Dari macam bentuk sistem ekonomi Islam, yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* yang dapat diterapkan sebagai bentuk pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk perseroan terbatas adalah *musyarakah*.

*Musyarakah* diartikan sebagai perseroan, maka dalam hal bagaimana proses dan prosedur pendirian perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana perseroan terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri/pemegang saham (sebelum/setelah perseroan terbatas menjadi badan hukum), direksi dan anggotanya, dewan komisaris, dan para anggotanya. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk notaris, dikenal dengan nama Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, di antaranya memuat mengenai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang memuat antara lain mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; dan jangka waktu berdirinya perseroan. Berkaitan dengan hal ini, hasil penelitian yang dilakukan mengenai wakaf tunai sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Saharuddin Bacik, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatra Selatan,<sup>310</sup> wakaf tunai yang akan dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas dapat dilakukan, asalkan cara pembagian keuntungan perseroan sesuai dengan syariah.
2. Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Selatan, Yunus Mursid,<sup>311</sup> dalam hal wakaf tunai yang akan dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas, benda atau wakaf tunai tidak boleh dijadikan modal/saham dalam perseroan terbatas, karena perseroan semacam ini masih diragukan keabsahannya menurut syariah. Ketika penanaman modal dalam perseroan terbatas menanggung risiko kerugian yang dapat menghilangkan objek wakaf itu sendiri.
3. Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>312</sup> hukumnya belum bisa ditetapkan, di mana wakaf tunai untuk mendirikan perseroan terbatas dapat dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas belum dapat dipastikan, karena secara fikih apakah sudah ada ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian hukumnya belum pasti.
4. Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis

<sup>310</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 25 Mei 2009

<sup>311</sup> Kuesioner, tanggal 29 Mei 2009

<sup>312</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>313</sup> dapat saja wakaf tunai dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas. Mengingat perseroan terbatas yang sekarang berlaku secara umum bukan perseroan syariah sehingga menimbulkan masalah siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini, demikian pula perlu diperhatikan berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan dalam hal pengembangan saham harus dilihat bergerak dalam bidang apa?

5. Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>314</sup> wakaf tunai dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas, sepanjang privatisasi dana wakaf tidak keluar dari esensi wakaf, maka dapat saja hal tersebut dilakukan.
6. Menurut K. N. Sofyan Hasan, dosen hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>315</sup> Wakaf Tunai dapat dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan Perseroan Terbatas, sepanjang tujuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat, kenapa tidak. Karena masih banyak orang-orang yang punya sementara hartanya tidak produktif secara optimal. Bagi masyarakat dengan adanya wakaf tunai, wakaf dapat menjadi suatu benda yang berdaya guna/produktif.

<sup>313</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>314</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>315</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009



7. Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>316</sup> wakaf tunai dapat dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas apabila hal ini dilakukan dengan cara yang jujur, amanah, dan transparan. Jadi dalam hal ini, kriteria-kriteria yang akan menjamin kelestariannya harus benar-benar diperhatikan.
8. Menurut Cholidi Zainuddin, Profesor Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>317</sup> wakaf tunai dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas dibolehkan bila saham dalam bentuk yang aman dan dalam bentuk *property* berupa saham rumah sakit, saham hotel, dan sebagainya. Dimaksudkan agar inti dari wakaf tunai itu jadi terhenti karenanya.

Wakaf tunai dahulu tidak dikenal. Ini sebagai pertimbangan ulama dahulu mengapa aset wakaf berupa masjid, tanah, lembaga pendidikan (benda tetap), karena asetnya tetap ada bahkan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain mengingat wakaf tunai merupakan perkembangan baru era wakaf, dikhawatirkan sewaktu-waktu akan merugi bila wakaf tunai dijadikan saham dalam rangka membuat perseroan terbatas.

9. Menurut M. Syawaluddin Eka Saputra, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden

<sup>316</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>317</sup> Wawancara, 10 Juni 2009

Fatah,<sup>318</sup> wakaf tunai dapat dijadikan sebagai modal/saham untuk mendirikan perseroan terbatas. Selama perseroan terbatas memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi badan pengelola wakaf tunai masyarakat, sektor usaha yang aman dan menguntungkan, usaha itu tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan menurut syariah.

## 2. Wakaf Tunai Dibelikan Saham pada Perseroan Terbatas Tertentu

Pendapat Muhammad Az-Zarqa, bahwa tujuan nadhir dalam mengelola wakaf produktif terbatas pada mencari sebesar mungkin keuntungan yang halal, dan tidak boleh mengalihkan pada tugas lainnya seperti meningkatkan pelayanan, atau memperindah lingkungan, atau memproduksi barang pokok yang dapat memenuhi kebutuhan pokok di masyarakat dan lain sebagainya.<sup>319</sup> Dalam upaya untuk mencapai tujuan agar wakaf dapat berdaya guna dan menghasilkan manfaat, maka strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf,<sup>320</sup> yaitu dengan cara dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.<sup>321</sup>

<sup>318</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009

<sup>319</sup> Mundzir Qahaf, op cit., hal. 240-241

<sup>320</sup> H.A.R. dan L.H. Kramers, 1981, *Shorter Encyclopedia of Islam*, South Asian Publication, Karachi-Pakistan, hal. 642-28

<sup>321</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, op cit., hal. 39

Direktorat Jenderal Wakaf Turki terus mengembangkan wakaf tunai secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan publik, yaitu dengan melakukan kerja sama dan investasi di berbagai lembaga antara lain: Yvalik and Aydem Olive Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital dan lain sebagainya. Dalam rangka pemberdayaan wakaf secara profesional-produktif, maka yang harus dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenadhiran, pola kemitraan usaha bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dan dukungan *political will* pemerintah secara penuh.<sup>322</sup>

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia sebagai satu-satunya pilar penting dalam lingkaran arus birokrasi pemerintahan yang memiliki tugas pokok pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf merasa perlu menyusun sebuah ide peningkatan organisasi zakat dan wakaf. Meski secara kelembagaan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf memang terhitung masih baru, namun dilihat dari aspek tanggung jawab yang akan diemban cukup besar, karena zakat dan wakaf merupakan ajaran prinsip dalam Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan sosial.<sup>323</sup> Ide-ide pengembangan organisasi zakat dan wakaf digulirkan

<sup>322</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta, hal. 5

<sup>323</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, op cit., hal. 16



dalam rangka merespons wacana wakaf tunai, yang berarti akan memunculkan peluang yang luar biasa terhadap potensi wakaf secara umum.

Pengelolaan dana wakaf yang berasal dari uang tunai yang diasumsikan untuk dijadikan saham-saham dalam bentuk perseroan terbatas memerlukan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang merupakan jalinan keterkaitan antar-*stakeholder* perusahaan yang digunakan untuk menetapkan dan mengawasi arah strategi dan kinerja usaha perusahaan. Seyogianyalah pengelolaan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk wakaf tunai dalam bentuk saham ini dilakukan secara profesional. Yaitu dengan cara wakaf benda bergerak itu, kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi.<sup>124</sup>

Meskipun ada tradisi kelembagaan ekonomi yang berkembang dalam sejarah Islam, seperti lembaga wakaf yang oleh Marshall Hodgson (1974) disebutnya sebagai "*vehicle for financing Islam as society*", namun institusinya tidak dapat memiliki kapasitas hukum yang dimiliki kapasitas hukum yang mutlak sebagaimana kapasitas hukum yang dimiliki oleh seseorang/pribadi. Lembaga wakaf, tidak dapat melakukan kontrak atas dirinya dengan orang atau lembaga lain di mana segala tindakan hukum dalam kelembagaan wakaf hanya dapat dilakukan atas nama pribadi yang *mutawaali* (nadhir/ pengelola wakaf).

Oleh karena saham-saham yang berasal dari wakaf tunai (*cash waqf*) tidak dapat dimiliki oleh *stakeholders*

<sup>124</sup> Tulus, op cit., hal. 8

perusahaan (nadhir perseroan) dan kedudukan para pengelola perseroan terbatas wakaf tunai (nadhir perseroan) berstatus sebagai organ perseroan wakaf tunai yang berhak mendapat gaji 10% dari keuntungan perusahaan wakaf dan selebihnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat/publik sesuai dengan perjanjian (niat) wakif tunai.

Menurut Junaedi Bohaniputera, *syirkah* sama dengan perseroan, diartikan *ikhtilath*, yaitu percampuran.<sup>325</sup> Definisinya, akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan. Modal, ialah harta benda dan pekerjaan. Perseroan terdiri atas:

1. Perseroan Milik:

- a. milik serikat atas dasar usaha, misalnya harta waris atau harta yang dibeli bersama-sama.
- b. milik serikat tanpa dasar usaha, misalnya harta temuan.

2. Perseroan Kontrak, yaitu perserikatan atas dasar perjanjian, misalnya:

- a. perseroan harta, biasanya dilakukan dalam perseroan terbatas bagi yang memegang saham, sebagai pemilik perusahaan perseroan terbatas.
- b. perseroan kerja, bagi kelompok yang mengelola perusahaan perseroan terbatas, dari mulai manajer hingga para pelaksana lapangannya.

Gabungan antara pemegang saham (pemilik modal) dengan kelompok pengelola dalam perseroan terbatas, yang

<sup>325</sup> Junaedi Bohaniputera, 1992, *Islam dan Entrepreneurialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*, Kalam Mulia, Jakarta, Cet. ke-2, hal. 147

diikat dengan perjanjian yang mereka kehendaki, apakah perjanjian 'bagi hasil' atau perjanjian 'buruh'. Di mana,<sup>326</sup>

- a. perjanjian bagi hasil, berarti unsur harta dan unsur tenaga (*skill*) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai 'modal'. Jadi ada partisipan modal harta atau investor (*rabb al-mal*), dan ada partisipan modal *skill* atau pengusaha (*mudlarib*).
- b. Perjanjian buruh, berarti unsur harta dan tenaga tidak sama kedudukannya. Pemilik harta sebagai yang punya kuasa dan pemilik tenaga selaku yang diserahi tugas.

Saham adalah salah satu bentuk wakaf benda bergerak selain uang. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf Uang menyatakan bahwa benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang berupa:
  1. saham,
  2. surat uang negara,
  3. obligasi pada umumnya, dan/atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual berupa:
  1. hak cipta,
  2. hak merek,
  3. hak paten,

<sup>326</sup> Junaedi Bohaniputera, *ibid.*, hal. 147-148



4. hak desain industri,
  5. hak rahasia dagang,
  6. hak sirkuit terpadu,
  7. hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (Pasal 21).<sup>327</sup>

Hal-hal yang termasuk benda menurut hukum, adalah segala sesuatu yang dapat dihaki, baik benda-benda yang terlihat (nyata) maupun benda-benda yang tidak dapat dilihat. Wakaf tunai/uang dalam hal ini merupakan benda yang dapat dihaki karena uang bisa terlihat (diserahkan secara *cash*) maupun tidak dapat dilihat (ditransfer melalui bank), tetapi yang dimaksud dengan dihaki bukan dimiliki secara mutlak namun dihaki yang dimaksudkan dalam kaitannya dengan asumsi saham wakaf adalah diberi kebebasan untuk mengelolanya.

Benda dibagi menjadi benda bergerak (*roerende goederen*) dan benda tidak bergerak (*onroerende goederen*). Kemudian benda bergerak ada yang dapat dihabiskan dan ada

<sup>327</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang, op cit

benda yang tidak dapat dihabiskan. Habis di sini dimaksudkan benda itu habis karena dipakai.<sup>328</sup> Saham (sero) termasuk dalam kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bahwa:

- a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak.
- b. Hak atas bunga yang diperjanjikan.
- c. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak.
- d. Sero atau saham-saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau perusahaan, sekalipun benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah benda tidak bergerak. Sero atau saham itu dianggap merupakan benda bergerak, akan tetapi hanya terhadap para penyertanya selama persekutuan berjalan.
- e. Saham dalam utang-piutang atas beban Negara Republik Indonesia, baik saham karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat berharga lain serta kupon-kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya.
- f. Saham-saham atau kupon obligasi, dalam utang-piutang lain termasuk juga utang oleh negara

<sup>328</sup> I.G. Rai Widjaya, op cit., hal. 136

asing.<sup>329</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 34, penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penyeteroran saham adalah dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan.

Saham adalah kertas yang merepresentasikan hak pemilikinya dalam kepemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan keanggotaannya dalam dewan umum pemegang saham, atau dengan jalan dewan komisaris. Saham memberikan bagian keuntungan berdasarkan rasio saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut jika ada keuntungan, ikut menanggung kerugian sebagian *nisbah* penanaman sahamnya jika perusahaan tertimpa kerugian dan pemilik saham juga berhak atas hasil akhir perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi.

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, yang eksistensinya tidak bergantung kepada keberadaan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pengertian "terbatas" harus diartikan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham terbatas kepada saham yang dimilikinya.<sup>330</sup> Menurut M. Fuad, perseroan terbatas, adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri

<sup>329</sup> I.G. Rai Widjaya, op cit., hal. 138-139

<sup>330</sup> Dhaniswara K. Harjono, op cit., hal. 2



yang terpisah dari kekayaan, hak, dan kewajiban para pendiri maupun pemiliknya.<sup>331</sup> Sesuai dengan namanya, keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik perseroan terbatas hanya terbatas pada saham yang dimiliki.

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini menegaskan ciri perseroan, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007).

Pada prinsipnya, yang berhak menjadi pemegang saham suatu perseroan, adalah setiap individu (subjek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum; dan/atau badan hukum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dapat menjadi pemegang saham perseroan. Tujuan untuk membeli saham, yaitu untuk menjadi bagian pemilik suatu perseroan, mendapatkan dividen, spekulasi agar mendapat kapital selisih harga beli dengan harga jual saham. Beberapa bentuk tipe saham, yaitu:

1. Saham biasa (*common stock*), biasa dijual di bursa efek.
2. Saham preferen (*preferred stock*), memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan saham biasa dalam pembagian dividen dan aset. Kadang kala memiliki hak pilih yang lebih tinggi seperti kemampuan untuk memveto

<sup>331</sup> M. Fuad, et.al., 2000, Pengantar Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

penggabungan/pengambilalihan/hak untuk menolak ketika saham baru dikeluarkan. Pemegang saham preferen dapat membeli saham yang dikeluarkan sebanyak yang dia mau sebelum saham itu ditawarkan kepada orang lain.

3. Saham harta (*treasury stock*), adalah saham yang telah dibeli balik dari masyarakat.
4. Saham kelas ganda (*dual class stock*), memiliki beberapa kelas saham (contoh kelas A, kelas B, kelas C) dengan keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri.<sup>332</sup>

Dalam hukum Islam, persoalan saham/bursa saham belum dijumpai dalam fikih klasik, pembahasannya baru dijumpai dalam fikih modern pada bagian *syirkah* dan dikenal dengan istilah *syirkah al-asham* (perserikatan dalam modal). Dalam akadnya, apabila perseroan mendapat keuntungan maka pemilik saham akan menerima imbalan sesuai dengan persentase modal yang diberikan. Begitu pula sebaliknya, jika perseroan mengalami kerugian maka pemilik saham pun ikut menanggung kerugian sesuai dengan persentase modalnya.

Karena itu, *musahamah* dimasukkan oleh ahli fikih modern sebagai salah satu bentuk *syirkah* (perusahaan). Dalam akad *musahamah*, perusahaan berupaya untuk mencari modal sebanyak-banyaknya dari masyarakat melalui penjualan saham. Bertujuan agar modal perusahaan menjadi lebih besar, lebih bonafide dan dapat dijalankan dengan baik guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

<sup>332</sup> Wikipedia, 13-11-2009, Tipe Saham, <http://id.wikipedia.org/wiki/saham>

Saham sebagai modal dasar untuk mendirikan perseroan terbatas, dalam hukum Islam terdapat dasar hukum yang berasal dari hadis berkenaan dengan *qiradh* (saham). Dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah saw bersabda, *Ada tiga yang di dalamnya berisi barakah, yaitu jual-beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya'ir (anggur) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.* (HR. Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah).<sup>333</sup>

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Yang dimaksud dalam ketentuan ini, adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (Pasal 48 ayat 1). Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah (Pasal 49 ayat 1).

Jumlah pendiri saham suatu perseroan sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1). Yang dimaksud dengan orang, adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Hal ini menegaskan prinsip yang berlaku bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>334</sup> Dan sebagai suatu perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka setelah memiliki status sebagai badan hukum pun pemegang saham perseroan terbatas tetap dibatasi hingga sekurang-kurangnya dua orang atau badan hukum.

<sup>333</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar As-Qalani, op cit., hal. 453

<sup>334</sup> Gunawan Widjaja, 2008, op cit., hal. 135



Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:<sup>335</sup>

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau
2. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:

1. Hak individual yang melekat pada diri pemegang saham (pemegang saham mayoritas/pengendali), yang dimilikinya yang terkait dengan:
  - a. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*).
  - b. Hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya.
  - c. Hak untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - d. Hak untuk hadir dan bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - e. Hak untuk memperoleh dividen.
  - f. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi.
  - g. Hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sebagai jaminan utang.
  - h. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan

<sup>335</sup> Gunawan Widjaja, 2007, *op cit.*, hal. 38

ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris

- i. Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan, atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- j. Hak untuk *exit* atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas.  
Berkaitan dengan hak pemegang saham secara umum dalam hal pembelian saham, yaitu:
  1. Hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya.
  2. Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan, atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, hak-hak individual yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut di atas, diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 51 jo. 48 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 71, Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (4), Pasal 85 ayat (1), Pasal 138 ayat (3), Pasal 144 ayat (1)).

Hak pemegang saham minoritas (non-pengendali), dikategorikan ke dalam:

- a. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap perseroan terbatas.
  - b. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas.
3. Hak yang diturunkan dari perseroan yang dinamakan hak *derivatif* (*derivative suit* atau *derivative action*), yaitu:
- a. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit (1/10) satu sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
  - b. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit (1/10) satu sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat melalui pengadilan negeri terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.



Persyaratan untuk menjadi pemegang saham pada suatu perseroan harus memenuhi persyaratan dan lulus uji kelayakan (*fit and proper test*) terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, dengan memerhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asumsi wakaf tunai untuk membeli saham pada perseroan terbatas berawal pada pemikiran, di mana pada umumnya semua subjek hukum yang dapat bertindak atau orang perorangan yang cakap bertindak dalam hukum dapat membeli atau memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas, dengan ketentuan bahwa bagi perseroan terbatas itu sendiri, yang dimaksud untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan;
2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>336</sup>

Pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas sendiri, baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan hal tersebut batal karena hukum. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beriktikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum. Saham yang dibeli kembali perseroan hanya boleh dikuasai paling lama 3 (tiga) tahun. Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Menurut Undang-Undang Wakaf, saham merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak, dalam kaitannya dengan asumsi wakaf tunai setelah mencapai nilai nominal tertentu dapat dibeli saham pada perseroan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai wakaf tunai dibeli saham pada perseroan terbatas tertentu, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Saharuddin Bacik, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatra Selatan,<sup>337</sup> wakaf tunai tidak dapat dibeli saham pada perseroan terbatas tertentu, hal ini tidak sesuai dengan syariat hukum Islam.

<sup>336</sup> Gunawan Widjaja, 2007, *op cit.*, hal. 45

<sup>337</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 25 Mei 2009

2. Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Yunus Mursid,<sup>338</sup> wakaf tunai tidak dapat dibeli saham pada perseroan terbatas tertentu. Bahwa benda (wakaf tunai) tidak boleh dijadikan modal dalam perseroan terbatas, karena perseroan semacam ini masih diragukan keabsahannya menurut syariah. Begitu pula wakaf tunai dibeli saham pada perseroan tertentu, ketika penanaman modal dalam perseroan terbatas menanggung risiko kerugian yang dapat menghilangkan objek wakaf itu sendiri.
3. Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>339</sup> wakaf tunai dibeli saham pada Perseroan Terbatas tertentu diperbolehkan, asal sesuai dengan syari'at.
4. Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>340</sup> wakaf tunai dibeli saham pada perseroan terbatas tertentu, dalam hal ini harus menggunakan teori transplantasi hukum. Transplantasi hukum dapat terjadi kapan dan di mana saja.<sup>341</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, sejarah menunjukkan bahwa hukum yang ditransplantasikan (melalui asas konkordansi), khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab

<sup>338</sup> Kuesioner, tanggal 29 Mei 2009

<sup>339</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>340</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>341</sup> Gunawan Widjaja, 2008, op cit., hal. 375



Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>342</sup> Membeli saham dalam valuta asing-bursa efek, ada unsur riba (haram), dan jika membeli saham pada perseroan terbatas biasa hanya untuk mendapatkan profit, ini dapat saja sebagai pengembangan saham dengan cara membeli saham baru pada perseroan terbatas lain.

5. Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>343</sup> wakaf tunai dibelikan saham pada perseroan terbatas tertentu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saham merupakan objek wakaf, maka sepanjang saham dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lembaga wakaf dan digunakan untuk kemaslahatan umat hal tersebut dapat dilakukan.
6. Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>344</sup> wakaf tunai dibelikan saham pada perseroan terbatas tertentu, sekali lagi sepanjang itu untuk tujuan kemaslahatan umat dan menciptakan peluang lebih banyak bagi umat, maka dibolehkan.
7. Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>345</sup> wakaf tunai dibelikan saham pada perseroan terbatas tertentu boleh saja dilakukan sebagai investasi dalam bentuk pembelian saham pada perseroan terbatas, yang

unawan Widjaja, 2008, op cit., hal. 379

esioner, tanggal 5 Juni 2009

esioner, tanggal 9 Juni 2009

awancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

penting bahwa substansi atau esensi wakaf tunai tersebut tetap terjamin.

8. Menurut Cholidi Zainuddin, Profesor Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>346</sup> wakaf tunai dibelikan saham pada perseroan terbatas tertentu tidak setuju, karena dimaksudkan wakaf tunai di sini adalah wakaf patungan, yaitu wakaf tunai yang dikumpulkan setelah mencapai nilai nominal dibelikan dalam bentuk saham perseroan terbatas. Hal ini dikhawatirkan bila perseroan terbatas tersebut rugi atau pailit, siapa dan bagaimana pertanggungjawaban untuk selanjutnya.
9. Menurut M. Syawaluddin Eka Saputra, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>347</sup> wakaf tunai dibelikan saham pada perseroan terbatas tertentu, bila membeli saham pada bursa efek haram hukumnya, tapi membeli saham dengan prinsip selama tidak mengandung spekulasi yang tinggi dapat saja dana wakaf tunai dibelikan saham.

### 3. Saham Wakaf Tunai Sebagai Agunan/Jaminan

Menurut istilah wakaf, ialah menahan, karena barang yang diwakafkan ditahan dari penggunaan pemiliknya. Menurut *syara'* ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih utuh, agar manfaatnya khusus untuk jalan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>348</sup> *Waqaf* jamaknya diartikan sebagai sesuatu yang

<sup>346</sup> Wawancara, 10 Juni 2009

<sup>347</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009

<sup>348</sup> Syekh Manshur Ali Nashif, op cit, hal. 733

substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan wakaf tersebut (pewakaf/wakif). Dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar.<sup>349</sup>

Wakaf, menurut syariat adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tabbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tabbisul ashli*, ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>350</sup> As-Shan'ani mengartikan *waqaf* menurut pengertian bahasa adalah tahan, dan *waqaf* menurut pengertian syariat (istilah) adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, tanpa boleh pembelanjaan untuk hambanya pada pembelanjaan yang dibolehkan.<sup>351</sup>

Berdasarkan hakikat hukum dan muatan ekonomi serta peranan sosial wakaf, maka definisi wakaf Islam, adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.<sup>352</sup> Hal ini dapat diketahui secara

<sup>349</sup> M. A. Mannan, 1999, *Cash Waqf Certificate: An Innovation in Islamic Financial Instrument, Prooceding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, hal. 9-10

<sup>350</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, op cit., hal. 1

<sup>351</sup> As-Shan'ani, *Subulussalam*, Jilid ke-3, Cet. ke-1, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, hal. 311

<sup>352</sup> Mundzir Qahaf, op cit., hal. 53



menyeluruh bahwa semua bentuk dan jenis wakaf, mengandung pengertian:

1. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat. Maka setiap barang yang dapat bermanfaat atau menghasilkan barang disebut modal, sesuai dengan pengertian ekonomi.
2. Mencakup harta, berupa benda bergerak (buku, senjata, peralatan, kendaraan, uang seperti deposito, saham, dan pinjaman) dan benda tidak bergerak (tanah, bangunan).
3. Melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang.
4. Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar, atau selamanya.
5. Wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, berupa barang, jasa dan menyalurkan laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
6. Wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja.
7. Pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, mengatur mengenai saham dapat diagun dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain

dalam anggaran dasar (Pasal 60 ayat 2). Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (Pasal 60 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham tersebut. Dengan ketentuan, bahwa hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham (Pasal 60 ayat 4).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40, menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Upaya untuk menahan pokok (*tabbisu ashli*) wakaf tunai yang dijadikan sebagai saham perseroan terbatas, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Wakaf melarang harta benda wakaf untuk dijaminkan (diagunkan). Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (2) menyatakan hal sama, dengan penafsiran pada pasal tersebut yang mengandung arti tidak membolehkan saham untuk dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia karena telah ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Oleh karena itu dalam upaya agar saham perseroan terbatas yang berasal dari wakaf tunai tidak diagunkan (gadai/jaminan fidusia), maka dalam anggaran dasar perseroan terbatas wakaf tunai mencantumkan, bahwa saham perseroan terbatas dilarang untuk diagunkan (gadai/jaminan fidusia), disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam

upaya menahan kepemilikan asal/pokok/saham perseroan terbatas wakaf tunai karena manfaatnya untuk kepentingan umum/publik (keagamaan, kebudayaan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya).

Hasil penelitian berkaitan dengan saham wakaf tunai sebagai agunan/jaminan:

1. Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Selatan, Yunus Mursid,<sup>353</sup> menurut hukum perdata saham dapat diagunkan atau dijaminkan, tapi tidak jelas menurut syariah. Dalam syariah benda yang dijaminkan adalah hak penuh milik penjamin, sedangkan saham perseroan merupakan sebagian hak miliknya karena terdapat hak pemilik lainnya dari keseluruhan modal perseroan.
2. Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>354</sup> saham dapat diagunkan atau dijaminkan secara administrasi, tapi masih diragukan karena manfaatnya untuk apa?
3. Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>355</sup> saham dapat diagunkan atau dijaminkan, karena bernilai ekonomis. Yang jadi masalah bila berkaitan dengan saham dari wakaf tunai, bila diagunkan atas nama siapa?

<sup>353</sup> Kuesioner, tanggal 29 Mei 2009

<sup>354</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>355</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009



4. Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>356</sup> dalam hal saham dapat diagunkan atau dijaminkan, mengingat saham sebagai objek wakaf seharusnya ada pembatasan tidak seperti saham yang berlaku pada umumnya, karena itu saham yang berasal dari wakaf tunai tidak dapat diagunkan/dijaminkan.
5. Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>357</sup> saham dapat diagunkan atau dijaminkan, mengapa tidak, sekarang emas saja sudah dapat diterima oleh bank sebagai barang gadai, apalagi saham.
6. Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>358</sup> saham dapat diagunkan atau dijaminkan menurut hukum Islam, asal saham itu jelas. Saham dijaminkan untuk mendapatkan dana yang lebih besar di tempat lain. Wakaf tunai, dapat diagunkan/dijaminkan asal dengan sistem non-*ribawi*.
7. Menurut M. Syawaluddin Esa, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>359</sup> saham tidak boleh/tidak dapat diagunkan atau dijaminkan, karena saham sudah disertakan sebagai inventasi.

<sup>356</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>357</sup> Kuesioner, 9 Juni 2009

<sup>358</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>359</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009

## V

### KEDUDUKAN HUKUM PENGELOLA WAKAF TUNAI (NADHIR) DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

#### A. Kedudukan Nadhir Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Wakaf Tunai

Perkembangan praktik ekonomi Islam saat ini memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Terdapat beberapa sektor ekonomi syariah yang perlu digarap secara lebih serius, yaitu:

1. ZIS (zakat, infak, dan sedekah)
2. Wakaf, termasuk wakaf uang (wakaf tunai)
3. Perbankan syariah
4. Sukuk atau obligasi syariah
5. Lembaga keuangan
6. Mikro (LKM) syariah, seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)<sup>360</sup>

Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan wakaf tidak akan bernilai amal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya)

<sup>360</sup> <http://murkholis77-staff.vii.ac.id/>, op cit

sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf. Menurut M. A. Mannan, unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan aset miliknya yang telah diwakafkannya (*refraining*) yang disertai penyerahannya kepada kemaslahatan publik menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu sebagaimana doktrin amal jariyah.<sup>361</sup>

Wakaf tunai sebagai salah satu sektor ekonomi syariah yang perlu digarap dengan harapan dapat memberikan manfaat yang nyata terhadap publik. Menurut kitab fikih klasik unsur (rukun) wakaf, yaitu:

- a) *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan.
  - b) *Maukuf*, yaitu harta benda yang diwakafkan.
  - c) *Maukuf'alaih*, yaitu yang berhak menerima manfaat atau hasil dari harta benda yang diwakafkan.
  - d) *Shighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.
1. wakif,
  2. nadhir,
  3. harta benda wakaf,
  4. ikrar wakaf,
  5. peruntukan harta benda wakaf, dan
  6. jangka waktu wakaf.

<sup>361</sup> M.A. Mannan, 1997, *Teori Praktik Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta



Aspek keterampilan nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih dari berbagai pihak yang terkait (Badan Wakaf Indonesia, Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, para pakar hukum/akademisi/praktisi hukum). Dalam pemikiran fikih tidak ditemukan ketentuan tentang macam-macam nadhir, namun dirumuskan bahwa setiap orang yang mampu melakukan tindakan hukum dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya boleh menjadi nadhir atau juga disebut *mutawalli*.<sup>365</sup>

Secara administratif, wakaf diamanatkan, dikelola, dan dikembangkan oleh nadhir (*mutawalli*) profesional, yaitu bekerja atas dasar profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam.<sup>366</sup> Karakteristik profesi, antara lain:

- a. Adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik.
- b. Adanya komitmen moral yang tinggi.
- c. Mendapatkan bayaran atau upah yang setimpal dengan pekerjaannya.
- d. Pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ada izin khusus dalam menjalankan profesinya.

Dengan demikian, nadhir profesional adalah manajer yang dalam mengelola harta wakaf mengacu pada prinsip-

<sup>365</sup> Duski Ibrahim, op cit., hal. 79

<sup>366</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Nazhir Profesional dan Amanah*, hal. 70

prinsip manajemen modern, yang bekerja serius, disiplin, dan bertanggung jawab.<sup>367</sup>

Terkait dengan adanya “keabadian” unsur pokok (substansi) maka keberadaan wakaf tunai harus tidak berhenti, tidak boleh dijual, atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh wakif kepada nadhir. Untuk itu pengelolaan wakaf benda bergerak (wakaf tunai/uang, saham) dilakukan oleh suatu badan tersendiri. Wakaf benda bergerak tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi.<sup>368</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (3), menyebutkan nadhir dalam bentuk badan hukum (contoh, Perseroan Terbatas).

Dalam berbagai literatur, istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtspersoon*, *persona moralis* (latin), *legal persona* (Inggris). Badan hukum adalah salah satu subjek hukum.<sup>369</sup> Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

<sup>367</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Nazhir Profesional dan Amanah*, *ibid.*, hal. 80

<sup>368</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, *op cit.*, hal. 97

<sup>369</sup> Joni Emirzon, 2005, “Eksistensi Yayasan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Permasalahannya”, dalam Abu Daud Busroh, *Derap Langkah Menabur Keadilan: Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara*, Jilid ke-1, Cet. Ke-1, Sinar Grafika Offset, hal. 330

Pasal 1655 *Burgelijk Weetboek*, disebutkan ada 4 macam *zedelijk livbaam* yang kini disebut sebagai badan hukum, yaitu:

1. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah (*op openbaar gezag ingesteld*). Contoh daerah-daerah otonom seperti provinsi, kabupaten, bank tabung pos, bank koperasi, dan lain-lain.
2. Badan hukum yang diakui (*erkend*). Contoh badan-badan keagamaan.
3. Badan hukum yang diperizinkan (*als geoorloofd toegelaten*).
4. Badan hukum yang didirikan oleh orang-orang partikelir dengan suatu tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan.

Contoh nomor 3 dan 4 meliputi semua perkumpulan partikelir yang menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan, yaitu *Staatsblad* 1870-64 tersebut dianggap sebagai badan hukum. Badan hukum dalam kaitannya dengan perwakafan di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia yang berada di pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan, tetapi disayangkan hal ini belum terealisasi dengan baik.

Menurut Sentosa Sembiring, sifat badan hukum seperti ini disebut badan hukum, di mana dalam suatu badan usaha harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik, harta pengurus dengan harta perusahaan. Maka konsep seperti ini merupakan ciri utama dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum.<sup>370</sup> Definisi badan hukum, yaitu badan atau

<sup>370</sup> Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. ke-2, CV. Nuasa Aulia, Bandung, hal. 12



perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti: perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya.<sup>371</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, nadhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan penyusunan benda wakaf. Berdasarkan hal itu, perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka nadhirnya yang berbentuk badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang tergabung dalam satu badan hukum sesuai dengan hukum Indonesia.<sup>372</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nadhir yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas, sehingga dapat dipahami bahwa kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas merupakan salah satu organ perseroan, dan ia bisa berkedudukan sebagai pemegang saham (dewan komisaris) atau pengelola perseroan (dewan direksi).

Menurut Abdullah Gofar, dalam perwakafan sebaiknya pengelola harta wakaf (nadhir) berbentuk badan hukum dengan tidak mengesampingkan bahwa nadhir boleh saja berbentuk kelompok orang.<sup>373</sup> Alasannya bahwa pengelola wakaf sebaiknya badan hukum adalah:<sup>374</sup>

1. Jika pengelola wakaf berbentuk badan hukum, maka dari aspek keamanan dan pengawasan tentunya akan lebih baik dibandingkan dengan perorangan atau kelompok

<sup>371</sup> Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Cet. ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 41

<sup>372</sup> Abdul Gofar, 2004, "Keberadaan Undang-Undang Wakaf di dalam Perspektif Tata Hukum Nasional", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta, hal. 99

<sup>373</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>374</sup> Abdul Gofar, op cit., hal. 49

orang.

2. Badan hukum tidak terkait pada jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip wakaf yang berlaku selamanya. Jika pengelola wakaf perorangan atau kelompok orang mengandung kelemahan yaitu faktor usia, administratif, dan aspek nontekhnis lainnya, sehingga pada akhirnya harapan menjadi lembaga wakaf sebagai alternatif dan dapat diandalkan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam tidak tercapai.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, resistensi sebagian orang terhadap wakaf produktif dan wakaf uang, karena adanya anggapan bahwa harta wakaf bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan orientasi tujuan wakaftanya aspek ukhrawi, tetapi hasil-hasilnya yang diberikan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan melalui pengelolaan secara baik dan profesional dengan tetap berbasis dasar-dasar syariah.<sup>375</sup> Alasan kenapa nadhir harus berupa badan hukum atau sekelompok orang, karena pengalaman membuktikan bahwa nadhir perseorangan telah banyak membuka peluang terjadinya penyelewengan dan/atau pengabaian terhadap tugas-tugas kenadhiran.<sup>376</sup>

Terdapat adanya keharusan unsur tanggung jawab pada badan pengelola (nadhir), karena aspek tanggung jawab oleh seorang nadhir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Kalau rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nadhir,

<sup>375</sup> Duski Ibrahim, op cit., hal. 9

<sup>376</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, op cit., hal. 12

maka wakaf hanya sebagai institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa pun, bahkan akan menjadi beban masyarakat (umat Islam).<sup>377</sup> Hal ini merupakan salah satu aspek antisipasi terhadap kekhawatiran akan hilangnya aset wakaf tunai apabila dikembangkan dalam bentuk saham dan dijadikan sebagai modal untuk mendirikan perseroan terbatas.

Nadhir sebagai profesi dapat dijadikan pegangan hidup dan dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, nadhir berhak mendapat upah yang wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>378</sup> Dalam kaitannya dengan kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas, dapat dikatakan ia sebagai dewan direksi yaitu sebagai direktur/pengelola perseroan.

Investasi dana wakaf tunai dengan beragam model selayaknya dilakukan oleh nadhir yang profesional. Menurut fikih ada dua pandangan terhadap posisi nadhir dalam hal ini, yaitu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa nadhir adalah penerima, penyalur sekaligus pengelola harta (dana) wakaf.
2. Pendapat yang menyatakan bahwa nadhir hanyalah sebagai penerima dan penyalur harta (dana) Wakaf, sedangkan pengelolaan harta (dana) wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk

<sup>377</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, op cit., hal. 105

<sup>378</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, op cit., hal. 49-50



menghindari adanya kemungkinan negatif (moral/*bazard*).<sup>379</sup>

Dari kedua pendapat tersebut, nadhir yang memungkinkan mengelolawakaf dengan menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan adalah pendapat yang pertama, sedang bagi pendapat yang kedua, siapa pun yang mengelola harta (dana) wakaf agar produktif tidak dijelaskan.

Yang mengurus perseroan terbatas, dilakukan oleh orang-perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan direksi yang berada di bawah pengawasan dewan komisaris. Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota direksi adalah direktur.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>380</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>381</sup> Anggota dewan komisaris disebut dengan

<sup>379</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, op cit., hal. 42-43

<sup>380</sup> Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, op cit., Pasal 1 butir 5

<sup>381</sup> Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, op cit., Pasal 1 butir 6

nama komisaris, dewan komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang-perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Anggaran dasar perseroan mengatur mengenai besarnya jumlah anggota komisaris, yaitu:

1. Mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen, adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.
2. 1 (satu) orang komisaris utusan, adalah anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap kegiatan pengurusan oleh direksi perseroan.<sup>382</sup>

Hasil penelitian yang berkaitan dengan kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Saharuddin Bacik, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatra Selatan,<sup>383</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai adalah sebagai dewan direksi, bukan pemilik/pemegang saham/dewan komisaris. Sehingga bila ada keuntungan khusus untuk jabatan nadhir dalam perseroan terbatas

<sup>382</sup> Gunawan Widjaja, 2007, op cit., h. 79-80

<sup>383</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 25 Mei 2009

tersebut digaji 10% dari keuntungan perseroan dan selebihnya untuk kepentingan publik.

Dalam hal siapa yang berhak menjadi nadhir wakaf tunai, Badan Wakaf Indonesia tidak setuju, di mana dalam Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia masih dipermasalahkan yang isinya, wakaf uang, nadhirnya adalah Badan Wakaf Indonesia, sedangkan kedudukan Badan Wakaf Indonesia adalah memberhentikan nadhir dan mengangkat nadhir yang baru. Ini masalah, siapa yang berhak menjadi nadhir wakaf tunai. Dalam Undang-Undang Wakaf disebutkan yang menjadi nadhir wakaf tunai dalam bentuk sertifikat wakaf tunai, adalah Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang tugasnya sebagai pengelola, penghimpun dan pengembang dana wakaf tunai dalam bentuk pengembangan perekonomian umat.

2. Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Selatan, Yunus Mursid,<sup>384</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai tidak dapat ditentukan. Yang terutama dalam hal ini adalah agar pemerintah hendaknya membuat peraturan tentang pengelolaan *baitul maal* (wakaf). Badan ini dapat dibentuk oleh pemerintah atau badan swasta yang diawasi oleh pemerintah sehingga mengenai kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai dapat diatur.

<sup>384</sup> Kuesioner, tanggal 29 Meri 2009



Di samping itu pula mengingat benda atau wakaf tunai tidak boleh dijadikan modal/saham dalam perseroan terbatas karena perseroan masih diragukan keabsahannya menurut syariat, dikhawatirkan ketika penanaman modal dalam perseroan menanggung risiko kerugian yang dapat menghilangkan objek wakaf maka siapa yang bertanggung jawab.

3. Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>385</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai sebagai wakil bukan sebagai pemilik saham, dan mendapat gaji dari usaha tersebut.
4. Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>386</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai, dalam hukum Islam kedudukan nadhir mewakili umat untuk mengelola dan melaksanakan sesuai dengan visi perseroan terbatas, dan nadhir dapat diwakili oleh berbagai golongan jangan hanya 1-2 nadhir saja. Perlengkapan perseroan terbatas:
  - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - Direksi (pemegang saham, pelaksana RUPS, direksi, direktur, nadhir).
  - Komisaris, sebagai pengawas.

Kedudukan nadhir dalam perseroan wakaf tunai sebagai direksi perseroan.

<sup>385</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>386</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

5. Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>387</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai belum dapat ditentukan karena dalam hal ini harus dipisahkan antara lembaga wakaf, nadhir, dan perseroan terbatas karena masing-masing filosofinya berbeda.
6. Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>388</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai tetaplah sebagai pengelola wakaf tunai.
7. Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>389</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai statusnya sebagai pengelola dan pemegang saham (operasional).
8. Menurut Cholidi Zainuddin, Profesor Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>390</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai sebagai pengawas (komisaris) wakaf tunai pada perseroan terbatas yang bersangkutan.
9. Menurut M. Syawaluddin Eka Saputra, dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>391</sup> kedudukan nadhir dalam perseroan terbatas wakaf tunai sebagai komisaris.

<sup>387</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>388</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>389</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>390</sup> Wawancara, 10 Juni 2009

<sup>391</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009

### B. Nadhir Mendirikan Perusahaan Perseroan Terbatas yang Modal/Sahamnya Berasal dari Wakaf Tunai

Mengenai seluk-beluk wakaf yang ditetapkan dalam fikih, semuanya hasil ijtihad dan *qiyas*, karena akal punya peran di situ.<sup>392</sup> Ulama dan umat Islam telah sepakat bahwa dalam wakaf tidak disyaratkan apa-apa kecuali satu hal, yaitu tujuannya harus untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Yang menjadi perbedaan pendapat para fukaha adalah terletak pada unsur "keabadian" wakaf secara umum. Menurut Mazhab Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm*, sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) dalam jenis wakaf benda tidak bergerak sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.

Di Indonesia secara fikih adalah mengikut pada mazhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim adalah berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.<sup>393</sup> Oleh karena itu, kebanyakan benda-benda wakaf yang terdapat di tengah masyarakat Indonesia berupa tanah dan bangunan. Sesuai dengan hasil penelitian Atmadja (1922) yang berjudul *Mohammadaansche Vrome Stinchtigen*, bahwa telah terdapat wakaf di seluruh nusantara, yaitu mulai dari Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda. Di Aceh disebut *wakeuh*, di Gayo disebut *wokos*, di Payakumbuh disebut *ibah*. Benda yang diwakafkan ada benda-benda tidak bergerak, seperti sawah, tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun

<sup>392</sup> Syaikh Mustafa Az-Zarqa, 1947, *Ahkam al-Awqaf*, Jilid ke-1, Percetakan Universitas Syiria, Damaskus, hal. 15

<sup>393</sup> Khatib Asy-Syarbini, 1958, *Mughni Al-Muhtaj ila Syarhi Al-Fadz Al-Minhaj*, Juz ke-2, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, hal. 376



karet, kebun kelapa, benda bergerak seperti Al-Qur'an, sajadah, dan batu-batu.<sup>394</sup>

Imam Maliki dalam pembahasan wakaf pada kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid* karya Ibnu Rusy, dan kitab *Mughni wa Syarh al-Kabir* karya Ibnu Qudamah, mengartikan "keabadian" lebih pada natur barang yang diwakafkan baik berupa aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah maka unsur "keabadian" terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut.

Imam Maliki kemudian memperluas lahan wakaf berupa benda bergerak seperti wakaf susu sapi dan pohon yang diambil manfaatnya, yaitu susu dan buah. Dalam pandangan *mazhab (school of thought)*, "keabadian" unsur aset wakaf adalah relatif tergantung unsur rata-rata dari aset yang diwakafkan. Dalam kerangka pemikiran seperti ini, mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun termasuk aset yang paling likuid, yaitu uang tunai (*cash waqf*).

Dalam upaya menumbuhkembangkan sektor religi, sosial, dan ekonomi publik agar lebih baik, maka wacana mengenai wakaf tunai dijadikan modal/saham perseroan terbatas dan dibeli saham pada perseroan terbatas tertentu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 21 sub a, menyebutkan benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan

<sup>394</sup> Imam Suhadi, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, dalam *Bunga Rampai Perwakafan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hal. 10-20

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah surat berharga, saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Murat Cizakca, melihat pada perkembangan sistem perekonomian yang berkembang pesat pada saat ini, sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf tunai. Misal uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan dalam pendapat mazhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang bonafide atau didepositokan di perbankan yang mana hasil keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito.<sup>395</sup>

Salah satu upaya agar wakaf tunai tetap abadi dalam pengelolaannya yang berupa saham, yaitu dengan cara membentuk suatu lembaga wakaf tunai yang operasionalnya mengacu pada manajemen modern, contohnya perseroan terbatas. Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian karena lembaga wakaf tunai yang berbentuk perseroan terbatas modal dasarnya/saham merupakan aset umat yang dikelola menjadi saham perusahaan maka keuntungan yang dihasilkan seyogianya dikembalikan untuk kepentingan publik sesuai dengan peruntukannya yang telah tercantum ketika mendirikan perseroan terbatas dan ketika dibuat akta ikrar wakaf sesuai kehendak wakif. Diharapkan dengan menjadikan wakaf tunai ke dalam bentuk saham perseroan terbatas dapat menjadikan wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara (abadi/

<sup>395</sup> Murat Cizakca, November 1998, *Awqaf in History and its Implication for Modern Islamic Economies*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1, IRTI-IDB, Jedah, hal. 48

terus-menerus/*perpetual*) dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu lama.

Antara wakaf tunai dan perseroan terbatas, terdapat kesamaan filosofi/esensinya, yaitu untuk menjaga keabadian/*terus-menerus/perpetual* modalnya yang berupa uang. Letak perbedaannya, wakaf tunai berupa aset/modal/uang tunai, sedangkan perseroan terbatas adalah badan usaha/bisnis yang berbentuk badan hukum yang didirikan dari modal/saham. Di sini terdapat peluang ekonomi dengan cara menjadikan wakaf tunai sebagai modal/saham perseroan terbatas.

Di sisi lain dalam konteks wakaf, aspek kemanfaatan benda atau harta wakaf benda bergerak (wakaf tunai) harus bersifat abadi, sementara pokoknya (modal asal) tetap utuh sampai waktu yang lama, bahkan abadi, dan modal asalnya (wakaf tunai) yang dijadikan sebagai modal dasar atau saham perseroan terbatas dikelola, dikembangkan, dan menghasilkan keuntungan sebagai orientasi bisnis murni, yang mana merupakan orientasi bisnis perseroan.

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5). Hal ini apabila diterapkan dalam bentuk saham pada perseroan akan menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya dari wakaf tunai tersebut dapat digunakan dan diperuntukkan bagi kepentingan sarana-prasarana ibadah, perekonomian, sosial masyarakat dalam lingkup kecil dan dalam skala besar digunakan bagi kepentingan kemajuan peradaban bangsa



pengelolaan wakaf uang/tunai. Yang jelas nadhir tidak boleh meraih jatah dari pengelolaan wakaf tunai tersebut lebih dari 10%.

Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Selatan, Yunus Mursid,<sup>399</sup> benda atau wakaf tunai tidak boleh dijadikan modal dalam perseroan terbatas, karena perseroan semacam ini masih diragukan keabsahannya menurut syariah, ketika penanaman modal dalam perseroan terbatas menanggung risiko kerugian yang dapat menghilangkan objek wakaf itu sendiri.

Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>400</sup> nadhir dapat mendirikan perseroan terbatas yang uangnya berasal dari wakaf tunai publik.

Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>401</sup> perseroan terbatas khusus untuk itu (perseroan terbatas mengelola dana wakaf tunai). Bila perseroan terbatas secara umum maka akan agak sulit.

Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>402</sup> sepanjang hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut dapat saja dilakukan. Namun dikhawatirkan jika hal tersebut dilakukan, maka jangan sampai terjebak pada komersialisasi dana wakaf.

<sup>399</sup> Kuesioner, tanggal 29 Mei 2009

<sup>400</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>401</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>402</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

Menurut K. N. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya<sup>403</sup>, sepanjang diberikan amanah oleh wakif untuk itu, karena pada hakikatnya wakaf itu dapat berkembang terus.

Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>404</sup> nadhir mengelola harta benda wakaf (benda bergerak dan benda tidak bergerak) sesuai kehendak wakif. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf justru mengatur agar nadhir dapat bekerja sesuai dengan yang disarankan oleh Badan Wakaf Indonesia, kalau ada izin dari Badan Wakaf Indonesia dengan satu syarat mendirikan perseroan terbatas dengan cara islami.

Menurut M. Syawaluddin Esa, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah<sup>405</sup>, nadhir dapat mendirikan perseroan terbatas yang uangnya berasal dari wakaf tunai publik.

### **C. Pengelolaan Wakaf Tunai oleh Nadhir yang Diangkat oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Itu Sendiri**

Nadhir, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bertindak sebagai manajemen investasi, yang mana dana wakaf tunai tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk

<sup>403</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>404</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>405</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009

mendanai pendirian badan usaha baru.<sup>406</sup>

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidak heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi hanya sebagian kecil lembaga wakaf (nadhir) saja yang mampu mengelola harta benda wakaf secara optimal, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>407</sup> Kesimpulan sementara berdasarkan hasil riset Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2005) menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia disinyalir tidak memainkan peranan yang signifikan dalam terealisasinya keadilan sosial. Kunci kelemahannya terletak pada nadhir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik dan kelemahan lembaga wakaf Indonesia terletak pada aspek manajemen yang belum modern.

Dalam perundang-undangan Barat, sesuai dengan prinsip badan hukum, maka wakaf menjadi milik badan hukum yang bersangkutan, di mana yayasan bisa mengeluarkan keputusan menjual, memberikan, atau menggadaikan wakaf, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan internalnya dan peraturan yang berlaku di dalamnya. Akan tetapi, dalam wakaf Islam, sekalipun nadhir yang diberi kepercayaan mengelola wakaf, namun ia tidak diperbolehkan bertindak seperti itu. Karena hal itu merupakan bentuk perlindungan wakaf dalam Islam, bahkan perangkat hukumnya jauh lebih memadai

<sup>406</sup> Saudin, op cit.

<sup>407</sup> Tholhah Hasan, <http://b.w.indonesia.net/index>, op cit.



dibanding perundang-undangan wakaf di Barat.<sup>408</sup>

Sebagian sistem yayasan versi Barat ini telah diadopsi negara-negara Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi sosial, organisasi keagamaan dan budaya, di mana organisasi-organisasi ini telah mempunyai badan hukum tersendiri, sehingga organisasi juga memiliki hak penuh untuk bertindak atas aset miliknya yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik kepemilikan itu berupa wakaf maupun lainnya. Hal ini telah menyebabkan munculnya banyak problem yang bertentangan dengan syariat, terutama dalam hal menyikapi harta wakaf yang diperlakukan sesuai dengan peraturan organisasi, baik organisasi sosial maupun lainnya.<sup>409</sup>

Menyikapi fenomena yang ada maka Undang-Undang Wakaf Islam harus memuat aturan yang tegas bahwa wakaf tidak dimiliki oleh nadhir dan yayasan yang mengelolanya, atau orang yang mendaftarkan wakaf dengan mengatasnamakan dirinya. Contoh wakaf tanah harus tercatat dalam akta tanah sebagai wakaf, bukan milik perorangan. Demikian pula halnya dengan wakaf tunai, harus tercatat sebagai wakaf.

Berdasarkan hadis Ibnu Umar r.a., ia berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (Hadis Riwayat Muslim). Dari

<sup>408</sup> Mundzir Qahaf, op cit., hal. 118

<sup>409</sup> Mundzir Qahaf, op cit., hal. 119

hadis ini dapat dipahami bahwa salah satu cara agar tidak terjadi penumpukan atau pengonsentrasian harta kekayaan hanya pada satu kelompok masyarakat saja, yaitu dengan cara mewakafkan harta (benda bergerak, benda tidak bergerak) yang mana hasilnya diberikan untuk kepentingan publik dalam jangka panjang.

Meskipun keberadaannya telah lama dipraktikkan oleh masyarakat, asumsi teoretis ahli wakaf Indonesia, Uswatun Hasanah dan Imam Suhadi, menyatakan bahwa wakaf di tanah air belum produktif, belum mampu mewujudkan keadilan sosial,<sup>410</sup> karena benda wakaf kebanyakan berupa benda tidak bergerak yang membutuhkan biaya perawatan sehingga kebanyakan aset-aset wakaf kemudian banyak terbengkalai tidak berkembang maksimal sehingga manfaatnya yang signifikan tidak berdampak luas.

Agar aset-aset wakaf dapat terpelihara dengan baik dan tujuan keabadiannya tetap terjaga, diperlukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Menurut peraturan perundangan bahwa hak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diemban oleh nadhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa:

1. Nadhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Pasal 42).
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

<sup>410</sup> Ridwan Al-Makassary, *op cit*

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 43 ayat 1).

3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif (Pasal 43 ayat 2).
4. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah (Pasal 43 ayat 3).
5. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 44 ayat 1).
6. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadhir diberhentikan dan diganti dengan nadhir lain apabila nadhir yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia bagi nadhir perseorangan;
  - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadhir organisasi atau nadhir badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 4 ayat 1);



- f. pemberhentian dan penggantian nadhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 45 ayat 2).
- g. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadhir lain karena pemberhentian dan penggantian nadhir, dilakukan dengan tetap memerhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf (Pasal 45 ayat 3).

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai oleh nadhir yang diangkat oleh perseroan terbatas itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menurut Saharuddin Bacik, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan,<sup>411</sup> nadhir tersebut berhak mengelola wakaf tunai perseroan terbatas itu sendiri, dan hal itu tidak menjadi masalah bila wakaf tunai perseroan terbatas dikelola oleh nadhir yang diangkat oleh perseroan itu sendiri.
2. Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>412</sup> ia dapat mengelola wakaf tunai perseroan terbatas itu sendiri, karena untuk menjamin profesionalitas perseroan terbatas itu sendiri karena karyawannya dapat lebih konsen.

<sup>411</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 25 Mei 2009

<sup>412</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

3. Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>413</sup> nadhir tersebut dapat mengelola wakaf tunai perseroan terbatas itu sendiri.
4. Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>414</sup> nadhir tersebut dapat mengelola wakaf tunai perseroan terbatas itu sendiri, karena nadhir haruslah mandiri dan untuk itu dibentuk badan khusus bagi pengembangan pengelolaan lembaga wakaf perseroan tersebut.
5. Menurut KN. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>415</sup> pengelolaan wakaf tunai perseroan terbatas oleh nadhir perseroan terbatas itu sendiri dapat saja, sesuai prinsip tujuan peruntukan wakaf itu dapat mencapai sasaran.
6. Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>416</sup> pengelolaan wakaf tunai perseroan terbatas oleh nadhir perseroan terbatas itu sendiri tidak dapat, karena masalah pengelolaan wakaf tunai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf Tunai. Jadi untuk sekarang

<sup>413</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>414</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009

<sup>415</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>416</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

saham yang dimilikinya. Sedangkan wakaf atau nadhir wakaf dalam kapasitasnya sebagai badan hukum menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak.

Pada saham perusahaan perseroan biasa, keuntungan bersih dibagikan kepada para pemilik saham setelah menurunkan penyaluran penggunaannya dan semua beban kerusakan, dana cadangan lainnya dan gaji manajer. Wakaf atau nadhir menjadi manajer sejak dikeluarkannya saham dan menjualnya serta memegang nilainya dari partner-partnernya yang memiliki saham, hingga mereka melanjutkan investasinya setelah itu. Dijelaskan lebih lanjut, kepemilikan bangunan bisa:

- a. Tetap berada di tangan pemilik saham secara berlanjut, sehingga tidak perlu memindahkan kepemilikan kepada wakaf, ini berarti kerja samanya akan abadi sebagaimana telah dikenal dalam perusahaan saham perseroan.
- b. Wakaf bisa memiliki bangunan secara bertahan dengan membeli saham dari pasar.
- c. Kepemilikan bangunan berpindah kepada wakaf dengan cara diberikan, atau sebagai wakaf kepada perusahaan itu sendiri, setelah para pemilik saham memetik hasil yang diharapkan dari investasinya dengan mengembalikan pokok harta dan keuntungan yang diperkirakan.<sup>419</sup>

Bentuk investasi *musyarakah* (hukum Islam) sama dengan konsep perseroan terbatas (hukum perdata Indonesia)

<sup>419</sup> Mundzir Qahf, op cit., hal. 286-287



di mana risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf (bila berbentuk perseroan terbatas disebut sebagai nadhir perseroan terbatas) lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal (pemegang saham) atau lebih. Maka dalam hal ini apakah nadhir dapat menjadi pemilik modal/pemegang saham perseroan terbatas?

Perbedaan pengertian pendiri dan pemegang saham,<sup>420</sup> pendiri adalah mereka yang hadir di hadapan notaris pada saat akta pendirian perseroan ditandatangani. Status hukum para pendiri ini akan berubah menjadi pemegang saham pada saat perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, yaitu pada saat akta pendirian perseroan terbatas tersebut memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan HAM.

Dengan demikian berarti pada saat yang bersamaan, yaitu pada saat perseroan terbatas memperoleh status badan hukum, saham perseroan sebagai bukti pemilikan pemegang saham dalam perseroan terbatas memperoleh kedudukannya dalam hukum. Pemegang saham adalah pendiri perusahaan yang telah melakukan penyeteroran modal dalam perseroan yang telah memperoleh status badan hukum; atau setiap pihak yang membeli saham dari pemegang saham sebelumnya.

Pemegang saham dalam perseroan terbatas yang sudah berbadan hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban pribadi, karena pemberian status badan hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun, apabila pemegang saham

<sup>420</sup> Gunawan Widjaja, 2007, *op cit.*, h. 14

melakukan iktikad buruk, melakukan perbuatan hukum atau memanfaatkan harta perseroan secara melawan hukum, demi hukum bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan terbatas.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ini berarti bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Ketentuan ini tidak berlaku di antaranya, apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi (Pasal 3 ayat [2] sub a).

Hasil penelitian yang berkaitan dengan dapatkah nadhir menjadi pemegang saham perseroan terbatas:

1. Menurut Saharuddin Bacik, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan,<sup>421</sup> nadhir dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, dalam dua kategori, yaitu:
  - a. untuk peruntukan wakaf dapat sementara, yaitu bisa diambil kembali, ini bersifat *qardh* (pinjaman).
  - b. wakaf bisa selamanya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

<sup>421</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 25 Mei 2009

2. Menurut staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Yunus Mursid,<sup>422</sup> nadhir dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai.
3. Menurut Ketua Lembaga Dompot Sosial Insan Mulia Palembang, Adi Afriliansyah,<sup>423</sup> nadhir dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, karena nadhir yang mengelola wakaf tunai, ia sebagai pemilik saham, setelah menjadi badan hukum maka nadhir menjadi pemegang saham perseroan.
4. Menurut Joni Emirzon, Profesor Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>424</sup> nadhir dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, karena nadhir mewakili umat. Mengingat badan hukum ada dua, yaitu publik, yaitu lembaga pemerintah (pemerintahan daerah) dan privat. Badan hukum ada yang bersifat komersial (perseroan terbatas) dan nonkomersial (yayasan). Dalam hal saham merupakan modal dasar untuk mendirikan perseroan, maka sifatnya komersial, untuk mencari keuntungan yang mana hasilnya dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik, sesuai dengan akta ikrar wakaf.
5. Menurut Abdullah Gofar, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>425</sup> nadhir

<sup>422</sup> Kuesioner, tanggal 29 Mei 2009

<sup>423</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 8 Juni 2009

<sup>424</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>425</sup> Kuesioner, tanggal 5 Juni 2009



dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, tapi perlu kehati-hatian, nadhir bukan sebagai pemilik modal, tetapi hanya sebagai pengelola modal (wakaf tunai) saja. Dikhawatirkan jika nadhir tidak mempunyai tanggung jawab pemilik, maka kekhawatiran terjadi terhadap dana/objek wakaf.

6. Menurut KN. Sofyan Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,<sup>426</sup> nadhir tidak dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, karena nadhir itu apakah ia sebagai pengelola wakaf yang sesuai dengan ikrar wakaf oleh wakif.
7. Menurut Duski Ibrahim, Profesor *Ushul Fiqh* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>427</sup> nadhir tidak dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, karena manajemennya akan kacau, di mana kedudukan nadhir merangkap dua sebagai pengelola sekaligus pemegang saham perseroan.
8. Menurut Cholidi Zainuddin, Profesor Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>428</sup> nadhir tidak dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, dikhawatirkan bila sewaktu-waktu perseroan merugi, bagaimana pertanggungjawaban nadhir tersebut kepada

<sup>426</sup> Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>427</sup> Wawancara dan Kuesioner, tanggal 9 Juni 2009

<sup>428</sup> Wawancara, 10 Juni 2009

wakif/publik.

9. Menurut M. Syawaluddin Eka Saputra, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah,<sup>429</sup> nadhir dapat menjadi pemegang saham yang berasal dari wakaf tunai, dan ia dalam perseroan terbatas berkedudukan sebagai dewan komisaris, karena ia telah diamanahi oleh wakif sebagai penjaga benda wakaf.

---

<sup>429</sup> Wawancara, tanggal 12 Juni 2009

## VI FILANTROPI DAN CSR DALAM RANAH HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

### A. Filantropi (Kedermawanan) Dalam Islam

Hadis Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam*, menyatakan bahwa 9/10 rezeki Allah Swt berasal dari perniagaan. Dalam pengertian kontekstual dewasa ini bahwa seluruh muslim harus memenuhi kebutuhan ekonomi melalui perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai bentuk wiraswasta secara bebas. Keuntungan harus dipandang sebagai hasil dari berbagai kegiatan yang diperoleh secara halal.<sup>430</sup>

Pada dimensi tataran hukum *mua'malah* (sosial ekonomi), hukum Islam hanya merumuskan *general principles of law* (prinsip-prinsip dasar) dan tidak menyentuh aspek teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan harta memegang peranan penting dalam hukum Islam karena terkait erat dengan kesejahteraan dan perekonomian publik, ditetapkan prinsip-prinsip dasar (*general principles of law*) yang berkaitan dengan harta benda tersebut, di mana:

1. Harta dinilai sebagai suatu kebaikan dan kenikmatan jika berada di tangan orang-orang saleh
2. Harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah mendapatkan

<sup>430</sup> Ade Maman Suherman, op cit., hal. 127



pinjaman-Nya

3. Dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah dan jihad
4. Cara kerja yang kotor diharamkan
5. Hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya diakui
6. Seseorang dilarang menguasai benda-benda yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak
7. Larangan kepemilikan harta yang membahayakan orang lain
8. Pengembangan harta tidak boleh menimbulkan kerusakan akhlak dan mengorbankan kepentingan umum
9. Memperdekat jarak perbedaan antar strata sosial di tengah masyarakat
10. Kemandirian (eksistensi) umat harus diwujudkan
11. Adil dalam berinfak
12. Takaful di antara anggota masyarakat harus ditegakkan.<sup>431</sup>

Prinsip di atas mengandung pengertian, benda apa pun bentuknya tidak sekadar memiliki hak (*privelege*) bagi pemiliknya, di mana kepemilikan membawa tanggung jawab tertentu terhadap benda yang dimiliki, penggunaannya dan keuntungan (*benefit*) yang didapat dari benda tersebut.

<sup>431</sup> Ade Maman Suherman, *op cit.*, hal. 202-203

- Asy-Syaukani, tt. *Irsyad Al-Fuhul ila Tabqiq Al-Haq min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. 1994. *Nailul Authar*, Jilid ke-6, Cet. ke-1, alih bahasa Adib Bisri Musthafa, et al. Semarang: CV Asy-Syifa'
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq, tt. *Al-Muhadzdzab dan Syarahnya, Al-Majmu'*. Kairo: Zakaria Ali Yusuf
- Asy-Syarbini, Khatib. 1958. *Mughni Al-Muhtaj ila Syarhi Al-Fadz Al-Minhaj*, Juz ke-2. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Perusahaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. ke-1. Bandung: Nuansa Aulia
- , 2007. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. ke-2. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Setiono. 2002. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Averoes Press
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- , 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi ke-1, Cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet. ke-3. Jakarta: Rajawali

Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan: Sistem Hukum*, Ed. ke-1, Cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Press

Schermerhorn, John R. 1993. *Management For Productivity*. New York: John. Wiley & Sons

Suhadi, Imam. 2002. Wakaf untuk Kesejahteraan Umat. PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, dalam *Bunga Rampai Perwakafan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta

Sunny, Ismail. 1997. *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Jilid ke-1. Bandung: Ulul Albab Press

Syahatah, dan Fayyadah. 2004. *Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal (Adh-Dhabbit Asy-Syari'ah liat-Ta'amul fi Suq Al-Auraq Al-Maliyah)*, alih bahasa A. Syakur. Surabaya: Pustaka Progresif

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu



- Smith, M., Fies Skenisen. 1993. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Airlangga
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam: dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia
- Tan, Mely G. *Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan: Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung & co.
- Tulus. 2004. *Permasalahan Wakaf di Indonesia*, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta
- Tunggal, Iman Sjahputra. 2002. *Memahami Konsep Good Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo
- Al-Utsimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2008. *Panduan Wakaf, Hibab dan Wasiat: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnab*, Cet. ke-1, alih bahasa Abu Hudzaifah. Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i

- Praja, Juhaya S. 2000. *Aspek Sosiologi Dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia*, dalam Epistemolog Syara' Mencari Format Baru Fiqh di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Praja, Yahya. S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (Pengantar)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prodjodikoro, Wirjono. 1961. *Hukum Perdata Tentang Persetudjuan Tertentu*, Cet. ke-4. Bandung: Sumur Bandung
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. ke-1. Jakarta: Praninta Offset
- , 2007. *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, Ed. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- , mengutip Steven J. Heim, *Predicting Legal Transplants: The Case of Servitudes in the Russian Federation*, Transnational Law & Contemporary Problems, Spring
- , mengutip Alan Watson, *Legal Transplants and European Private Law*, 2

Widjaya, I.G. Rai. 2003. *Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Cet. ke-3, Editor Herman Sudrajat. Jakarta: Kesaint Blanc

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1993. Jakarta: Intermasa

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Edisi ke-1, Cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Az-Zarqa, Syaikh Mustafa. 1947. *Abkam Al-Awqaf*, Jilid ke-1. Damaskus: Percetakan Universitas Syiria

Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz ke-8. Damsyiq: Dar Al-Fikr

Zuhdi, Masjfuk. 1991. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. ke-2, Ed. ke-2. Jakarta: Masagung

### Makalah

Abdillah, Masykuri. 2004. "Demokrasi yang Religius: Membincang Kembali Konsep Demokrasi di Indonesia". Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Fiqh Siyasah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta



- Antonio, Muhammad Syafi'i. 7-8 Januari 2002. "Bank Syari'ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf". Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Wisma Haji Batam, tidak diterbitkan
- Edi Suharto, 25 November 2006. "Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan Comdev, Work Shop CSR". Bandung, diakses 6 Maret 2008
- Khalid, Hendra. 13 s/d 15 April 2004. "Wakaf Tunai Upaya Mensejahterakan Umat", Makalah disampaikan pada Orientasi Perwakafan Mahasiswa se-Jawa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia di Wisma Haji, Jakarta
- Lukviarman, N. 2001. "*Key Characteristics of Corporate Governance: The Case of Indonesia*". Working Paper, No. 01-01, Graduate School of Business, Curtin University of Technology, Perth
- Mannan, M.A. 1999. "*Cash Waqf Certificate: An In-novation in Islamic Financial Instrument*". Prooceding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance
- Martanti, Anastasia Dwipebri. "*Corporate Social Responsibility (CSR) Seharusnya Ikut Serta Perbaiki Perekonomian Bangsa*". Sinar Mas, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Mulyanto, Atantya H. 21 Januari 2007. Workshop "*Enterprise Management in New Business Paradigma*". Tanjung Enim

Rahardjo, Dawam. 7-8 Januari 2002. "Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". Makalah Workshop Internasional "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", Wisma Haji Batam, tidak diterbitkan

Syakhroza, Akhmad. 2005. "*Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*". Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta

Saudin. Juni 2008. "Aspek Hukum Pengelolaan Wakaf, Tesis pada Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum BKU". Hukum Bisnis, Universitas Sriwijaya, Palembang

### Jurnal

Abdullah, Abdul Ghani. Nomor 12 Tahun V. Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia. Mimbar Hukum, Al-Hikmah, dan Ditbinpera Islam Departemen Agama, Jakarta

- Cizacka, Murat. November 1998. *Awqaf in History and its Implication for Modern Islamic Economies*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1, IRTI-IDB, Jedah
- Darwin, Ali, tt. Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia. *EBAR-Economic Business Accounting Review*, Ed.3
- Harahap, Yahya HM. Nomor 7 Tahun III. Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional. *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Departemen Agama, Jakarta
- Hartono, Sri Redjeki. Nomor 2 Tahun 1995. Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional (ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi Bisnis). *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
- J., Guthrie, and L.D. Parker. 1990. *Corporate Social Disclosure Practise: A Comparative International Analysis*, *Advances in Public Interest Accounty*, Vol. 3
- Mudzar, M. Atho. Nomor 4 Tahun II. Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam. *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama, Jakarta
- Republika, Dompot Dhu'afa. Nomor 10 Tahun IV Desember 2001-Januari 2002, *Potensi Wakaf*, Pendar



Tilt, 1994, dalam Haniffa, R.M., dan T.E. Cooke, 2005, The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting, *Journal of Accounting and Public Policy* 24

### Kamus

Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, tt. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Krapyak

Aziz, Abdul, Dahlan, et.al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-2, 3, 5, 6, Cet. ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka

Erwin, Rudi T., et al. 1983. *Kamus Hukum*, Cet. ke-3. Jakarta: Aksara Baru

Kramers, H.A.R. dan L.H. 1981. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Karachi-Pakistan: South Asian Publication

Simorangkir, et al. 1983. *Kamus Hukum*, Cet. ke-3. Jakarta: Aksara Baru

Sударsono. 1999. *Kamus Hukum*, Cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta

Wojowasito, S. 2001. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

*English Dictionary*, The New Shorter Oxford

### Internet

Adang Yasemil Anwar. 2008. "Pembaruan Hukum Pidana". <http://books.google.co.id>. Diakses 19 Juni 2009.

Administrator Bina Muslim. 5 September 2006. "Alternatif Pemanfaatan Wakaf Tunai". <http://www.administratorbinamuslim>. Diakses 30 Januari 2007.

Agustianto. 4 Februari 2008. "Ekonomi Syariah untuk Kepentingan Negara dan Bangsa". <http://www.agustianto.com>. Diakses 7 Januari 2009.

-----, "Produktif untuk Kesejahteraan Umat". <http://agustianto.niriah.com/>. Diakses 30 Agustus 2008.

Ahmad Sarwat. 10 Mei 2006. "Beda Wakaf dan Zakat". <http://www.ahmadsarwat.com>. Diakses 19 Maret 2007.

- Amil Zakat. 5 Januari 2007. "Strategi Penggalangan dan Pendayagunaan Dana Filantropi Melalui LSM dan Organisasi Sosial". <http://amilzakat.blogspot.com/2007>. Diakses 4 Agustus 2008.
- Andi Surugi/Ardhian Novianto. Sabtu, 20 Mei 2006. "Bisnis dan *Corporate Philantbropy*". <http://www.ibl.or.id>. Diakses 19 Juli 2008.
- Andi Safrani. "Perseroan Terbatas Syari'ah?" <http://www.assyafrani.com>. Diakses 25 Agustus 2008.
- Bank Indonesia. "Biro Perbankan Syari'ah". <http://www.bankindonesia>. Diakses 17 November 2008.
- Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia. 19 Desember 2007. "Wakaf Tunai, ISBIR". <http://bimasislam.depag.go.id>. Diakses 30 Agustus 2008.
- Bogasari, Divisi. <http://fuansiscusselirang.com>. "Revitalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Tanggung Jawab Sosial: Studi Kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk." Diakses 16 Oktober 2009.
- CGPI, Penilaian dan Peningkatan Penerapan *Corporate Governance*, <http://www.iicg.orgbpkp.index>. Diakses 26 Agustus 2008.



- Dakwatuna. 22 Desember 2006/01 Dzulhijjah 1427 H. "Hukum Wakaf dengan Uang Tunai". <http://www.dakwatuna.com>. Diakses 3 Mei 2007.
- Darul Ulum. Jumat, 23 November 2007. "Tema Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (1905-1975 M)". <http://darul-ulum.blogspot.com>. Diakses Kamis, 26 Februari.
- Detik. 2009. "Memberdayakan Potensi Dana Masyarakat: Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Penekan Biaya Sosial". <http://makalah.blog.detik.com/page>. Diakses 10 Oktober 2009.
- Didi Kusnadi. "Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik, dan Produk Hukum)". <http://www.badilag.net>. Diakses Kamis, 26 Februari 2009.
- Edi Suharto. 25 November 2006. "Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan Comdev, Work Shop CSR, Bandung". <http://www.edisuharto>. Diakses 6 Maret 2008.
- Erie Sudewo. 20 Mei 2008. "Rancangan Undang-Undang Zakat Kebijakan Filantropi, <http://www.era.muslim.net>. Diakses 25 Mei 2008.
- Farid Hasan. "Temporalitas Wakaf dalam Hukum Nasional Beserta Syari'ah Islam yang Melandasinya". <http://www.faridhasan>. Diakses 17 November 2008.

Kompas. Sabtu, 21 Juli 2007. "CSR Tidak Hanya Filantropi: Tidak Mungkin Membangun Negeri Tanpa Melibatkan Pebisnis". <http://64.2037/11/kompas-cetak>. Diakses Jumat, 8 September 2008.

-----, 9 Oktober 2003. "Ratno Lukita, Memahami Pro Kontra Revisi KUH Pidana". <http://www.unisosdem.org>. Diakses 19 Juni 2009.

Mawardi Muhammad Sholeh, M. 4 Desember 2008. "Wakaf Tunai dan Implementasinya: Sebuah Paradigma Baru Wakaf di Indonesia Peranan Nadhir dalam Pengelolaan Wakaf". <http://fikridawa.blogspot.com>. Diakses 19 Januari 2009.

Mpu Gandrink/K.H. Shiddiq Al-Jawi. 24 Maret 2008. "Perdagangan Saham: Tinjauan Menurut Hukum Islam". <http://beningstock.com/?P=18>. Diakses 24 Januari 2009.

Muhammad Syafi'i Antonio. "Casp Wagf dan Anggaran Pendidikan Umat". <http://www.muhammadsyafi'iantonio.com>. Diakses Senin, 4 Februari 2008.

Murkholis, 29 Januari 2009. "Penegakan Syari'at Islam di Indonesia". <http://murkholis.77-staff.vii.ac.id>. Diakses 29 Juni 2009.

- Muttaqin Hidayatullah. 20 Desember 2003. "Telaah Kritis Pasar Modal Syariah". <http://www.e-syariah.org/jurnal/?p>. Diakses 24 Januari 2009.
- Halal Guide. 5 September 2006. "Tanah Wakaf Perlu Sertifikat". <http://www.halalguide.info>. Diakses 5 Februari 2008.
- HM. Cholil Nafis. 27 Mei 2007. "Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta". <http://www.pmiikomfaksyahum.wordpress.com>. Diakses 19 Juni 2008.
- Herman Budianto. "Masa Depan Wakaf Indonesia, Majalah FOZ Edisi Feb-Maret 2007". [www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com). Diakses 19 Agustus 2008.
- ". "Berwakaf Sebagai Gaya Hidup, Majalah FOZ" Edisi Feb-Maret 2007, [www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com). Diakses 19 Agustus 2008.
- ". Jumat, 4 Mei 2007. "Wakaf Ibadah Manusia Pilihan". [www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com). Diakses 3 April 2008.
- Pikiran Rakyat. Selasa, 10 Agustus 2004. "Beda Infak dan Sedekah". <http://www.pikiranrakyat>. Diakses 31 Desember 2006.



Republika. "Musahamah". Kamis, 16 Oktober 2008, jam 14.05.00, <http://www.republika.co.id/berita/8347/>. Diakses Kamis, 19 Februari 2009, jam 13.00.00.

-----, 20 Oktober 2004. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prinsip GCG". <http://www.republika.co.id>. Diakses 6 Agustus 2008.

-----, Jumat, 21 Oktober 2004. <http://www.republika.co.id/suplemen/cetak>. Diakses 30 Januari 2008.

-----, 4 Februari 2002. Muhammad Syafi'i Antonio. <http://www.republika.senin>. Diakses 21 Juni 2008.

Ridwan Al-Makassary. "Merintis Jalan Menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia". <http://www.philanthropyfor>. Diakses 21 Mei 2007.

Rizka Maulan. 2 Desember 2006. "Wakaf Sebagai Kekhususan Umat Islam, Perseroan Terbatas Syarikat Takaful Indonesia". <http://www.rizkamaulan>. Diakses 1 April 2007.

Rochimin. "Wakaf Dalam Syari'at Islam". <http://www.rochimin>. Diakses 17 November 2008.

Sayekti, Yosefa. "Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta) dalam Perbanas Institute." <https://infor.perbanasinstitute>.

ac.id/pdf.Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas  
Makasar, 26-28 Juli 2007, diakses 16 Oktober 2009.

Suhwaward K. Lubis. Sabtu, 29 November 2008. "Kebijakan  
Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia (Bagian 2),  
<http://suhrawadilubis.multiply.com/feed/rss>. Diakses 2  
Januari 2009.

----- . Wakaf Produktif dan Pembangunan. [http://  
suhrawadilubis.multiply.com/feed/rss](http://suhrawadilubis.multiply.com/feed/rss). Diakses 24  
Maret 2008.

Tholhah Hasan. 14 Maret 2008. "Perkembangan Kebijakan  
Wakaf di Indonesia, Ketua Badan Pelaksana Badan  
Wakaf Indonesia". <http://bw.indonesia.net/index>.  
Diakses 25 November 2009.

UGM. "Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan  
Publik Islam". <http://lebi.fe.ugm.ac.id/shirat/data>.  
Diakses 5 Juni 2009.

Welhendri. 1993. "Teologi Filantropi LPM". [http://www.  
kpmm.or.id](http://www.kpmm.or.id). Diakses 19 Juli 2008.

Wikipedia. 13-11-2009. "Tipe Saham". [http://id.wikipedia.  
org/wiki/saham](http://id.wikipedia.org/wiki/saham).

Wisnu Sudibjo. 9 Desember 2007. "Perseroan Dalam Islam".  
<http://wisnusudibjo.wordpress.com>. Diakses 6 Januari  
2008.

“Adakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?”. Diakses 17 November 2008.

<http://www.hupelita.com>. Diakses 19 Juni 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 LN Tahun 2001 Nomor 112 Tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002 M (28 *Shafar* 1423 H)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)